

**PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN
SOSIAL, DAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI
PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA**

Disertasi

Program Doktor Ilmu Ekonomi



Oleh :
Syahril Ramadhon Aamsyah
NIM 21931014

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
Juli 2026**

PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN SOSIAL, DAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA

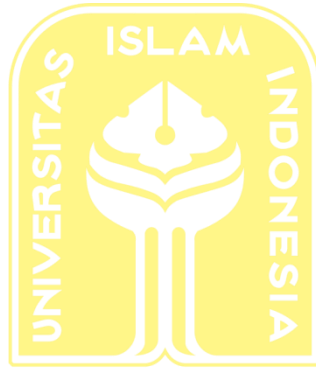
Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta



Oleh :
Syahril Ramadhon Aamsyah
NIM 21931014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 14 Juli 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)

Ko Promotor I

(Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D)

Ko Promotor II

(Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.)

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan Ujian Tertutup Disertasi dan
Review Artikel, yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **SYAHRIL RAMADHON ALAMSYAH**

No. Mhs.: 21931014

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dengan Judul:

**PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN SOSIAL, DAN
ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI
INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,



(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)

Ko Promotor I,



(Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D)

Ko Promotor II,



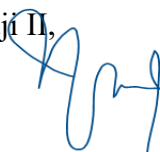
(Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.)

Penguji I,



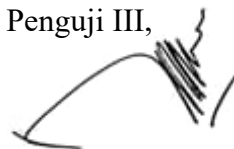
(Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.)

Penguji II,



(Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec.)

Penguji III,



(Dr. Riduwan, S.E., M.Ag.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor



(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)



**FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA**

Gedung Prof. Dr. Aze Partalendja
Universitas Islam Indonesia
Cendong Catur Dugok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 881376
F. (0274) 882589
E. Revisi@uii.ac.id
W. revisi.uii.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
REVISI UJIAN TERTUTUP**

JUDUL DISERTASI

**Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Bantuan Sosial dan Zakat Terhadap Kemiskinan di
Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia**

Disusun oleh: **Syahril Ramadhon Alamsyah**

No. MHS.: **21931014**

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.	Promotor	27/5/2026	
2.	Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D	Ko Promotor I	22/5/2026	
3.	Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.	Ko Promotor II	24/5/2026	

Catatan:

⇒ 6 (enam) lembar revisi harap ditunjukkan ke Tim Penguji



**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
REVISI SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI**

JUDUL DISERTASI

**Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Bantuan Sosial dan Zakat Terhadap Kemiskinan di
Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia**

Disusun oleh: **Syahril Ramadhon Alamsyah**

No. MHS.: **21931014**

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.	Promotor	20/2/2026	
2.	Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D	Ko Promotor I	21/2/2026	
3.	Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.	Ko Promotor II	19/2/2026	

HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL

**PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN SOSIAL,
DAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN
PEDESAAN DI INDONESIA**

Disetujui oleh promotor dan Ko-promotor pada tanggal 13/10/2025



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D(Promotor)



Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D (Ko-Promotor)



Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., MA (Ko-Promotor)

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING REVISI UJIAN
PROPOSAL DISERTASI**

JUDUL DISERTASI:

**PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN SOSIAL DAN
ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Syahril Ramadhon Alamsyah

No. MHS.: **21931014**

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.	Promotor	16/2/2025	
2.	Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D	Ko Promotor I	15/5/2025	
3.	Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.	Ko Promotor II	17/2/2025	

HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN DISERTASI

PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN

SOSIAL, DAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA

Disetujui oleh promotor dan Ko-promotor pada tanggal 13/10/2024



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D (Promotor)



Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D (Ko-Promotor)



Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., MA..... (Ko-Promotor)

PERNYATAAN PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Syahril Ramadhon Alamsyah
NIM. 21931014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, karena atas limpahan rahmat dan rida-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program doktoral. Penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Isu utama yang dikaji dalam disertasi ini adalah pengaruh faktor-faktor struktural dan institusional terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara lebih spesifik, disertasi ini menganalisis **PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI, BANTUAN SOSIAL DAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA**. Kemiskinan dalam penelitian ini dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro, efektivitas kebijakan perlindungan sosial pemerintah, serta peran instrumen keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disertasi ini tidak akan bisa disajikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga kepada:

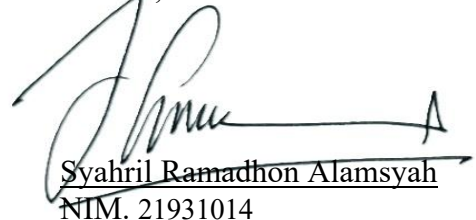
1. Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku promotor yang telah membimbing dengan sepenuh hati, memberikan arahan dan motivasi sehingga penelitian ini menjadi sebuah karya yang layak dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat.

2. Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku ko promotor I yang juga telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga karya ilmiah ini semakin lengkap.
3. Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A. selaku ko promotor II yang juga telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga karya ilmiah ini semakin lengkap.
4. Seluruh civitas akademik Universitas Islam Indonesia yang telah membantu memfasilitasi saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Saya menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka atas segala kekurangan yang terdapat dalam karya ini, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Penulis,



Syahril Ramadhon Alamsyah
NIM. 21931014

MOTTO

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

"...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS. Ar-Ra'd: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusunan dan penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari pertolongan, dukungan, serta kontribusi yang berharga, baik secara materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Proses panjang yang dilalui dalam perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan karya ilmiah ini telah diiringi oleh doa, bimbingan, motivasi, dan pengorbanan dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan bantuan dan perhatian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disertai kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan, sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan disertasi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai suri teladan utama dalam kehidupan, yang telah mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, keteguhan, serta kecintaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kemuliaan dan kemaslahatan umat.
3. Orang tua kami tercinta, Bapak Ahmad Rivai Lani, Ibu Rusdah, Bapak Zainal Arifin, dan Ibu Hapni Emma (Almarhumah, semoga Allah memberkahi dan merahmati), atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak ternilai, serta pendidikan dan keteladanan yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik dan kehidupan

penulis.

4. Istri tercinta, drg. Novi Yatri Pratiwi, serta kedua anak kami, Falah Muhammad Alamsyah dan Akhyar Abdurrahman Alamsyah, yang senantiasa memberikan dukungan moral, kesabaran, pengertian, serta doa yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Saudara-saudari kami, kak Thomas Alvian Edison, Cicik Novi Ratna Sari beserta suami, adik bungsu Khairunnisa (Almarhumah, semoga Allah merahmati), Akak Novan, Wak Umi Dian, dan Kholah Mary, atas perhatian, kebersamaan, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, baik dalam suka maupun duka.

Akhir kata, disertasi ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan keikhlasan. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran, serta bantuan sosial dan zakat terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori dengan 770 unit analisis. Model regresi data panel diterapkan secara terpisah untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan penambahan variabel panjang jalan beraspal untuk wilayah perkotaan dan dana desa sebagai variabel tambahan untuk wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di wilayah pedesaan. Inflasi terbukti secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, sementara dampaknya relatif lebih kecil di wilayah perkotaan. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kedua wilayah. Bantuan sosial terbukti efektif dalam menurunkan kemiskinan di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan pengaruhnya relatif kurang optimal akibat kendala distribusi. Zakat berperan signifikan dalam menurunkan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pendekatan produktif, namun pengaruhnya relatif lebih lemah di wilayah perkotaan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor ekonomi lebih dominan memengaruhi kemiskinan di wilayah perkotaan, sementara instrumen sosial seperti bantuan sosial dan zakat lebih efektif di wilayah pedesaan. Selain itu, pembangunan jalan beraspal di wilayah perkotaan serta alokasi dana desa di wilayah pedesaan terbukti mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis wilayah dan kontekstual, serta perlunya integrasi antara instrumen ekonomi dan sosial guna memastikan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Inflasi; Pengangguran; Bantuan Sosial; Zakat; Wilayah Perkotaan dan Pedesaan; Dana Desa

Abstract

This study examines the impact of macroeconomic variables (economic growth, inflation, and unemployment), social assistance, and zakat on poverty in both urban and rural areas of Indonesia. The research employs an explanatory research approach with 770 units of analysis. It utilizes separate panel data regression models for urban and rural areas, with the addition of paved road length as a variable for urban areas and village funds as an additional variable for rural areas. The results indicate that economic growth has a significant effect on reducing poverty in urban areas, but shows no significant impact on rural areas. Inflation significantly increases poverty in rural areas, but it has a lesser impact in urban areas. The unemployment rate has a positive and significant effect on both regions. Social assistance has been proven to be effective in urban areas, whereas in rural areas, its impact is less critical due to distributional constraints. Zakat plays a significant role in reducing poverty in rural areas through a productive approach; however, its effect is less pronounced in urban areas. This study also reveals that economic factors are more influential in urban areas, while social instruments such as assistance and zakat are more effective in rural regions. Additionally, the development of paved roads in urban areas and the allocation of village funds in rural areas have been proven to support poverty reduction. These findings underscore the importance of contextually tailored, region-based poverty alleviation policies, as well as the need for integration between economic and social instruments to ensure that poverty reduction efforts across Indonesia are more equitable and sustainable

Keywords: Poverty, Economic Growth, Inflation, Unemployment, Social Assistance, Zakat, Urban and Rural, Village Fund

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	ii
PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	12
1.3. Rumusan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian.....	17
1.5. Kontribusi Hasil Penelitian	16
1.6. Kebaruan Penelitian	18
1.7. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	24
2.1. Kajian Pustaka	24
2.1.1. Variabel Kemiskinan.....	24
2.1.2. Variabel Makro Ekonomi	42
2.1.3. Variabel Bantuan Sosial.....	56
2.1.4. Zakat.....	61
2.1.5. Panjang Jalan Aspal.....	66
2.1.6. Dana Desa	69

2.2. Kerangka Teori.....	711
2.2.1. Grand Teori	711
2.2.2. Teori Pengaruh Variabel Bebas terhadap Kemiskinan	79
2.3. Penelitian Terdahulu	81
2.4. Kerangka Penelitan	88
2.5. Hipotesis Penelitian	900
BAB III METODE PENELITIAN.....	95
3.1. Jenis Penelitian	95
3.2. Definisi Variabel Penelitian	96
3.2.1. Variabel dependen	96
3.2.2. Variabel Independen	97
3.3. Model Analisis	102
3.3.1. Metode Estimasi Model	105
3.3.2. Pilihan Model Uji Statistik.....	108
3.3.3. Interpretasi dan Uji Hipotesis	110
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	113
4.1. Deskripsi Objek Penlitian	113
4.2. Analisi Deskriptif	116
4.3. Analisis data	1200
4.3.1. Estimasi Model Data Panel.....	1200
4.3.2. Uji Asumsi Klasik.....	129
4.3.3. Uji Normalitas Residual.....	140
4.3.4. Uji Hipotesis	1454
4.4. Pembahasan	1543
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	1775
5.1 Kesimpulan.....	1775
5.2. Saran	186
5.3. Keterbatasan	187
5.4. Implikasi	188
DAFTAR PUSTAKA	191
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	199

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Provinsi Dengan Persentase Penduduk Miskin Terbesar (2023)	3
Tabel 1 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi	5
Tabel 1 3 Data Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)	98
Tabel 2 1 Definisi Kemiskinan	29
Tabel 2 2 Indikator Kemiskinan.....	35
Tabel 2 3 Indikator Kemiskinan versi UNDP	3737
Tabel 2 4 Penelitian Terdahulu	83
Tabel 2 5 Hipotesis Penelitian Lengkap.....	93
Tabel 3 1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	101
Tabel 3 2 Rangkuman Pilihan Model Uji Statistik	10909
Tabel 4 1 Rincian Unit Analisis, Observasi, dan Variabel Penelitian	115
Tabel 4 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Wilayah Perkotaan	11818
Tabel 4 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Wilayah Pedesaan.....	11818
Tabel 4 4 Uji Chow Data Panel Kota.....	12020
Tabel 4 5 Uji Chow Data Panel Desa.....	12121
Tabel 4 6 Uji Hausman Data Panel Kota	1222
Tabel 4 7 Uji Hausman Data Panel Desa	1233
Tabel 4 8 Uji Lagrange Multiplier Data Panel Kota	1244
Tabel 4 9 Uji Lagrange Multiplier Data Panel Desa.....	126
Tabel 4 10 Ringkasan Uji Pemilihan Model Data Panel.....	12928
Tabel 4 11 Uji Multikolineritas Data Panel Kota.....	1330
Tabel 4 12 Uji Multikolineritas Data Panel Desa	13431
Tabel 4 13 Uji Heteroskedastisitas Data Panel Kota	1352
Tabel 4 14 Uji Heteroskedastisitas Data Panel Desa	1363
Tabel 4 15 Uji Autokorelasi Data Panel Kota.....	13835
Tabel 4 16 Uji Autokorelasi Data Panel Desa	13936
Tabel 4 17 Kesimpulan Uji Asumsi Klasik.....	137
Tabel 4 18 Uji t Data Panel Kota	1465
Tabel 4 19 Uji t Data Panel Desa	14847
Tabel 4 20 Komparatif Panel Kota & Panel Desa.....	15049

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Diagram Fish Bone.....	21
Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Tentang Kemiskinan di Perkotaan	89
Gambar 2 2 Kerangka Pemikiran Tentang Kemiskinan di Perdesaan	89
Gambar 4 1 Grafik Statistik Jarque-bera Data Panel Kota	139
Gambar 4 2 Grafik Statistik Jarque-bera Data Panel Desa	14340

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang positif dalam dua dekade terakhir, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per September 2024, tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 8,57%, dengan tingkat kemiskinan di pedesaan (11,34%) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (6,66%). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan masih menyisakan kelompok masyarakat yang belum tersentuh secara optimal oleh kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi (BPS, 2025)

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk **Indonesia**. Tingginya angka kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu dan rumah tangga, tetapi juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020). Permasalahan kemiskinan di Indonesia bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan geografis, termasuk perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah (Azzola 2021).

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan struktural yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya angka kemiskinan tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu dan rumah tangga, tetapi juga menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Di Indonesia, kemiskinan memiliki karakteristik spasial yang khas, di mana tingkat dan pola kemiskinan di wilayah pedesaan cenderung berbeda dengan di wilayah perkotaan. Perbedaan ini menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual dan spesifik wilayah dalam upaya pengentasannya (Badan Pusat Statistik, 2023)

Variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan fiskal, memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Ketidakstabilan ekonomi, khususnya yang dipicu oleh inflasi dan tingginya tingkat pengangguran, cenderung memperburuk kondisi kemiskinan akibat menurunnya daya beli masyarakat serta meningkatnya beban hidup, terutama bagi kelompok rentan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan bersifat inklusif berpotensi menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendorong penurunan angka kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), setidaknya masih ada 10 provinsi yang masuk daftar karena tingkat kemiskinan wilayah tersebut masih di atas 10%. Berikut Gambar 1.1 yang mengidentifikasi 10 Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Terbesar (BPS, 2023):

Tabel 1.1 Provinsi Dengan Persentase Penduduk Miskin Terbesar (2023)

No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Papua	26,03
2	Papua Pegunungan	23,21
3	Papua Tengah	22,45
4	Papua Selatan	21,38
5	Nusa Tenggara Timur	19,96
6	Maluku	17,69
7	Gorontalo	15,71
8	Aceh	14,45
9	Sulawesi Tengah	13,78
10	Nusa Tenggara Barat	13,50

Sumber: BPS (2023)

Provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, dan NTT, mendominasi daftar provinsi termiskin dengan persentase kemiskinan tertinggi. Sementara itu, sebagian besar provinsi di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY memiliki jumlah penduduk miskin besar secara absolut, namun dalam persentase relatif mereka tidak masuk dalam top 10. Data ini mempertegas pentingnya analisis spasial dalam mengidentifikasi determinan kemiskinan serta merancang intervensi kebijakan yang sesuai baik di wilayah barat maupun timur Indonesia.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,36%, dengan kemiskinan di perdesaan (12,22%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (7,29%). Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah Papua dengan 26,03%, disebabkan tingginya angka kemiskinan di perdesaan (34,49%). Di sisi lain, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan 4,52%.

Beberapa provinsi menunjukkan perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Misalnya, Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat kemiskinan 23,76% di perdesaan, jauh lebih tinggi dibandingkan 9,12% di perkotaan. Situasi serupa juga terjadi di Gorontalo dan Maluku yang menunjukkan kesenjangan kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan. Provinsi DKI Jakarta, yang hanya memiliki daerah perkotaan, mencatat angka kemiskinan sebesar 4,44%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Beberapa provinsi seperti Bali dan Kalimantan Selatan juga menunjukkan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 1 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

38 Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P_0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
	2023	2023	2023
	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)
Aceh	9.79	16.92	14.45
Sumatera Utara	8.23	8.03	8.15
Sumatera Barat	4.67	7.23	5.95
Riau	6.73	6.65	6.68
Jambi	10.19	6.28	7.58
Sumatera Selatan	11.07	12.21	11.78
Bengkulu	14.21	13.96	14.04
Lampung	8.02	12.65	11.11
Kep. Bangka Belitung	3.54	5.85	4.52
Kep. Riau	5.05	10.69	5.69
Dki Jakarta	4.44	-	4.44
Jawa Barat	7.19	9.3	7.62
Jawa Tengah	9.78	11.87	10.77
Di Yogyakarta	10.27	13.36	11.04
Jawa Timur	7.5	13.98	10.35
Banten	6	6.79	6.17
Bali	3.77	5.5	4.25
Nusa Tenggara Barat	13.76	13.95	13.85
Nusa Tenggara Timur	9.12	23.76	19.96
Kalimantan Barat	4.44	8.07	6.71
Kalimantan Tengah	4.78	5.35	5.11
Kalimantan Selatan	3.84	4.72	4.29
Kalimantan Timur	4.68	9.28	6.11
Kalimantan Utara	5.18	8.74	6.45
Sulawesi Utara	4.91	10.38	7.38
Sulawesi Tengah	8.9	14.09	12.41
Sulawesi Selatan	5.01	11.91	8.7
Sulawesi Tenggara	7.4	13.94	11.43
Gorontalo	4.47	23.73	15.15
Sulawesi Barat	9.08	12.1	11.49

38 Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P_0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
	2023	2023	2023
	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)
Maluku	5.49	24.64	16.42
Maluku Utara	6.23	6.55	6.46
Papua Barat	8.23	29.2	20.49
Papua Barat Daya	-	-	-
Papua	5.68	34.49	26.03
Papua Selatan	-	-	21,38
Papua Tengah	-	-	22,45
Papua Pegunungan	-	-	23,21
Indonesia	7.29	12.22	9.36

Sumber: Data BPS (2023).

Dari data ini menunjukkan bahwa kemiskinan lebih parah di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan di hampir seluruh provinsi, mencerminkan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih kuat di daerah pedesaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain faktor ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dalam hal ini bantuan sosial dan kebijakan redistribusi pendapatan dari pemerintah, memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Program-program seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan, meskipun efektivitasnya masih terbatas pada wilayah perkotaan dengan infrastruktur yang lebih baik (World Bank, 2019). Tantangan terbesar dalam kebijakan bantuan sosial di Indonesia adalah kesenjangan distribusi dan dampak yang kurang merata di daerah pedesaan.

Di sisi lain, zakat yang merupakan instrumen keuangan sosial Islam juga memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan, khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Penelitian di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dikelola secara profesional oleh lembaga seperti BAZNAS berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, terutama ketika diiringi dengan program pendampingan spiritual dan pelatihan ekonomi (Qurroh Ayuniyyah, 2018). Selain itu, Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) terbukti mampu menurunkan rasio kemiskinan secara statistik, meskipun tidak selalu efektif dalam mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan (Choiriyah et al., 2020).

Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat religius dan lingkungan pendidikan Islam yang kuat tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Beberapa provinsi yang dikenal memiliki basis masyarakat santri dan jaringan pesantren yang besar, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, terutama pada wilayah perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar meskipun dikenal sebagai daerah dengan kultur religius yang kuat dan aktivitas pendidikan Islam yang berkembang pesat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya aktivitas keagamaan belum secara otomatis mampu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat apabila tidak diiringi dengan penguatan ekonomi produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa potensi zakat di daerah-daerah berbasis pesantren sebenarnya sangat besar, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya terkelola secara optimal dan produktif. Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, zakat masyarakat masih lebih dominan disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif jangka pendek dibandingkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Padahal, laporan BAZNAS Outlook Zakat Indonesia menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas pesantren. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga amil zakat, pesantren, dan masyarakat agar zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen karitatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, pendekatan integratif yang menggabungkan distribusi ZIS-DSKL (Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya), lembaga keuangan mikro syariah, dan bantuan sosial pemerintah terbukti memberikan efek kolektif yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di tingkat provinsi. Namun, secara individu, tidak semua variabel tersebut menunjukkan dampak signifikan jika berdiri sendiri (Sari et al., 2024,). Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan makro dan

mikro yang tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperkuat peran zakat dan bantuan sosial sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan secara berkeadilan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia melibatkan berbagai faktor, termasuk variabel ekonomi makro, kebijakan bantuan sosial, serta infrastruktur dan alokasi anggaran publik. Dalam konteks ini, infrastruktur, terutama panjang jalan aspal di perkotaan, memiliki peranan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jalan yang baik mendukung mobilitas masyarakat, mempermudah akses ke tempat kerja, sekolah, layanan kesehatan, dan pusat ekonomi lainnya. Ketersediaan jaringan transportasi yang memadai di perkotaan sering kali berkorelasi dengan kesempatan ekonomi yang lebih baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan jalan aspal yang luas di perkotaan berpotensi meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1 3 Data Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)

Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)		
	2020	2021	2022
Aspal	319.787	366.301	329.189
Bukan Aspal	228.579	179.815	218.908
Jumlah	548.366	546.116	548.097

Sumber: Data BPS 2023

Data ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur jalan non-aspal. Secara keseluruhan, jumlah total panjang jalan dari seluruh jenis permukaan relatif stabil, dengan angka 548.366 km pada tahun 2020, sedikit menurun menjadi 546.116 km pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 548.097 km pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan pada

panjang jalan berdasarkan jenis permukaan, total panjang jalan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, data ini menandakan pentingnya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Sementara itu, di wilayah pedesaan, Dana Desa yang diluncurkan oleh pemerintah sejak 2015 telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa, terutama dalam mengurangi kemiskinan.

Dana Desa berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi pertanian, menciptakan lapangan kerja di sektor informal, dan memperbaiki akses pasar bagi produk desa. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat desa. Namun, tantangan utama dalam implementasi Dana Desa adalah pengawasan dan pengelolaan dana yang kurang optimal di beberapa daerah, yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam mencapai target penurunan kemiskinan.

Perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa fokus utama pengentasan kemiskinan di perkotaan lebih pada peningkatan infrastruktur transportasi, seperti jalan aspal, yang berdampak langsung terhadap aksesibilitas dan peluang ekonomi. Sebaliknya, di pedesaan, pembangunan melalui Dana Desa lebih diarahkan pada infrastruktur dasar yang mendukung sektor pertanian dan pelayanan publik. Meskipun kedua pendekatan ini penting untuk disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan penduduk, diperlukan sinergi kebijakan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan.

Dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih menyeluruh dan efektif, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif serta memperbaiki kondisi hidup masyarakat miskin di Indonesia.

Penggabungan berbagai faktor tersebut, penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro, bantuan sosial, dan zakat terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi berbagai variabel dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, terutama dalam konteks kebijakan pembangunan dan ekonomi Islam.

Penelitian ini mengisi celah literatur yang signifikan dan memberikan kebaruan dalam kajian pengentasan kemiskinan. Salah satu celah yang ditangani adalah kurangnya analisis perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam penelitian sebelumnya. Baihaqi dan Puspitasari (2020) hanya fokus pada kemiskinan di Aceh tanpa pendekatan komparatif antarwilayah, sementara Purnomo (2018) membahas zakat tanpa mengaitkannya dengan bantuan sosial maupun variabel makro ekonomi. Penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis perbedaan pengaruh variabel-variabel tersebut di dua konteks wilayah yang berbeda, memberikan perspektif yang lebih mendalam. Selain itu, interaksi antara zakat dan bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan juga belum banyak dieksplorasi. Hasan dan Ali (2020) dalam studinya menunjukkan bahwa zakat secara signifikan mampu mengurangi kemiskinan multidimensi di Pakistan,

namun penelitian tersebut belum mengaitkan zakat dengan bantuan sosial.

Di sisi lain, Mawardi, Widiastuti, dan Al Mustofa (2019) menemukan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan penerima zakat, tetapi variabel makro ekonomi sebagai pendukung pengentasan kemiskinan belum dianalisis secara terintegrasi. Penelitian ini melengkapi literatur dengan memasukkan interaksi antara zakat dan bantuan sosial, serta menghubungkannya dengan variabel makro ekonomi.

Berdasarkan perspektif variabel makro ekonomi, penelitian terdahulu sering kali hanya membahas pengaruh PDB, inflasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan secara parsial. Sebagai contoh, Nurul Muflaha (2018) meneliti belanja sosial tanpa mempertimbangkan peran zakat sebagai instrumen redistribusi. Dalam konteks ini, penelitian oleh Kasri (2018) menjadi relevan karena menunjukkan bukti empiris dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, tetapi kajian ini masih kurang memperhatikan hubungan simultan dengan variabel ekonomi makro. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan ketiga variabel tersebut ke dalam satu model analisis, memberikan wawasan tentang mekanisme interaksi antara bantuan sosial, zakat, dan faktor makro ekonomi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini juga memberikan kebaruan dibandingkan studi sebelumnya yang lebih sederhana. Nafi'ah (2021) menggunakan pendekatan deskriptif tanpa memperhitungkan interaksi kompleks antarvariabel. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan model analisis yang lebih canggih untuk mengeksplorasi hubungan simultan antara variabel-variabel yang

memengaruhi kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai dinamika pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menyumbangkan analisis komprehensif mengenai pengaruh variabel makro ekonomi, bantuan sosial, dan zakat terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Studi ini juga menawarkan dimensi perbandingan yang jarang dijumpai dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel terpisah untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap dinamika yang berbeda antara kedua wilayah tersebut, mengingat karakteristik sosial-ekonomi, struktur lapangan kerja, tingkat pembangunan infrastruktur, serta penyebab kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Wilayah perkotaan umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, sektor industri dan jasa, serta tingginya biaya hidup, sedangkan wilayah pedesaan lebih dipengaruhi oleh sektor pertanian, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan dua model analisis yang terpisah dinilai lebih mampu menangkap variasi karakteristik dan determinan kemiskinan pada masing-masing wilayah secara lebih spesifik dan akurat.

Penggunaan pendekatan model terpisah juga memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan secara lebih mendalam sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, hasil estimasi yang diperoleh tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia, tetapi juga

mampu menjelaskan perbedaan pola hubungan antarvariabel di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik pembangunan pada masing-masing wilayah.

Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data antarwilayah dan data tahunan selama periode 2013–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan dan konsistensi data, serta untuk menggambarkan dinamika perkembangan kemiskinan dan variabel-variabel yang memengaruhinya dalam jangka menengah hingga panjang. Rentang waktu 2013–2024 juga dinilai mampu merepresentasikan berbagai perubahan kondisi ekonomi nasional, termasuk dinamika pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, bantuan sosial, pengelolaan zakat, pembangunan infrastruktur, serta implementasi kebijakan Dana Desa yang mulai berjalan secara intensif sejak tahun 2015. Dengan cakupan waktu tersebut, model penelitian diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif dan representatif dalam menjelaskan fenomena kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan?

Fokus pada indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran yang secara teoritis dan empiris terbukti memiliki hubungan erat dengan kemiskinan.

Ketiga indikator ini mencerminkan stabilitas ekonomi nasional dan daya serap pasar kerja terhadap masyarakat miskin.

- b. Bagaimana efektivitas program bantuan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan?

Menganalisis dampak program seperti PKH, BLT, atau bantuan pangan non-tunai terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin, serta perbedaan dampaknya di wilayah urban dan rural.

- c. Bagaimana peran zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan dan masyarakat Muslim perkotaan?

Menilai kontribusi zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam terhadap pengurangan kemiskinan, baik secara langsung (penyaluran konsumtif) maupun tidak langsung (program pemberdayaan ekonomi mustahik).

- d. Apakah pembangunan infrastruktur jalan (panjang jalan aspal) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di pedesaan?

Mengkaji hubungan antara aksesibilitas wilayah melalui pembangunan jalan beraspal dengan peluang ekonomi, efisiensi distribusi, dan konektivitas terhadap pasar dan layanan sosial.

- e. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan di Indonesia?

Menganalisis bagaimana dana desa digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

- f. Apakah terdapat perbedaan pengaruh seluruh variabel (makro ekonomi,

bantuan sosial, zakat, infrastruktur jalan, dan Dana Desa) terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan?

Membedah konteks struktural dan geografis dari kemiskinan, serta bagaimana setiap variabel berkontribusi secara berbeda terhadap kemiskinan di dua wilayah tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (inflasi) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (pengangguran) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia?
4. Bagaimana peran bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia?
5. Bagaimana kontribusi zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh panjang jalan aspal di wilayah perkotaan terhadap

aksesibilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia?

8. Bagaimana Dana Desa berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang studi ini dan permasalahan yang diajukan oleh penulis maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia
2. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (inflasi) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia
3. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (pengangguran) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia
4. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana peran bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia

5. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana kontribusi zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia
6. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana perbedaan pengaruh antara variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia
7. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana pengaruh panjang jalan aspal di wilayah perkotaan terhadap aksesibilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia
8. Untuk Menganalisis dan Mengkaji bagaimana Dana Desa berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan di Indonesia

1.5. Kontribusi Hasil Penelitian

Berdasarkan judul, latar belakang, perumusan masalah dan tujuan dari penelitian, diharapkan penelitian ini mempunyai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuann baik untuk pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi pelaksanaan terhadap keuangan Islam (Praktis)

a. Pengembangan Ilmu Teoritis:

- 1) Disertasi ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas pemahaman mengenai peran komplementer antara faktor makroekonomi, bantuan sosial, dan zakat dalam memengaruhi kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas instrumen ekonomi dan sosial bersifat kontekstual dan

berbeda antarwilayah, sehingga memperkaya literatur tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah serta integrasi instrumen ekonomi dan sosial dalam kerangka pembangunan inklusif.

- 2) Menambah pemahaman tentang peran zakat dalam konteks ekonomi modern dan pengentasan kemiskinan, yang dapat memperkaya literatur ekonomi Islam dan teori pembangunan ekonomi.
- 3) Memberikan kontribusi akademik terkait peran Ekonomi makro, IPM, bantuan sosial dan zakat dan dalam mengurangi kemiskinan di wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda (kota vs. desa).

b. Pengembangan Metodologi:

- 1) Menyediakan panduan tentang penggunaan analisis regresi data panel dalam penelitian ekonomi terapan, khususnya dalam konteks studi lintas provinsi di negara berkembang.
- 2) Memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan melakukan analisis empiris yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks.

c. Implikasi Kebijakan:

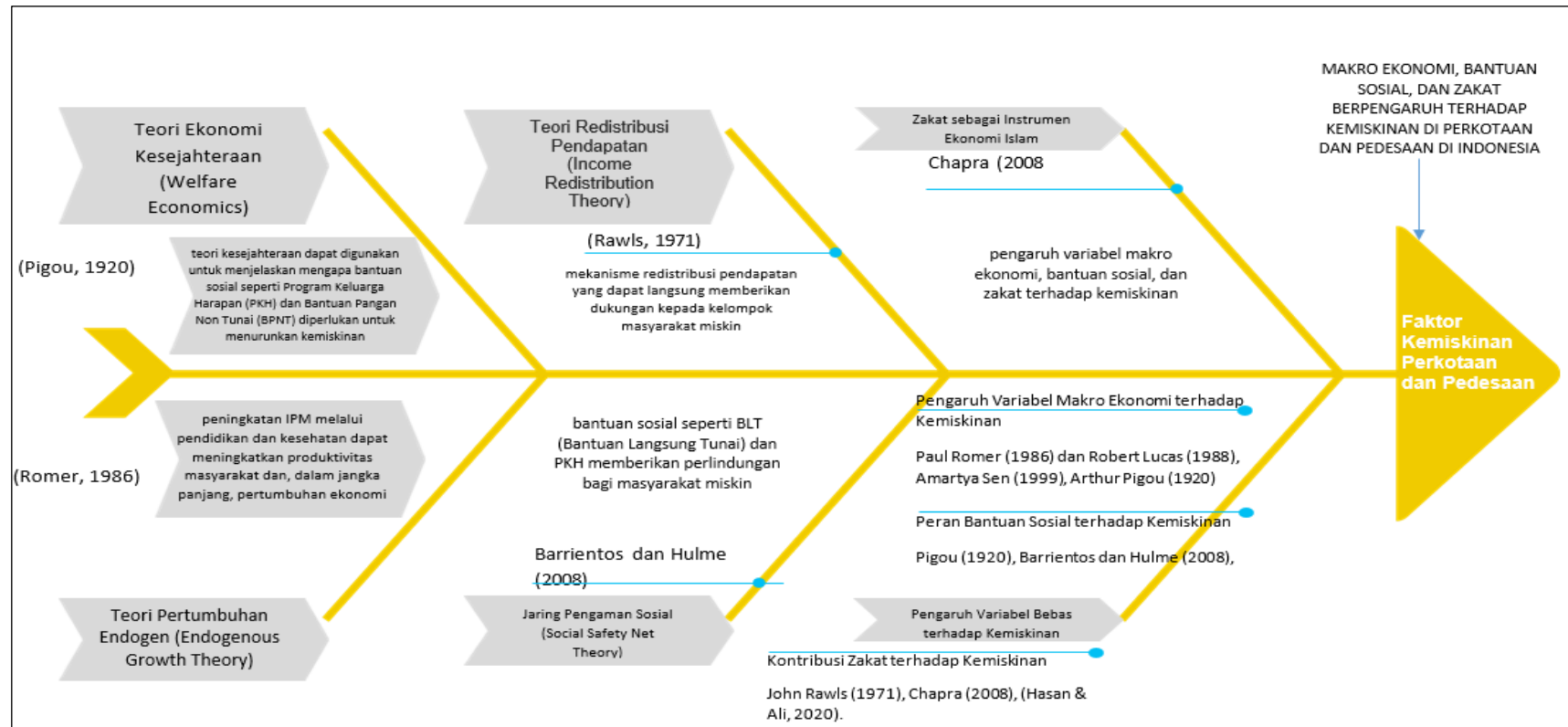
- 1) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan ekonomi makro yang efektif
- 2) Memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, termasuk pengoptimalan penggunaan zakat dalam program-program tersebut.

- 3) Menginformasikan diskusi kebijakan tentang pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan
- 4) Menjadi referensi bagi lembaga filantropi dan pengelola zakat dalam menyalurkan dana zakat yang lebih tepat sasaran
- 5) Memotivasi penelitian lebih lanjut dan eksperimen kebijakan untuk menguji efektivitas berbagai pendekatan dalam menggunakan zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan.

1.6. Kebaruan Penelitian

Untuk menemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini maka dilakukan terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan research gap.. Research gap penelitian ini dilakukan dengan cara mencari jurnal yang relevan. Temuan dan research gap pada penelitian sebelumnya digambarkan dengan diagram Fishbone.

Gambar 1 1 Diagram Fish Bone



Berdasarkan Gambar 1.1. diatas dapat disimpulkan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan pendekatan multidimensional yang melibatkan variabel ekonomi, sosial.

Diagram fishbone yang dibuat menunjukkan enam elemen utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu variabel penelitian, metode penelitian, responden atau partisipan, lingkungan penelitian, teori pendukung, dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, bantuan sosial, dan zakat, dengan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan berbasis teori pembangunan manusia dan teori redistribusi pendapatan digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual dalam memahami kemiskinan sebagai fenomena yang multidimensi.

Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lingkup dan pendekatannya. Penelitian ini tidak hanya membahas kemiskinan secara umum, tetapi secara khusus membandingkan faktor penyebab kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, yang seringkali memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan teoretis dari ekonomi Islam, seperti peran zakat, yang seringkali terabaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, seperti distribusi zakat, bantuan sosial, dan keterbatasan infrastruktur pedesaan, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi. Teknik sampling yang representatif memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan karakteristik masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat digunakan untuk mendesain program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah, baik melalui kebijakan pemerintah maupun pengelolaan zakat di tingkat masyarakat. Dengan pendekatan yang integratif ini, penelitian diharapkan mampu menjawab gap penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur kemiskinan di Indonesia.

Dengan ditemukan *research gap* pada penelitian sebelumnya maka peneliti menambahkan metode penelitian dan variabel yang akan menjadi kebaruan (novelty) pada penelitian ini :

1. Kombinasi Variabel Makroekonomi dan Sosial

Integrasi Variabel: Penelitian ini dapat memperkenalkan pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan variabel makroekonomi, IPM, bantuan sosial, dan zakat dalam satu model analisis untuk mengukur pengaruh gabungan terhadap kemiskinan. Biasanya, studi-studi sebelumnya mungkin fokus pada satu atau dua aspek, sementara penelitian ini menggabungkan semuanya dalam satu kerangka kerja.

2. Perbandingan Kota dan Desa

Analisis Diferensiasi: Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang perbedaan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan yang efektif di satu wilayah mungkin tidak berlaku di wilayah lain.

3. Efektivitas Zakat dalam Konteks Indonesia

Studi Khusus Zakat: Penelitian ini dapat mengisi celah dengan mengevaluasi efektivitas zakat dalam konteks yang sangat spesifik, seperti dampaknya di berbagai daerah di Indonesia, dan bagaimana distribusi zakat dapat lebih optimal dalam mengatasi kemiskinan.

4. Metodologi dan Data

Penggunaan data menggunakan data terbaru atau data yang belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya, ini akan menambah nilai novelty pada penelitian Anda.

Metode Analisis: Penggunaan teknik analisis yang baru atau lebih canggih, seperti model ekonometrik terbaru, analisis data panel, atau metode kuantitatif yang lebih maju, dapat menambahkan dimensi baru pada penelitian Anda.

7. Kebijakan dan Rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan berbasis data yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan secara lebih efektif di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing daerah.

8. Kontribusi pada Literatur dan Praktik

Kontribusi terhadap Literatur: Penelitian ini dapat memperluas literatur dengan mengisi celah penelitian yang ada, terutama dalam konteks kombinasi variabel makroekonomi, IPM, bantuan sosial, dan zakat.

Praktik dan Implementasi: Penelitian ini menyediakan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga bantuan sosial, dan organisasi zakat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan usulan disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan menjelaskan tentang: latar belakang permasalahan, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kebaruan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori pemikiran dan hipotesa.

BAB III : Metodologi penelitian terdiri dari: desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, metode analisa data, definisi operasional variabel, ukuran variabel dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil dan analisa penelitian terdiri dari hasil analisa dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum data penelitian dan hasil analisis data variabel penelitian.

BAB V : Kesimpulan, implikasi dan saran, terdiri dari: kesimpulan, implikasi teoritik dan manajerial, dan rekomendasi penelitian selanjutnya. Daftar Pustaka: Memuat seluruh sumber referensi yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Variabel Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu multidimensional yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Menurut Bank Dunia, kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2022). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang mencakup komponen makanan dan non-makanan (BPS, 2023).

Kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi ketika pendapatan individu berada di bawah batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif mencerminkan ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat, yaitu ketika seseorang dianggap miskin dibandingkan dengan standar hidup mayoritas penduduk di sekitarnya (Sen, 1999).

Studi klasik dari Amartya Sen (1999) menyatakan bahwa kemiskinan juga merupakan kekurangan kemampuan (*capability deprivation*), yaitu ketika seseorang tidak memiliki kemampuan dasar untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat, seperti memperoleh pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Pandangan ini memperluas pemahaman kemiskinan dari sekadar masalah kekurangan pendapatan menjadi masalah struktural yang lebih luas. Kemiskinan di Indonesia menunjukkan karakteristik yang kompleks. Wilayah pedesaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik (Suryahadi et al., 2021). Berdasarkan data BPS, pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36 persen, dengan proporsi lebih besar berada di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan (BPS, 2023).

Secara empiris, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi, sosial, dan institusional. Penelitian oleh Ravallion (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan, namun dampaknya bergantung pada distribusi hasil pertumbuhan tersebut. Sementara itu, variabel seperti inflasi, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan memperburuk kondisi rumah tangga miskin (Warr, 2016).

Dalam konteks kebijakan, program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dijalankan melalui berbagai pendekatan, mulai dari bantuan sosial (PKH, BLT), pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, hingga penguatan kelembagaan

desa melalui Dana Desa. Selain itu, zakat sebagai instrumen ekonomi Islam juga semakin diakui kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat Muslim (Ascarya & Yumanita, 2020).\

Dengan kompleksitas faktor penyebab dan dampaknya, kemiskinan perlu ditangani secara multidimensional dan lintas sektor. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel seperti indikator makro ekonomi, bantuan sosial, zakat, infrastruktur, dan Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

2.1.1.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu paling mendasar dan kompleks dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena kemiskinan tidak hanya merefleksikan keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak. Oleh karena itu, konsep kemiskinan mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dari sekadar ukuran pendapatan menuju pemahaman yang lebih luas dan multidimensional yang mencakup deprivasi dalam berbagai aspek kehidupan (Sen, 1999; Todaro & Smith, 2020).

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. (Ravallion, 2016).

Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya sekadar masalah kurangnya pendapatan, melainkan juga berkaitan erat dengan dimensi ketimpangan, eksklusifitas sosial, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita rumah tangga. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum konsumsi makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari serta pengeluaran non-makanan untuk kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2025). Pendekatan ini dikenal dengan metode Cost of Basic Needs (CBN) yang menjadi standar pengukuran kemiskinan nasional dan memperhitungkan perbedaan biaya hidup antarwilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Sementara itu, Bank Dunia (World Bank) menggunakan pendekatan berbasis garis kemiskinan internasional dengan standar paritas daya beli (PPP). Pada pembaruan terakhir tahun 2025, Bank Dunia menetapkan beberapa garis kemiskinan, antara lain: garis kemiskinan ekstrem sebesar US\$3,00 per hari, garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (LMIC) sebesar US\$4,20 per hari, dan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas (UMIC) sebesar US\$8,30 per hari. Penggunaan garis kemiskinan ini bertujuan untuk memungkinkan perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara dengan mempertimbangkan daya beli riil masyarakat (World Bank, 2025).

Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) melihat kemiskinan sebagai kondisi yang mencerminkan ketidakamanan ekonomi dan sosial akibat rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak, upah yang memadai, dan perlindungan sosial. Menurut ILO (2019), kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari aspek pekerjaan dan kualitas tenaga kerja, karena sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pengurangan kemiskinan memerlukan intervensi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja.

Sementara itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme/UNDP*) memperluas konsep kemiskinan menjadi kemiskinan multidimensi, yaitu kondisi di mana individu mengalami deprivasi tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Indeks Kemiskinan Multidimensi (Multidimensional Poverty Index/MPI) yang dikembangkan UNDP mengukur kemiskinan berdasarkan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (UNDP, 2024). Pendekatan ini menekankan bahwa seseorang dapat tergolong miskin meskipun memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, apabila mereka tidak memiliki akses terhadap layanan dasar dan hak sosial ekonomi lainnya.

Selain lembaga-lembaga tersebut, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) serta Bank Pembangunan Asia (ADB) juga memandang kemiskinan sebagai fenomena yang berhubungan erat dengan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan pembangunan pedesaan. ADB (2023) menegaskan bahwa

kemiskinan sering kali bersumber dari keterbatasan akses terhadap aset produktif, pendidikan, dan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pedesaan.

Dengan demikian, pengertian kemiskinan dalam konteks penelitian ini tidak hanya dipahami dari aspek pendapatan atau konsumsi, tetapi juga sebagai fenomena sosial-ekonomi yang multidimensional. Kemiskinan mencakup berbagai bentuk deprivasi yang saling berkaitan, meliputi rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, lemahnya kesempatan kerja yang layak, serta keterisolasian akibat minimnya infrastruktur. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi dasar dalam menganalisis determinan kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirumuskan secara lebih efektif dan kontekstual.

Tabel 2 1 Definisi Kemiskinan

No.	Lembaga/ Sumber	Definisi Kemiskinan	Fokus atau Pendekatan	Sumber
1	Badan Pusat Statistik (BPS) – Indonesia	Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non- makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita. Garis kemiskinan dihitung dengan pendekatan <i>Cost of Basic Needs (CBN)</i> .	Pendekatan moneter berbasis pengeluaran; mencakup kebutuhan dasar konsumsi dan non-konsumsi.	BPS, 2025
2	World Bank	Individu dikategorikan miskin apabila hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional (PPP): US\$3,00/hari (ekstrem), US\$4,20/hari (menengah bawah), dan US\$8,30/hari (menengah atas).	Pendekatan pendapatan absolut berdasarkan daya beli riil (PPP).	World Bank, 2025

No.	Lembaga/ Sumber	Definisi Kemiskinan	Fokus atau Pendekatan	Sumber
3	United Nations Development Programme (UNDP)	Kemiskinan dipahami sebagai deprivasi multidimensi yang mencakup kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Diukur menggunakan <i>Multidimensional Poverty Index (MPI)</i> .	Pendekatan multidimensi (pendidikan, kesehatan, standar hidup).	UNDP, 2024
4	International Labour Organization (ILO)	Kemiskinan mencerminkan ketidakamanan ekonomi dan sosial akibat rendahnya akses terhadap pekerjaan layak, upah yang memadai, dan perlindungan sosial.	Pendekatan ketenagakerjaan dan sosial (decent work & social protection).	ILO, 2019
5	Asian Development Bank (ADB)	Kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap aset produktif, pendidikan, dan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pedesaan.	Pendekatan struktural dan pembangunan (rural development & asset-based).	ADB, 2023
6	Amartya Sen (1999)	Kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan (<i>capability deprivation</i>) untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan memiliki kebebasan memilih.	Pendekatan kapabilitas (human freedom & choice).	Sen (1999)
7	Todaro & Smith (2020)	Kemiskinan mencerminkan kondisi ketertinggalan ekonomi dan sosial yang diukur dari rendahnya pendapatan, produktivitas, serta akses terhadap layanan publik.	Pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial.	Todaro & Smith (2020)
8	Food and Agriculture Organization (FAO)	Kemiskinan sering berkaitan dengan ketidakamanan pangan dan rendahnya produktivitas pertanian, terutama di pedesaan.	Pendekatan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.	FAO, 2023

2.1.1.2. Penyebab Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan

Penyebab kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan beberapa faktor, yang meliputi struktur ekonomi, akses terhadap sumber daya, infrastruktur, serta karakteristik sosial-demografi. Perbedaan ini penting karena keduanya memiliki konteks yang berbeda dalam hal pembangunan, distribusi sumber daya, dan peluang ekonomi, sehingga solusi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dirancang secara terpisah. (Todaro 2015).

1. Struktur Ekonomi

a. Perkotaan

Di wilayah perkotaan, struktur ekonomi lebih berorientasi pada sektor jasa dan industri. Oleh karena itu, kemiskinan di perkotaan sering kali terkait dengan ketidakmampuan penduduk mengakses pekerjaan formal atau keterampilan yang diperlukan di sektor-sektor tersebut.

Pengangguran Struktural: Di kota-kota besar, pertumbuhan populasi yang cepat tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, terutama pekerjaan formal di sektor industri atau jasa. Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja di perkotaan.

Urbanisasi Berlebih: Urbanisasi yang cepat tanpa diikuti oleh peningkatan fasilitas sosial dan infrastruktur juga menyebabkan kemiskinan di kota. Banyak penduduk urban yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan kondisi kerja yang tidak stabil. (Todaro 2015).

b. Pedesaan

Di pedesaan, struktur ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian, dan kemiskinan di pedesaan sering kali dikaitkan dengan ketergantungan pada sektor ini, yang rentan terhadap fluktuasi hasil pertanian, perubahan cuaca, dan harga komoditas. Ketergantungan pada Pertanian: Masyarakat pedesaan umumnya bergantung pada pertanian, dan fluktuasi hasil panen akibat cuaca atau perubahan harga komoditas pertanian dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan.

Kurangnya Diversifikasi Ekonomi: Ketidakmampuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan di luar sektor pertanian memperburuk kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap pasar, teknologi, dan modal menghambat pengembangan usaha non- pertanian di pedesaan.(Ellis, 2000).

2. Akses Terhadap Infrastruktur dan Layanan Dasar

a. Perkotaan

Meskipun kota memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan pedesaan, masalah kemiskinan masih terjadi akibat ketidakmerataan akses terhadap perumahan layak, air bersih, dan layanan kesehatan.

Kemiskinan dalam Permukiman Kumuh: Di banyak kota besar, terutama di negara berkembang, banyak penduduk miskin tinggal di permukiman kumuh dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Kemiskinan jenis ini sering disebut sebagai kemiskinan infrastruktur. (Davis, 2006)

b. Pedesaan

Di pedesaan, kemiskinan lebih banyak disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Hal ini memperburuk akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan kesempatan kerja. Isolasi Geografis: Banyak wilayah pedesaan yang secara geografis terisolasi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjual hasil pertanian mereka ke pasar atau mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Akses Terbatas ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Kurangnya fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas tinggi di pedesaan memperburuk kualitas hidup masyarakat dan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah ini. (Jalin, 2023).

3. Akses Terhadap Modal dan Teknologi

a. Perkotaan

Di wilayah perkotaan, masyarakat yang miskin sering kali memiliki akses terbatas terhadap modal dan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern. Hal ini memperparah ketimpangan pendapatan

Eksklusi Finansial: Penduduk miskin di perkotaan sering kali tidak memiliki akses ke kredit, modal usaha, atau layanan perbankan, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan. (Allen, 2016)

b. Pedesaan

Masyarakat pedesaan juga memiliki akses terbatas terhadap modal dan teknologi, terutama yang terkait dengan pertanian modern. Kurangnya akses ke inovasi dan teknologi modern menyebabkan produktivitas pertanian rendah dan pendapatan yang stagnan.

Teknologi Pertanian yang Terbatas: Banyak petani di pedesaan tidak memiliki akses ke teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian, seperti irigasi modern, pupuk berkualitas, atau alat-alat pertanian mekanis.

4. Karakteristik Sosial-Demografi

a. Perkotaan

Perbedaan demografi di kota seperti tingginya angka urbanisasi dan keberagaman etnis dapat menciptakan dinamika kemiskinan yang berbeda. Konflik sosial, ketidakmerataan pendidikan, dan migrasi dari desa ke kota tanpa keterampilan yang memadai menjadi penyebab kemiskinan di perkotaan.

b. Pedesaan

Di pedesaan, kemiskinan sering terkait dengan angka kelahiran yang tinggi, beban keluarga yang besar, serta pendidikan yang rendah. (Schultz, 1997)

2.1.1.3. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan individu atau kelompok dalam masyarakat dan untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori miskin.

Karena kemiskinan adalah fenomena multidimensional, indikator yang digunakan untuk mengukurnya juga mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari pendapatan hingga akses terhadap layanan dasar. Dalam mengukur kemiskinan ada beberapa Indikator yang bisa digunakan :

Tabel 2 2 Indikator Kemiskinan

No	Dimensi	Indikator	Ukuran
1	Kemiskinan Berbasis Pendapatan (Monetary Poverty Indicators)	Garis Kemiskinan (Poverty Line) (World Bank, 2020)	Standar untuk mengidentifikasi populasi miskin berdasarkan pendapatan atau konsumsi mereka
		Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index) (Foster, 1984)	Mengukur seberapa jauh rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan
		Koefisien Gini (De Maio, 2007)	Tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat
2	Multidimensional (Multidimensional Poverty Indicators)	Indeks Kemiskinan Multidimensional (MPI) (UNDP, 2019)	MPI mengukur kemiskinan berdasarkan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
		Tingkat Buta Huruf dan Pendidikan (UNESCO 2019)	Tingkat literasi atau buta huruf
3	Akses Layanan Dasar (Basic Service Access Indicators)	Akses ke Air Bersih dan Sanitasi (WHO, 2021)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak
		Akses terhadap Layanan Kesehatan (WHO, 2021)	Akses ke layanan kesehatan
		Kondisi Perumahan (UN Habitat 2020)	Tingkat Kualitas tempat tinggal
4	Indikator Non-monetary (Non-monetary Indicators)	Tingkat Pengangguran (ILO, 2021)	Pengangguran yang tinggi di suatu negara atau wilayah
		Akses terhadap Infrastruktur dan Transportasi	Akses yang terbatas ke infrastruktur dasar seperti jalan yang baik,

No	Dimensi	Indikator	Ukuran
		(United Nations.2019)	transportasi umum, dan komunikasi
5	Indikator Sosial (Social Indicators)	Ketidakadilan Gender (UN Women. 2020)	Ketidaksetaraan gender adalah faktor penting dalam kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang
		Kerentanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IPCC 2021)	Penduduk miskin sering kali tinggal di daerah yang lebih rentan terhadap bencana alam, perubahan iklim, atau kerusakan lingkungan

Indikator kemiskinan terdiri dari berbagai aspek yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dapat diukur melalui pendapatan, tetapi juga melalui kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, dan ketidakadilan sosial. Pendekatan multidimensional, seperti yang diterapkan dalam Multidimensional Poverty Index (MPI).

Konsep Multidimensional Poverty Index (MPI) memandang kemiskinan bukan hanya dalam satuan moneter, tetapi berupaya untuk memahami aspek-aspek terkait lainnya. MPI mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum berkembang yang biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses tiga dimensi penting kehidupan – kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, yang diuraikan menjadi sepuluh indikator.

Tabel 2 3 Indikator Kemiskinan versi UNDP

Dimensi	Indikator	Ukuran
Health	Nutrisi	Terdapat orang tua berusia di atas 70 tahun atau ada seorang anak dengan kebutuhan nutrisi yang tidak mencukupi.
	Kematian anak	Ada seorang anak yang meninggal dalam periode lima tahun sebelum survei dilakukan.
Education	Masa Studi	Tidak ada anggota keluarga yang berusia di atas 10 tahun yang telah menyelesaikan enam tahun pendidikan dasar.
	Sekolah	Ada seorang anak yang berusia sekolah namun tidak mengikuti sekolah sesuai dengan tingkat setara kelas delapan.
Standar Hidup	Bahan bakar memasak	Rumah tangga masih menggunakan kayu bakar dan/arang.
	Sanitasi	Fasilitas sanitasi rumah tangga belum mengalami peningkatan
	Air minum	Tidak ada akses ke sumber air minum yang aman dan berkualitas (sesuai referensi SDGs), atau jika memiliki akses, rumah tangga harus berjalan setidaknya 30 menit dari tempat tinggal.
	Listrik	Tidak ada Listrik
	Bangunan rumah	Bahan yang digunakan sebagai atap, dinding, dan lantai di rumah tangga dianggap tidak sesuai.
	Kepemilikan asset	Tidak memiliki lebih dari satu aset seperti radio, televisi, set telepon, komputer, ternak, sepeda, sepeda motor, kulkas, dan mobil.

Sumber: United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report, 2010.

2.1.1.4. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan sering dirujuk dengan istilah *al-faqr*, yang secara konseptual digunakan sebagai istilah umum (*umbrella term*) untuk menggambarkan kondisi kekurangan ekonomi yang dialami individu atau rumah tangga. Istilah *al-faqr* tidak selalu identik dengan kategori *fakir* dalam fikih zakat, melainkan mencakup berbagai tingkat keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam literatur fikih Islam, para ulama membedakan antara *fakir* dan *miskin*. *Fakir* didefinisikan sebagai individu yang hampir tidak memiliki harta maupun penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan *miskin* adalah individu yang memiliki penghasilan atau harta, tetapi jumlahnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak (Qardhawi, 1999; Chapra, 2000).

Oleh karena itu, penggunaan istilah *kemiskinan* (*al-faqr*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi kemiskinan secara umum dalam perspektif Islam, yang di dalamnya mencakup baik kategori *fakir* maupun *miskin*. Pendekatan ini dipilih agar konsep kemiskinan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan selaras dengan kerangka ekonomi Islam, khususnya dalam membahas peran zakat sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan.

Islam mengakui adanya realitas sosial berupa keberadaan orang miskin, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang relevan menyebutkan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dikeluarkan melalui instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di antara instrumen tersebut, zakat merupakan kewajiban utama yang diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menyebut

delapan golongan penerima zakat, termasuk fakir dan miskin. Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian oleh Ascarya dan Yumanita (2020) menemukan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi dapat secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama ketika disalurkan dalam bentuk program produktif.

Secara terminologis, zakat merupakan kewajiban harta yang telah ditetapkan secara permanen dalam syariat Islam. Ulama fikih klasik mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan oleh syariat. Al-Nawawi mendefinisikan zakat sebagai “*haqqun wajibun fi mālin makḥṣūṣ li ṭā’ifatin makḥṣūṣah fi waqtin makḥṣūṣ*” (hak wajib pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, pada waktu tertentu) (Al-Nawawi, 2005).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki sifat normatif dan tetap (*tsawābit*), sehingga maknanya tidak berubah oleh ruang dan waktu, meskipun mekanisme pengelolaannya dapat mengalami penyesuaian sesuai konteks sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam (Al-Qardhawi, 1999). Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada definisi zakat yang bersumber dari literatur fikih klasik sebagai landasan normatif, dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi sebagai penguat analisis dalam konteks kebijakan ekonomi modern.

Dalam beberapa bentuk yang lain Islam juga mengenal konsep wakaf sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendanai sektor publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi mikro yang secara tidak langsung memutus mata rantai kemiskinan struktural. Abdullah (2018) menyatakan bahwa wakaf produktif yang dikelola secara modern berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dan dapat mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Di sisi lain, Islam juga sangat menekankan pentingnya etos kerja dan larangan terhadap ketergantungan. Bekerja dan berusaha dipandang sebagai ibadah, dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bekerja keras agar tidak menjadi beban bagi orang lain (HR. Bukhari).

Pendekatan Islam terhadap kemiskinan dapat dipahami secara komprehensif melalui perbedaan antara mekanisme ekonomi yang bersifat distributif dan yang bersifat eksploitatif. Mekanisme distributif dalam Islam menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi melalui instrumen-instrumen yang berorientasi pada keadilan sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sebaliknya, mekanisme eksploitatif cenderung mendorong konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga berpotensi memperdalam ketimpangan dan kemiskinan struktural

Dalam kerangka tersebut, Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kewajiban distribusi kekayaan kepada kelompok rentan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 38:

فَاتِذَا الْقَرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mengharap keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban normatif yang memiliki implikasi langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Zakat dan instrumen distribusi lainnya berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam sistem ekonomi Islam untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, melainkan juga menjangkau kelompok miskin dan rentan. Dengan demikian, konsep distribusi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.

Sebaliknya, praktik riba dipandang sebagai mekanisme ekonomi yang bersifat eksploitatif, karena berpotensi memperparah ketimpangan melalui akumulasi kekayaan yang tidak seimbang. Riba mendorong transfer kekayaan dari pihak yang lemah kepada pihak yang lebih kuat secara finansial, sehingga memperkuat struktur ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat dalam upaya mencegah kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Larangan riba secara tegas dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 yang menegaskan aspek normatif dan etis dalam sistem ekonomi Islam. Namun demikian, dalam konteks pengentasan kemiskinan, QS. Ar-Rum ayat 38 dapat dipandang sebagai landasan utama yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan kepada kelompok miskin sebagai bagian integral dari tujuan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, integrasi antara larangan terhadap praktik eksploitatif seperti riba dan penguatan mekanisme distributif seperti zakat menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan (Chapra, 2000; Qardhawi, 1999).

Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap kemiskinan bersifat holistik dan solutif. Islam tidak hanya menawarkan bantuan sementara melalui sedekah, tetapi juga menyediakan kerangka ekonomi yang adil dan spiritual yang menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab individu dan kolektif. Kebijakan berbasis syariah, seperti zakat dan wakaf, jika dikelola secara profesional, dapat menjadi pelengkap yang kuat terhadap pendekatan ekonomi konvensional dalam pengentasan kemiskinan di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

2.1.2. Variabel Makro Ekonomi

Dalam kajian pembangunan ekonomi dan kemiskinan, variabel-variabel makroekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan kesejahteraan suatu negara. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi sering kali dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kinerja ekonomi nasional. Namun, di balik indikator makro tersebut,

tersembunyi persoalan mendasar yang terus menjadi tantangan di banyak negara berkembang, yakni kemiskinan. Dinamika makroekonomi memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpendapatan rendah.

Secara teoritis, makroekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, apabila pertumbuhan tersebut bersifat eksklusif dan tidak merata, maka kesenjangan pendapatan justru dapat meningkat, dan kelompok miskin tetap tidak tersentuh oleh manfaat pembangunan. Sebaliknya, tingkat inflasi yang tinggi dan pengangguran yang meluas akan menurunkan daya beli masyarakat serta menghambat akses terhadap kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kestabilan makroekonomi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan, ketika indikator-indikator makroekonomi menunjukkan ketidakstabilan, maka kelompok miskin akan menjadi pihak yang paling terdampak karena keterbatasan dalam mengakses mekanisme perlindungan sosial dan adaptasi ekonomi. Oleh karena itu, memahami pengaruh variabel makroekonomi terhadap kemiskinan menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, tiga indikator utama yang akan dikaji secara lebih

mendalam adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi, yang masing-masing memiliki mekanisme pengaruh tersendiri terhadap dinamika kemiskinan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam pengurangan kemiskinan. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, seperti yang diusulkan oleh Solow (1956), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan per kapita, yang berpotensi mengurangi kemiskinan. Namun, tidak semua pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan, tergantung pada distribusi manfaat pertumbuhan tersebut (Ravallion & Datt, 1996).

Pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Secara umum, perkembangan ekonomi di perkotaan lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan, seiring dengan tingginya arus urbanisasi, industrialisasi, dan akses terhadap infrastruktur yang lebih baik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di pedesaan sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses terhadap teknologi, dan sektor-sektor ekonomi yang lebih tradisional seperti pertanian. Kajian pustaka ini akan mengulas konsep, teori, dan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan pedesaan, serta menyoroti perbedaan di antara keduanya.

1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) (Todaro dan Smith, 2015),

Lucas (1988) menekankan pentingnya akumulasi modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi, baik di perkotaan maupun pedesaan. Daerah perkotaan lebih diuntungkan dengan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang pekerjaan yang lebih besar, sementara pedesaan sering kali tertinggal karena kurangnya akses terhadap sumber daya ini.

2. Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan

a. Urbanisasi dan Industriialisasi

Pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan erat kaitannya dengan urbanisasi dan industrialisasi. Urbanisasi terjadi ketika penduduk pindah dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Henderson (2003) mencatat bahwa proses urbanisasi di banyak negara berkembang telah mempercepat pertumbuhan ekonomi karena konsentrasi tenaga kerja, modal, dan teknologi di perkotaan yang mendorong produktivitas. Di daerah perkotaan, industrialisasi juga memainkan peran penting. Lewis (1954) dalam teori dual economy menunjukkan bahwa industrialisasi menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di perkotaan melalui perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

b. Aglomerasi Ekonomi

Teori aglomerasi ekonomi menjelaskan bagaimana konsentrasi aktivitas ekonomi di perkotaan menciptakan efisiensi yang lebih besar. Menurut Krugman (1991), aglomerasi menciptakan economies of scale yang meningkatkan efisiensi produksi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Aglomerasi ini lebih mungkin terjadi di perkotaan karena adanya infrastruktur yang lebih baik dan akses terhadap pasar yang lebih luas.

c. Infrastruktur dan Teknologi

Pertumbuhan ekonomi perkotaan juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur dan teknologi. Duranton dan Puga (2004) menekankan pentingnya infrastruktur fisik, seperti jalan raya, transportasi publik, dan jaringan komunikasi dalam mendorong efisiensi dan produktivitas ekonomi di perkotaan. Selain itu, akses terhadap teknologi yang lebih maju meningkatkan inovasi dan daya saing di pasar global.

d. Sektor Jasa dan Penciptaan Nilai Tambah

Pertumbuhan ekonomi perkotaan sering kali didorong oleh perkembangan sektor jasa, terutama di negara-negara maju. Sektor jasa, seperti keuangan, teknologi informasi, pendidikan, dan kesehatan, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB perkotaan. Baily dan Montalbano (1998) menunjukkan bahwa sektor jasa berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar karena menciptakan lapangan kerja berpendapatan tinggi dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

3. Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan

a. Ketergantungan pada sektor pertanian

Di daerah pedesaan, pertumbuhan ekonomi sering kali bergantung pada sektor pertanian. Johnston dan Mellor (1961) mengemukakan bahwa pertanian berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi pedesaan, terutama di negara-negara berkembang, melalui produksi pangan dan penyediaan lapangan kerja. Namun, pertumbuhan ekonomi di sektor ini sering kali lambat karena produktivitas yang rendah dan kurangnya investasi dalam teknologi pertanian.

b. Diversifikasi Ekonomi Pedesaan

Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan sering kali tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Fan dan Zhang (2004) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur pedesaan, seperti jalan, irigasi, dan listrik, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di pedesaan. Infrastruktur yang baik membantu meningkatkan akses pasar, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung diversifikasi ekonomi.

c. Akses terhadap teknologi pertanian

Inovasi teknologi di bidang pertanian dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Menurut Hayami dan Ruttan (1985), teknologi pertanian yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja, serta mengurangi ketergantungan pada faktor produksi tradisional. Namun, adopsi teknologi ini sering kali terbatas di pedesaan karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

d. Kewirausahaan di daerah pedesaan

Kewirausahaan di daerah pedesaan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Dabson (2007), promosi kewirausahaan dan usaha kecil di pedesaan dapat meningkatkan diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Namun, pengembangan kewirausahaan di pedesaan sering kali terhambat oleh kurangnya akses terhadap modal, pasar, dan pendidikan kewirausahaan.

4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan

Pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan pedesaan memiliki dinamika yang berbeda. Harris dan Todaro (1970) dalam model migrasi rural-urban menunjukkan bahwa perbedaan kesempatan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan mendorong arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan, yang sering kali menguntungkan ekonomi perkotaan tetapi memperburuk kondisi ekonomi di pedesaan.

Menurut Henderson (2003), pertumbuhan ekonomi perkotaan sering kali lebih cepat karena konsentrasi modal, tenaga kerja, dan teknologi, yang menciptakan skala ekonomi dan inovasi yang lebih cepat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pedesaan sering kali lebih lambat karena ketergantungan pada sektor pertanian yang memiliki produktivitas lebih rendah dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan teknologi.

5. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kebijakan pembangunan yang tepat sangat dibutuhkan. World Bank (2009) merekomendasikan pendekatan *balanced development*, yaitu pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah perkotaan serta pedesaan secara seimbang. Investasi dalam infrastruktur pedesaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta promosi diversifikasi ekonomi menjadi strategi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Dengan begitu bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda namun saling terkait. Pertumbuhan ekonomi di perkotaan sering kali lebih cepat karena konsentrasi modal, tenaga kerja, dan teknologi, sementara di pedesaan pertumbuhannya lebih lambat karena ketergantungan pada sektor pertanian dan keterbatasan infrastruktur. Untuk mencapai pembangunan yang seimbang, diperlukan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan melalui investasi infrastruktur, teknologi, dan diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan.

2.1.2.2. Inflasi

Inflasi adalah salah satu fenomena makroekonomi yang paling penting dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat turun karena harga barang dan jasa naik, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Hubungan antara inflasi dan kemiskinan telah menjadi topik diskusi yang luas di kalangan ekonom,

pembuat kebijakan, dan peneliti karena keduanya sering kali berhubungan erat, terutama di negara-negara berkembang. Inflasi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan melalui mekanisme langsung dan tidak langsung.

1. Konsep Inflasi

Inflasi secara umum diartikan sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Beberapa definisi inflasi yang sering digunakan dalam literatur ekonomi Friedman (1963) menjelaskan bahwa "inflasi selalu dan di mana pun merupakan fenomena moneter," yang berarti bahwa peningkatan jumlah uang beredar di ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan inflasi. Inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia.

Samuelson dan Nordhaus (2009) mendefinisikan inflasi sebagai "kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian." Inflasi menyebabkan penurunan daya beli, yang berarti uang yang sama membeli lebih sedikit barang dan jasa.

Inflasi juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan berkontribusi terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Mankiw (2009) menunjukkan bahwa inflasi tinggi dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan tetap. Studi oleh Eicher dan Garcia (2008) menunjukkan bahwa inflasi dapat memperburuk kemiskinan, terutama jika kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

2. Hubungan antara Inflasi dan Kemiskinan

Hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme:

a. Dampak Langsung Inflasi terhadap Daya Beli

Inflasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama yang berada di kelompok berpendapatan rendah. Ketika harga barang-barang konsumsi meningkat, seperti makanan dan kebutuhan pokok, rumah tangga miskin yang menghabiskan proporsi besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar akan merasakan dampak inflasi yang lebih besar. Easterly dan Fischer (2001) menunjukkan bahwa inflasi secara langsung memperburuk ketidaksetaraan pendapatan dan memperbesar kemiskinan, karena kelompok miskin lebih rentan terhadap kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan dasar lainnya.

b. Erosi Upah Nyata

Inflasi yang lebih tinggi daripada peningkatan upah nominal akan menyebabkan erosi upah riil, yang berarti pendapatan riil pekerja berkurang. Hal ini terutama berdampak pada pekerja berpendapatan rendah yang tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk meminta kenaikan upah yang sesuai dengan inflasi. Blanchard (2017) menjelaskan bahwa inflasi dapat mengurangi kesejahteraan pekerja miskin karena kenaikan harga barang dan jasa tidak selalu diiringi dengan kenaikan upah yang memadai

c. Kemiskinan Struktural dan Inflasi

Inflasi dapat memperburuk kemiskinan struktural, di mana kelompok tertentu dalam masyarakat terus-menerus hidup dalam kemiskinan karena ketidakmampuan mereka untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi. Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan investasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan dan kemiskinan jangka panjang. Ravallion (1998) menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi di negara berkembang sering kali disertai dengan pengurangan investasi publik dalam layanan dasar yang penting bagi kelompok miskin, memperburuk kemiskinan di kalangan masyarakat rentan.

d. Inflasi dan Ketimpangan pendapatan

Inflasi sering kali berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, yang dapat memperburuk kemiskinan relatif. Ketika inflasi terjadi, kelompok kaya yang memiliki aset riil seperti properti atau saham cenderung mendapatkan keuntungan karena nilai aset mereka naik, sementara kelompok miskin yang bergantung pada pendapatan tetap akan kehilangan daya beli. Agenor (2002) menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi sering kali menguntungkan kelompok kaya yang memiliki aset produktif, sementara kelompok miskin yang tidak memiliki aset tersebut lebih rentan terkena dampak negatif inflasi.

e. Inflasi dan Kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang tidak tepat dalam mengendalikan inflasi dapat menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa yang tidak terkendali, yang pada gilirannya akan memperburuk kemiskinan. Di sisi lain, kebijakan moneter yang

ketat untuk menurunkan inflasi juga dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat miskin. Fischer (1993) menjelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali atau hiper-inflasi dapat menghancurkan ekonomi domestik dan menyebabkan lonjakan kemiskinan karena ketidakstabilan ekonomi dan harga yang tidak terkendali.

3. Dampak Inflasi Pada Berbagai Sektor Kemiskinan

a. Pangan dan Gizi

Kelompok miskin sering kali menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan. Inflasi yang meningkatkan harga pangan secara tidak proporsional berdampak lebih besar pada kelompok miskin. Menurut Ivanic dan Martin (2008), kenaikan harga pangan global dapat memaksa jutaan orang ke dalam kemiskinan karena ketergantungan mereka pada pembelian makanan dari pasar.

b. Layanan Kesehatan

Inflasi di sektor kesehatan meningkatkan biaya layanan kesehatan dan obat-obatan. Di negara-negara berkembang, inflasi kesehatan dapat membuat masyarakat miskin tidak mampu mengakses layanan medis dasar, yang memperburuk kesejahteraan mereka.

c. Perumahan

Kenaikan harga properti dan sewa akibat inflasi membuat kelompok miskin semakin sulit mendapatkan akses ke perumahan yang layak. Inflasi perumahan mendorong peningkatan populasi di kawasan kumuh dan memperburuk kemiskinan.(UN Habitat, 2020).

2.1.2.3. Pengangguran

Pengangguran sebagai variabel makroekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran struktural, friksional, dan siklis masing-masing berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan melalui berbagai mekanisme. Dengan demikian, kebijakan yang efektif untuk mengurangi pengangguran, termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta redistribusi melalui zakat produktif, dapat menjadi alat yang kuat dalam mengurangi kemiskinan, baik di kota maupun desa.

Pengangguran adalah salah satu indikator ekonomi makro yang paling kritis dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pengangguran merujuk pada individu yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya. Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sangat erat, di mana peningkatan tingkat pengangguran cenderung meningkatkan kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan bagi individu dan rumah tangga.

Teori Ekonomi Klasik mengasumsikan bahwa pasar tenaga kerja akan selalu menyesuaikan menuju keseimbangan penuh, di mana semua tenaga kerja yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu akan mendapatkan pekerjaan (Say, 1803). Namun, dalam kenyataannya, berbagai faktor seperti kegagalan pasar, teknologi, kebijakan, dan kekuatan struktural dapat menyebabkan pengangguran yang persisten.

Teori Keynesian (Keynes, 1936) berargumen bahwa pengangguran sering kali merupakan akibat dari rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika permintaan untuk barang dan jasa menurun, perusahaan akan mengurangi produksi dan mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan, yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Pengangguran struktural dan siklis menjadi sorotan utama dalam teori ini.

1. Pengangguran Struktural dan Kemiskinan

Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ketika perubahan teknologi, globalisasi, atau pergeseran struktural dalam perekonomian terjadi, banyak pekerja yang menjadi pengangguran karena keterampilan mereka tidak lagi relevan. Ini sangat relevan dalam konteks kemiskinan karena orang yang terjebak dalam pengangguran struktural sering kali memiliki peluang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan baru yang layak.

Penelitian oleh Fields (2004) menunjukkan bahwa pengangguran struktural, terutama di kalangan pekerja muda, dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

2. Pengangguran Friksional dan Siklis

Pengangguran friksional terjadi ketika orang sementara waktu menganggur karena proses pencarian pekerjaan, sedangkan pengangguran siklis disebabkan oleh fluktuasi siklus bisnis. Ketika perekonomian mengalami resesi, pengangguran siklis meningkat secara signifikan, yang kemudian memperburuk kemiskinan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Blanchard dan Summers (1986).

3. Dampak Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota dan Desa

Studi empiris yang dilakukan oleh Ravallion dan Wodon (1999) menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan di daerah pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke pasar tenaga kerja yang lebih dinamis di perkotaan, serta kurangnya infrastruktur dan peluang pendidikan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan, walaupun pengangguran lebih tinggi, akses ke pekerjaan informal bisa sedikit mengurangi dampak langsung terhadap kemiskinan.

2.1.3. Variabel Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan atau miskin. Bantuan sosial secara umum didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan transfer sumber daya kepada kelompok masyarakat yang berhak, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan sosial tidak bersifat kontribusi (non-contributory), artinya penerima tidak harus membayar atau memberikan kontribusi sebelumnya.

Kementerian Sosial Indonesia mendefinisikan bantuan sosial sebagai: Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami situasi tertentu yang berisiko terhadap sosial ekonomi, sebagai bentuk intervensi untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan (Kemensos, 2023).

World bank mendefinisikan bantuan sosial *Non-contributory transfers in cash or in-kind targeted to the poor or vulnerable individuals or households, aimed at reducing poverty and inequality, and providing protection against economic and social risks* (World Bank, 2021).

2.1.3.1. Jenis-Jenis Bantuan Sosial di Indonesia

Di Indonesia, bantuan sosial diberikan melalui berbagai program yang menysasar kelompok masyarakat miskin dan rentan, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program-program utama bantuan sosial di Indonesia meliputi:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) yang ditujukan untuk keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti keharusan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau gizi. Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan dukungan kepada ibu hamil, anak-anak sekolah, dan kelompok rentan lainnya agar mereka dapat mengakses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Menurut TNP2K (2020), PKH telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan jangka panjang. Studi oleh Hastuti (2016) juga menunjukkan bahwa PKH telah berhasil meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, yang merupakan investasi penting untuk masa depan keluarga miskin.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako

BPNT adalah program bantuan sosial berupa bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk non-tunai kepada keluarga miskin. Penerima manfaat mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau toko yang telah ditunjuk. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin memiliki akses ke kebutuhan pangan dasar yang cukup dan bergizi.

Menurut Widjaja (2019), BPNT merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan rentan. BPNT juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan sosial dengan mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap fluktuasi harga pangan yang seringkali menyebabkan kemiskinan menjadi lebih dalam.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah program bantuan tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi terhadap kebijakan pengurangan subsidi atau kebijakan fiskal lainnya yang dapat meningkatkan beban hidup masyarakat miskin, seperti kenaikan harga bahan bakar. Pada awalnya, BLT diberikan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM.

Menurut studi oleh Suryahadi et al. (2010), BLT cukup efektif dalam meningkatkan daya beli sementara masyarakat miskin dan membantu mereka mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan pokok. Namun, efektivitas jangka panjang BLT untuk mengurangi kemiskinan masih diperdebatkan, karena bantuan tunai yang tidak bersyarat cenderung tidak mendorong perubahan perilaku atau investasi dalam kapabilitas jangka panjang.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. BSU memberikan subsidi kepada pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi untuk mengurangi tekanan ekonomi.

Studi oleh Nugroho dan Yuniarti (2020) menunjukkan bahwa BSU telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga selama krisis, meskipun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

2.1.3.2. Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

Bantuan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Secara umum, bantuan sosial bertujuan untuk: Meningkatkan daya beli: Program seperti PKH, BPNT, dan BLT membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Meningkatkan kapabilitas masyarakat: Program bersyarat seperti PKH juga bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas rumah tangga miskin dengan mengharuskan mereka mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi.

Mengurangi kerentanan: Bantuan sosial seperti BLT atau BPNT dapat mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok atau dampak pandemi. Menurut Sumarto et al. (2014), bantuan sosial di Indonesia telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan absolut, meskipun masih ada tantangan dalam hal cakupan dan ketepatan sasaran. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dan tidak ada kebocoran dana.

2.1.3.3. Tantangan dan Kritik terhadap Bantuan Sosial di Indonesia

Meskipun bantuan sosial di Indonesia secara umum efektif dalam mengurangi kemiskinan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Ketepatan Sasaran

Salah satu kritik utama terhadap program bantuan sosial di Indonesia adalah masalah ketepatan sasaran. Menurut World Bank (2012), meskipun Indonesia telah mengembangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data untuk menargetkan penerima bantuan sosial, masih ada kekeliruan dalam penentuan penerima manfaat. Beberapa rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan malah tidak mendapatkannya, sementara ada pula yang tidak memenuhi syarat namun menerima bantuan.

2. Ketergantungan Jangka Panjang

Bantuan sosial yang terus-menerus tanpa diiringi oleh strategi untuk meningkatkan kapabilitas dan kemandirian dapat menyebabkan ketergantungan jangka panjang. Studi oleh Alatas (2016) menunjukkan bahwa penerima bantuan

tunai yang tidak bersyarat seperti BLT cenderung menjadi lebih pasif dan kurang berusaha untuk mencari solusi jangka panjang untuk keluar dari kemiskinan, dibandingkan dengan penerima bantuan bersyarat seperti PKH yang diharuskan memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

2.1.4. Zakat

Zakat adalah alat redistribusi kekayaan dalam Islam yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh Al-Qaradawi (2000) menekankan bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh Aydin (2014) menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada manajemen dan distribusinya.

2.1.4.1. Pengertian Zakat

Secara harfiah, zakat berarti 'pertumbuhan', 'peningkatan', atau 'kemurnian' kekayaan. Ketika konteksnya adalah seorang individu, itu berarti 'untuk memperbaiki' atau 'menjadikan lebih baik'. Oleh karena itu, juga diinterpretasikan sebagai berkah, pertumbuhan, kebersihan, pujian, dan perbaikan (Yusuf, 1999). Semua makna tersebut digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis, meskipun dalam beberapa bagian dari kitab suci itu umumnya disebut sebagai sadaqah (sedekah). Selain itu, kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, dan dalam 27 kesempatan itu terkait dengan doa dalam ayat yang sama. Demikian pula, ada banyak hadis yang terkait dengan kata ini. Dalam hadis Sahih al-Bukhari saja, misalnya, bab tentang zakat berisi 172 hadis yang diatributkan kepada ucapan Nabi. Zakat juga dimasukkan menjadi salah satu dari lima rukun Islam keempat (Yusuf,

1999).

Dari perspektif *fiqh* (hukum Islam), kata zakat secara khusus mengacu pada bagian yang telah ditentukan dari kekayaan yang akan didistribusikan di antara kategori-kategori yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah (Al-Qardawi, 1999). Secara teknis, hal itu dapat diartikan sebagai pemungutan tahunan pada kekayaan di atas ambang batas tertentu (pendapatan) di mana hasilnya didistribusikan kepada yang membutuhkan.

2.1.4.2. Penerima Zakat

Para penerima zakat (mustahik) telah ditetapkan secara tegas dan normatif dalam ajaran Islam. Ketentuan ini bersumber langsung dari Al-Qur'an, yang menyebutkan adanya delapan kelompok penerima zakat yang dikenal sebagai delapan ashnaf. Penetapan ini termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi zakat bukanlah persoalan yang bersifat sukarela atau subjektif, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat dalam sistem ekonomi Islam.

Secara konseptual, delapan ashnaf tersebut merepresentasikan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi, sosial, dan spiritual.

Fakir dan miskin, sebagai dua kelompok pertama, sering dipahami sebagai inti utama penerima zakat karena keduanya berada dalam kondisi kekurangan yang mengancam keberlangsungan hidup. Sementara itu, keberadaan amil zakat sebagai salah satu ashnaf menegaskan bahwa pengelolaan zakat memerlukan institusi dan sumber daya manusia yang profesional agar distribusinya berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.

Selain Al-Qur'an, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan tambahan terkait distribusi zakat. Beberapa hadis menekankan keutamaan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang paling dekat dengan muzakki, seperti kerabat yang miskin dan anak yatim yang berada dalam tanggung jawabnya. Prinsip ini mencerminkan dimensi sosial zakat yang tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan secara umum, tetapi juga memperkuat solidaritas keluarga dan komunitas. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa prioritas utama distribusi zakat tetap berada dalam kerangka delapan ashnaf sebagaimana ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, sehingga penyaluran kepada kerabat pun harus memenuhi kriteria sebagai mustahik.

Dalam praktiknya, delapan ashnaf lebih dipahami sebagai kategori penerima zakat yang bersifat umum dan institusional, sementara penyaluran kepada kerabat atau kelompok tertentu diposisikan sebagai bagian dari implementasi teknis selama tidak keluar dari ketentuan syariat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi Islam yang bertujuan mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan.

2.1.4.3. Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Secara konseptual, zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik). Dalam Al-Qur'an, penerima zakat telah ditetapkan secara jelas dalam delapan golongan (ashnaf), yang sebagian besar berkaitan langsung dengan kelompok miskin dan rentan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat secara normatif dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial dalam sistem ekonomi Islam (Qardawi, 1999).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Chapra (1992) menjelaskan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam, termasuk zakat, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dengan mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan adanya redistribusi melalui zakat, kelompok miskin dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga potensi kemiskinan struktural dapat dikurangi.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, terutama ketika dikelola secara produktif dan terinstitusionalisasi dengan baik. Studi Beik (2015) menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik serta menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ahmed (2004), yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi bagian penting dari sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam, khususnya di negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara kelembagaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Laporan BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa program zakat berbasis pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang.

Dalam konteks kebijakan pembangunan, zakat dapat dipandang sebagai pelengkap kebijakan fiskal pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Integrasi antara program zakat dan program bantuan sosial pemerintah dapat memperkuat sistem perlindungan sosial nasional, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi paling bawah. Oleh karena itu, zakat

tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.5. Panjang Jalan Aspal

Pengertian jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Sedangkan menurut fungsinya, Jalan Umum dikelompokkan ke dalam Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan.

Panjang jalan aspal adalah ukuran total panjang jalan yang dibangun dengan permukaan aspal, yang sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi di suatu wilayah. Jalan aspal, yang terbuat dari campuran agregat dan aspal, memiliki keunggulan dalam hal daya tahan, kekuatan, dan kemampuan mengurangi kebisingan. Infrastruktur ini sangat penting, terutama di daerah perkotaan, karena memainkan peran kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, dan aksesibilitas terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pengukuran panjang jalan aspal dilakukan untuk memahami seberapa baik suatu daerah terhubung, serta untuk mengidentifikasi area yang mungkin membutuhkan perbaikan atau pembangunan lebih lanjut. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, panjang jalan aspal yang memadai dapat meningkatkan peluang ekonomi dengan memperlancar akses ke pasar, sehingga masyarakat,

terutama yang berada di daerah terpencil, dapat menjual produk mereka dengan lebih mudah.

2.1.4.4. Jenis-Jenis Jalan Aspal

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 , berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 1 yaitu:

1. Jalan Nasional.

Jalan Arteri dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan nasional serta pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

2. Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan Kolektor Primer 1.

3. Jalan Strategis Nasional.

4. Jalan Tol.

5. Jalan Provinsi, meliputi:

a. Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten / Kota yang merupakan Jalan Kolektor Primer 2.

b. Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer menghubungkan antar Ibu Kota Kabupaten / Kota yang merupakan Jalan Kolektor Primer 3.

c. Jalan Strategis Provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk

membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

6. Jalan Kabupaten

- a. Jalan Kolektor dalam Sisten Jaringan Jalan Primer tidak termasuk Jalan Nasional.
- b. Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan: Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dengan Pusat Desa, Antar Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Desa, Ibu Kota Kabupaten dengan Pusat Kegiatan Lokal, Antar Pusat Kegiatan Lokal, Antar Desa, Poros Desa.
- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder dalam Wilayah Kabupaten.
- d. Jalan Strategis Kabupaten

7. Jalan Kota

- a. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan dalam Kota.
- b. Pusat Pelayanan dengan Persil dan Antar Persil.
- c. Antar Pusat Permukiman yang berada di dalam Kota.
- d. Jalan Poros Desa dalam Wilayah Kota

8. Jalan Desa meliputi Jalan Umum yang menghubungkan Kawasan Antar Permukiman serta Jalan Lingkungan di dalam Desa.

2.1.6. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya antara desa dan kota. Kebijakan ini lahir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Melalui Dana Desa, pemerintah menyalurkan alokasi anggaran langsung ke desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Secara teoritis, Dana Desa merupakan bentuk implementasi dari teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya alokasi sumber daya ke level pemerintahan terendah agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal (Oates, 1999). Dengan meningkatnya kapasitas fiskal desa melalui Dana Desa, diharapkan terjadi akselerasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, serta peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki potensi besar dalam menurunkan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian oleh Pratama (2021) menemukan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa secara signifikan berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan di desa-desa di

Indonesia, terutama ketika digunakan untuk kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas Dana Desa sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta tata kelola dan transparansi penggunaan anggaran. Permasalahan klasik seperti lemahnya perencanaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya pengawasan sering kali menghambat pencapaian tujuan program ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta sistem pelaporan dan akuntabilitas yang terintegrasi menjadi prasyarat penting agar Dana Desa benar-benar dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan (Yuliani & Haris, 2022).

Menurut Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2017) Pengertian Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk Desa yang dikirim untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/ kota. Hal ini dilakukan dalam rangka otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan, serta memberdayakan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan.

Desa memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih luas, disertai dengan pembiayaan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sangat diperlukan untuk memperkuat otonomi desa menuju kemandirian. Posisi pemerintahan desa

semakin kokoh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat, tetapi juga sebagai landasan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai wujud desentralisasi keuangan untuk mencapai desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar (70%).

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Grand Teori

Pada penelitian yang berfokus pada pengaruh variabel makro ekonomi, bantuan sosial, dan zakat terhadap kemiskinan, terdapat beberapa grand teori yang dapat dijadikan dasar konseptual. Grand teori ini memberikan kerangka teoretis yang luas untuk memahami hubungan antara berbagai faktor tersebut dan kemiskinan.

2.2.1.1. Teori Kemiskinan Struktural (Structural Theory of Poverty)

Teori Kemiskinan Struktural lahir dari kritik terhadap pandangan individualistik tentang kemiskinan, terutama teori *culture of poverty* yang diperkenalkan oleh Oscar Lewis pada akhir 1950-an. Salah satu pelopor utama dari perspektif struktural adalah Peter Townsend (1979) yang menekankan bahwa kemiskinan disebabkan oleh deprivasi relatif dalam struktur sosial, bukan oleh kelemahan individu. Townsend berargumen bahwa masyarakat miskin terjebak dalam kondisi kekurangan karena struktur sosial-ekonomi tidak menyediakan kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidup. Kemudian, teori ini semakin diperkuat oleh kajian David Brady (2009) yang menunjukkan bahwa kebijakan publik, distribusi kekuasaan, dan institusi politik memiliki peran yang sangat menentukan dalam menciptakan atau mengurangi kemiskinan.

Dalam kerangka ini, kemiskinan dipahami sebagai fenomena sistemik dan multidimensional yang muncul akibat ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi (pekerjaan, modal, tanah), layanan publik (pendidikan, kesehatan), serta infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih). Masyarakat miskin bukanlah “penyebab kemiskinan mereka sendiri”, melainkan korban dari struktur sosial-ekonomi yang timpang dan eksploitatif. Kondisi ini terlihat jelas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana terdapat kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, keterbatasan akses layanan dasar, serta ketimpangan kepemilikan aset.

Implikasi utama dari teori ini adalah bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan usaha individu, melainkan membutuhkan intervensi struktural melalui kebijakan redistribusi pendapatan, perlindungan sosial, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi sistem ekonomi-politik. Dengan demikian, kemiskinan dilihat bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial dan politik distribusi.

2.2.1.2. Teori Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*)

Basic Needs Approach (BNA) pertama kali dipopulerkan oleh International Labour Organization (ILO) pada pertengahan 1970-an, khususnya dalam World Employment Conference tahun 1976. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional yang menekankan peningkatan pendapatan nasional tanpa memperhatikan distribusi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurut ILO, kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi lebih mendasar pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, serta partisipasi sosial.

Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin, sebelum mengejar target pertumbuhan ekonomi makro. Dengan demikian, indikator keberhasilan pembangunan bukan hanya angka PDB, melainkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Paul Streeten dan kelompok Basic Needs (1981) yang menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah prasyarat agar manusia dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Konsep kebutuhan dasar juga menjadi landasan awal pengembangan berbagai indikator kesejahteraan non-moneter, termasuk Human Development Index (HDI) yang diluncurkan UNDP pada 1990. Pendekatan ini berimplikasi bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan intervensi langsung berupa program-program sosial seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dasar universal, penyediaan pangan bergizi, jaminan sosial, serta infrastruktur dasar.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, teori ini sangat relevan karena menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan dasar, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Misalnya, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan PDB positif, masalah kemiskinan tetap bertahan karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, Basic Needs Approach menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan memandang pemenuhan kebutuhan dasar sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

2.2.1.3. Teori Pertumbuhan dan Distribusi (*Growth–Poverty Nexus Theory*)

Teori Growth–Poverty Nexus berangkat dari pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat, namun hubungan ini tidak selalu linier dan tergantung pada aspek distribusi pendapatan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai syarat utama untuk mengurangi kemiskinan karena peningkatan output nasional akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kapasitas fiskal negara untuk membiayai program sosial.

Namun demikian, para ekonom seperti Kuznets (1955) menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan distribusi tidak selalu harmonis. Dalam hipotesis Kuznets Curve, pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan justru disertai dengan meningkatnya ketimpangan, yang pada gilirannya dapat memperlambat pengurangan kemiskinan. Baru setelah perekonomian mencapai tingkat perkembangan tertentu, distribusi pendapatan mulai membaik sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam studi-studi empiris oleh Ravallion dan Chen (1997) yang menekankan bahwa efek pertumbuhan terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok kaya, maka kemiskinan tidak akan banyak berkurang, bahkan bisa memburuk. Sebaliknya, pertumbuhan yang bersifat inklusif (*pro-poor growth*) akan signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Dalam konteks ini, Growth–Poverty Nexus Theory menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan distribusi. Dengan kata lain, pertumbuhan tinggi saja tidak cukup, tetapi harus disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini relevan dengan situasi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah struktural, baik di perkotaan maupun pedesaan.

2.2.1.4. Teori Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Economics*)

Teori ekonomi kesejahteraan, yang dikembangkan oleh Arthur Pigou dan disempurnakan oleh ekonom lainnya, berfokus pada alokasi sumber daya yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Teori ini mendukung intervensi pemerintah, seperti bantuan sosial, sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mengalami kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Bantuan sosial dianggap sebagai cara untuk mengoreksi kegagalan pasar dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dalam penelitian ini, teori kesejahteraan dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperlukan untuk menurunkan kemiskinan. Bantuan sosial menyediakan sumber daya tambahan bagi masyarakat miskin, yang meningkatkan daya beli mereka dan memberikan akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Pigou, 1920)

2.2.1.5. Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Teori pertumbuhan endogen, yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas, menekankan pentingnya kapital manusia dan investasi dalam pendidikan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini relevan dalam menghubungkan variabel-variabel seperti pendidikan, kesehatan (yang diukur oleh IPM), dan variabel makro ekonomi terhadap

penurunan kemiskinan.(Romer, 1986)

Dalam konteks penelitian ini, peningkatan IPM melalui pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas ini kemudian akan mendorong pengurangan kemiskinan, terutama jika didukung oleh kebijakan ekonomi makro yang stabil dan kondusif.

2.2.1.6. Teori Redistribusi Pendapatan (*Income Redistribution Theory*)

Teori redistribusi pendapatan menjelaskan bahwa distribusi ulang pendapatan melalui kebijakan seperti pajak progresif dan transfer tunai, termasuk bantuan sosial dan zakat, dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa distribusi kesejahteraan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan memperbaiki posisi kelompok yang paling miskin dalam masyarakat.(Rawls, 1971).

Bantuan sosial dan zakat dalam penelitian ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang dapat langsung memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat miskin, sehingga mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

2.2.1.7. Teori Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net Theory*)

Teori ini menyoroti pentingnya jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial, dalam melindungi masyarakat miskin dari risiko ekonomi dan sosial. Menurut Barrientos dan Hulme (2008), program bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan minimum kepada masyarakat rentan terhadap risiko seperti kemiskinan, pengangguran, dan guncangan ekonomi lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, bantuan sosial seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan memastikan bahwa mereka memiliki pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama saat terjadi krisis ekonomi atau bencana.

2.2.1.8. Konsep Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Zakat dalam ekonomi Islam tidak diposisikan sebagai teori ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsep normatif dan instrumen kebijakan dalam kerangka ekonomi Islam. Secara konseptual, zakat merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan.

Dalam literatur ekonomi Islam, zakat ditempatkan sebagai bagian integral dari kerangka teoritis yang lebih luas, seperti teori distribusi pendapatan Islam dan kerangka keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*). Kerangka ini menjelaskan bagaimana instrumen-instrumen sosial Islam termasuk zakat, infak, dan sedekah berfungsi secara sistematis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Chapra, 2000; Kahf, 2004).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini zakat diperlakukan sebagai konsep dan instrumen kebijakan dalam kerangka ekonomi Islam, bukan sebagai teori ekonomi formal yang berdiri sendiri, sehingga analisis empiris yang dilakukan tetap berada dalam koridor metodologi ekonomi modern.

2.2.2. Teori Pengaruh Variabel Bebas terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Dalam perspektif ekonomi makro, kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketimpangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, lapangan kerja, serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika kemiskinan di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan diperlukan kajian atas sejumlah variabel yang secara teoritis dan empiris diyakini memengaruhinya.

1. Variabel makroekonomi yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi berperan penting dalam membentuk kondisi ekonomi agregat yang berdampak langsung pada kemiskinan. Menurut teori trickle-down effect, pertumbuhan ekonomi seharusnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2020). Namun, bila pertumbuhan tersebut tidak inklusif, maka manfaatnya tidak dirasakan oleh kelompok miskin. Sementara itu, tingkat pengangguran yang tinggi akan mempersempit peluang memperoleh penghasilan tetap, dan inflasi yang tidak terkendali akan menggerus daya beli masyarakat miskin, sehingga memperburuk kemiskinan (Blanchard & Johnson, 2013).
2. Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan pangan merupakan salah satu instrumen fiskal negara untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Berdasarkan teori

redistribusi kesejahteraan (welfare redistribution), intervensi pemerintah melalui bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli dan melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi jangka pendek (Barr, 2004). Efektivitas bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan ditentukan oleh ketepatan sasaran, kesinambungan, dan integrasi program dengan pemberdayaan ekonomi.

3. Zakat sebagai mekanisme keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan, khususnya di masyarakat Muslim. Dalam teori maqashid syariah, zakat tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan jaminan sosial bagi kelompok mustahik. Zakat yang dikelola secara produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin dan mengurangi ketimpangan (Kahf, 1999).
4. Infrastruktur jalan (panjang jalan aspal) merupakan indikator ketersediaan dan aksesibilitas wilayah terhadap pasar, layanan publik, dan pusat ekonomi. Teori pembangunan wilayah (regional development theory) menjelaskan bahwa infrastruktur transportasi membuka peluang mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang secara efisien, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan kemiskinan (World Bank, 2009).
5. Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang secara langsung diberikan kepada pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut teori desentralisasi fiskal (fiscal decentralization theory), alokasi anggaran ke level lokal akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya karena lebih memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Ketika Dana Desa digunakan secara tepat sasaran untuk kegiatan produktif dan pembangunan infrastruktur dasar, maka dapat berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan (Oates, 1999).

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami dinamika kemiskinan di Indonesia, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel-variabel kunci seperti bantuan sosial, zakat, dan faktor makro ekonomi. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan di berbagai konteks, baik di perkotaan maupun di pedesaan

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, banyak penelitian telah dilakukan untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kondisi kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Di sisi lain, penelitian oleh Hastuti dan Nugroho (2017) mengungkapkan bahwa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berhasil memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan jangka pendek masyarakat miskin.

Zakat juga muncul sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh Ali dan Haseeb (2019) menemukan bahwa distribusi zakat yang tepat sasaran dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam analisis makro ekonomi, Wahyuni dan Rahayu (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kemiskinan dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki pengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan inflasi yang tinggi dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh Setiawan dan Firdaus (2020) membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Mereka menemukan bahwa mekanisme dan strategi pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, karena ada perbedaan yang mencolok dalam pengaruh IPM dan bantuan sosial di kedua konteks tersebut.

Junaidi dan Nasution (2019) mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dan menekankan pentingnya integrasi antara program bantuan sosial dan peningkatan IPM. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mencakup berbagai dimensi pengentasan kemiskinan adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Secara keseluruhan, literatur yang ada mendukung pemahaman bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang multidimensional, menggabungkan peningkatan IPM, efektivitas bantuan sosial, pengelolaan zakat, dan respons terhadap kondisi makro ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam terhadap strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif di masa depan, berikut penjelasan

Tabel 2 4 Penelitian Terdahulu

No.	Title, Author	Hasil	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	The Impact of Human Development Index on Poverty in Indonesia Sari, R. M., & Saputra, H. (2020). <i>Journal of Indonesian Economy and Business</i>, 35(1), 12-24	IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Fokus kedua studi terhadap determinan kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan empiris berbasis data panel provinsi. Keduanya juga sama-sama menggunakan variabel yang mencerminkan aspek kesejahteraan masyarakat secara makro, meskipun jenis variabel yang digunakan berbeda. Selain itu, kedua penelitian menyimpulkan bahwa ada faktor struktural yang signifikan mempengaruhi penurunan kemiskinan di Indonesia	Penelitian Sari dan Saputra berfokus pada pembangunan manusia sebagai variabel tunggal yang mencerminkan aspek-aspek sosial dasar (pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran), sedangkan penelitian tentang makroekonomi, bantuan sosial, dan zakat menggunakan pendekatan yang lebih luas dari sisi ekonomi makro seperti PDRB, inflasi, dan pengangguran, serta menambahkan variabel intervensi sosial seperti bantuan sosial dan zakat yang lebih bersifat kebijakan fiskal dan distribusi
2	The Effectiveness of Social Assistance Programs on Poverty Alleviation in Indonesia	Program bantuan sosial efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama di daerah terpencil	Bantuan sosial pemerintah	fokus substansial terhadap peran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan.	secara eksklusif pada efektivitas program bantuan sosial tanpa mempertimbangkan variabel makroekonomi lainnya seperti PDRB, inflasi, atau

No.	Title, Author	Hasil	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	Hastuti, T., & Nugroho, D. (2017). <i>Indonesian Journal of Public Policy</i> , 5(2), 85-102.				pengangguran, serta tidak memasukkan elemen zakat sebagai instrumen sosial keagamaan
3	The Role of Zakat in Poverty Alleviation: Evidence from Indonesia Ali, M., & Haseeb, M. (2019). <i>International Journal of Islamic Economics and Finance Studies</i> , 5(1), 45-60.	Zakat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik.	Zakat	sama-sama menegaskan peran strategis zakat dalam mengurangi kemiskinan, dan menggunakan konteks wilayah Indonesia sebagai fokus kajian.	berfokus secara tunggal pada variabel zakat sebagai alat intervensi terhadap kemiskinan, tanpa mengikutsertakan variabel ekonomi makro lainnya maupun bantuan sosial dari pemerintah
4	Macroeconomic Factors and Poverty in Indonesia: A Panel Data Analysis Wahyuni, S. & Rahayu, R. (2018). <i>Journal of Economic Studies</i> , 45(3), 563-579.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, sedangkan inflasi berdampak negatif pada kemiskinan	PDRB, inflasi, pengangguran	penggunaan variabel makroekonomi utama, yaitu PDRB, inflasi, dan pengangguran sebagai determinan kemiskinan	perbedaan substansial dalam cakupan variabel sosial dan sudut pandang kebijakan
5	Urban and Rural Poverty in Indonesia: A Comparative Study Setiawan, M., & Firdaus, A. (2020). <i>Sosiohumaniora</i> , 22(1), 49-61.	Faktor-faktor kemiskinan berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan	Variabel sosioekonomi wilayah	fokus wilayah studi, yaitu mengkaji dinamika kemiskinan berdasarkan kawasan perkotaan dan pedesaan	pendekatan metodologis dan fokus variabel yang digunakan
6	Evaluating the Effectiveness of Poverty Alleviation Strategies in	Integrasi antara bantuan sosial dan peningkatan IPM penting untuk mengurangi	Bantuan sosial, IPM	sama-sama mengkaji persoalan kemiskinan di Indonesia	bersifat deskriptif-evaluatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah secara umum, dan tidak

No.	Title, Author	Hasil	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	Indonesia Junaidi, A., & Nasution, M. (2019). <i>Indonesian Journal of Development Studies</i> , 8(1), 15-30.	kemiskinan.		dengan membedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan , serta menyoroti pentingnya bantuan sosial sebagai salah satu instrumen utama dalam strategi pengentasan kemiskinan	secara kuantitatif menguji hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro seperti PDRB, inflasi, dan pengangguran dengan tingkat kemiskinan
7	<i>Zakat for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia</i> Qurroh Ayuniyyah et al. (2018) Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (jimf-bi.org)	Zakat signifikan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan di kawasan urban & rural Jawa Barat	Zakat	pengaruh zakat signifikan.	Fokus studi pada penerima zakat, bukan termasuk makroekonomi dan bantuan sosial.
8	<i>Analisis Penghimpunan ZIS terhadap Makroekonomi Indonesia</i> Nurherlina (2023) <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i>	ZIS meningkatkan GDP, Gini, HDI signifikan; pengaruh pada kemiskinan dan pengangguran kecil & tidak signifikan	ZIS, GDP, Gini, HDI	variabel makro & zakat; menggunakan data panel.	Hasil kemiskinan tidak signifikan, sementara studi Anda menemukan zakat signifikan menurunkan kemiskinan.
9	<i>Does zakat impact poverty alleviation in Indonesia during Covid-19?</i> Zulyanto et al. (2025)	Tidak signifikan: zakat (NZI) tidak menurunkan kemiskinan selama pandemi.	Zakat (NZI)	model panel FEM & fokus zakat.	Perbedaan waktu (COVID) dan hasil tidak signifikan pada kemiskinan.

No.	Title, Author	Hasil	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	<i>Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan</i>				
10	<i>The Role of ZIS in Shaping Indonesia's Macroeconomic Landscape</i> Nurfitriani (2024) <i>JEKSYAH: Islamic Economics Journal</i>	ZIS signifikan terhadap GDP, HDI, kemiskinan, pengangguran.	ZIS, variabel makro	pengaruh zakat & makroekonomi signifikan	Tidak membahas bantuan sosial dan perbedaan observasi di provinsi.
11	<i>The Effect of Zakat Performance and Macroeconomic Variables on Poverty Levels</i> Agniya et al. (2024) <i>ICCEIS Conference</i>	Zakat berpengaruh negatif signifikan; makro (pengeluaran pemerintah, inflasi) tidak signifikan; Gini positif signifikan	Zakat, inflasi, belanja pemerintah, Gini	zakat signifikan, penggunaan makroekonomi & Gini.	Model makro berbeda (misal, GDP), dan tidak memasukkan bantuan sosial.
12	<i>Influence of Zakat Fund and Macroeconomic Variable</i> Ridlo & Mochlasin (2024) <i>Journal of Indonesian Economic Research</i>	Zakat positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; variabel kemiskinan positif tapi tidak signifikan.	Zakat, makroekonomi	zakat & makroekonomi.	Fokus pada pertumbuhan; kemiskinan tidak signifikan, berbeda dengan studi ini
13	<i>Effect of Macroeconomic Indicators on ZIS collection in Java</i> Abdullah & Qoyum (2022) <i>Bulletin of Islamic Economics</i>	Inflasi & pendapatan per kapita signifikan terhadap pengumpulan ZIS; pengangguran & UMK nol efek.	Inflasi, pengangguran, pendapatan	ada variabel makro seperti inflasi & pengangguran.	Fokus bukan kemiskinan, tapi pada koleksi zakat dan ZIS.
14	<i>Effect of macro indicators on ZIS</i>	Inflasi & HDI berpengaruh negatif	Inflasi, HDI, pendapatan	penggunaan makro dan data	Fokus pada pembayaran zakat,

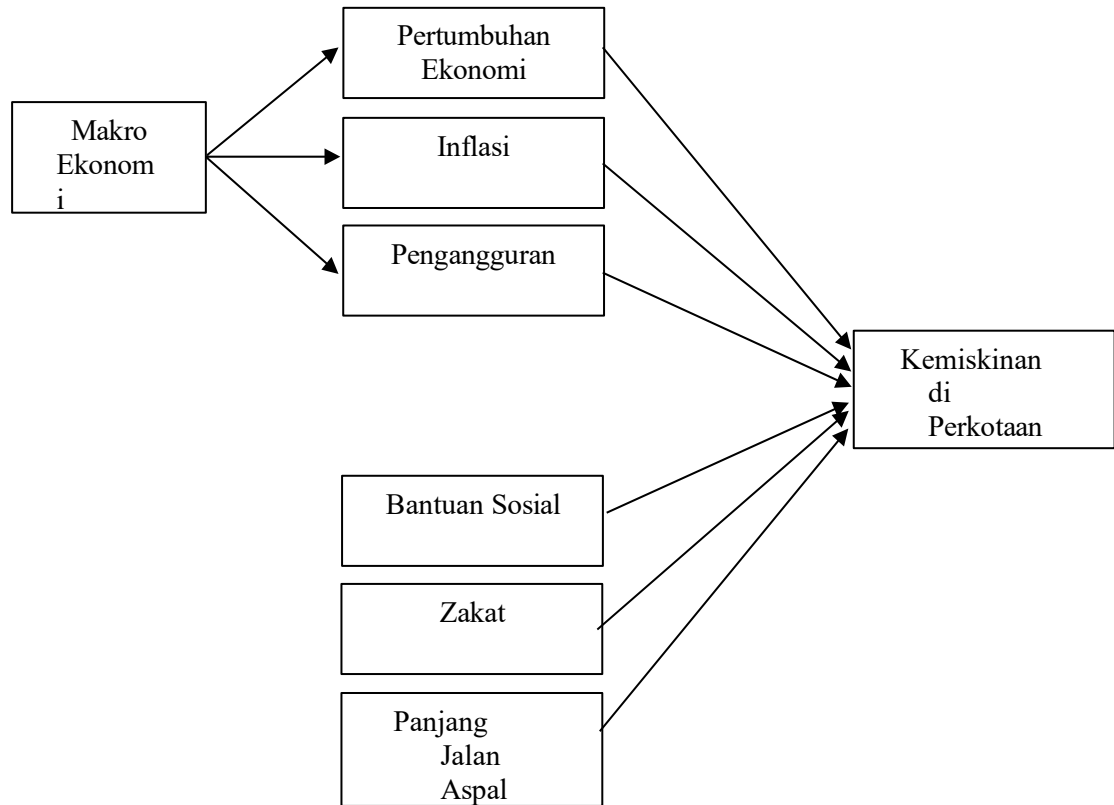
No.	Title, Author	Hasil	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	<i>payments</i> Susilowati (2021) <i>Bulletin of Islamic Economics</i>	tidak signifikan; pendapatan per kapita positif signifikan		BAZNAS; relevan dengan zakat.	bukan dampak kemiskinan.
15	<i>Macroeconomic Influence on Zakat Growth in 34 Provinces</i> Muslih (2024) <i>Jurnal Magister Ekonomi Syariah</i>	GRDP per kapita & UMK tidak signifikan mempengaruhi zakat; populasi Muslim signifikan	GRDP per kapita, UMK, populasi Muslim	dimensi makro & zakat.	Fokus hanya pada pertumbuhan zakat, bukan kemiskinan atau bantuan sosial
16	<i>Sustainable Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah on Multidimensional Poverty and Enhancing Economic Growth in 34 Indonesia Provinces</i> Siregar et al. (2024) <i>Journal of Islamic Economic and Business Research,</i>	ZIS secara signifikan mengurangi kemiskinan multidimensional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi; ZIS berdampak positif pada indeks kemiskinan	ZIS, pertumbuhan ekonomi	Sama: menguji peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan Indonesia.	Fokus pada multidimensional poverty index dan efek pertumbuhan ekonomi, bukan eksplisit membandingkan perkotaan vs. pedesaan.
17	<i>The Effects of Unemployment, Management of Zakat Funds, and Economic Expansion on Poverty</i> Alam et al. (2023) <i>ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam</i>	Zakat fund management mengurangi kemiskinan secara signifikan; pengangguran berdampak positif terhadap kemiskinan; pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.	Zakat, pengangguran, pertumbuhan	Sama: membahas zakat, pengangguran, dan kemiskinan.	Tidak memasukkan variabel seperti bantuan sosial, inflasi, atau perbedaan wilayah urban-rural.
18	<i>The influence of zakat, HDI, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia</i> Mutmainah et al. (2024)	Zakat, HDI, dan pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran tidak signifikan.	Zakat, IPM, pendapatan	Sama: efek zakat dan variabel ekonomi terhadap kemiskinan dianalisis.	Tidak mengevaluasi bantuan sosial / desa / perkotaan secara spesifik; fokus lebih luas pada HDI dan pendapatan.

No.	Title, Author	Hasil	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	<i>Journal of Islamic Economics Lariba</i>				
19	<i>Analysis of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), HDI, Inflation, and GRDP on Poverty Alleviation in Indonesia</i> Hariyanto & Nafi'ah (2023) <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i>	ZIS, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dianalisis; masing-masing memengaruhi tingkat kemiskinan.	ZIS dan variabel makroekonomi	Sama: membahas zakat dan variabel ekonomi terhadap kemiskinan.	Analisis tidak memisahkan wilayah perkotaan vs pedesaan dan tidak memasukkan bantuan sosial nasional secara eksplisit.

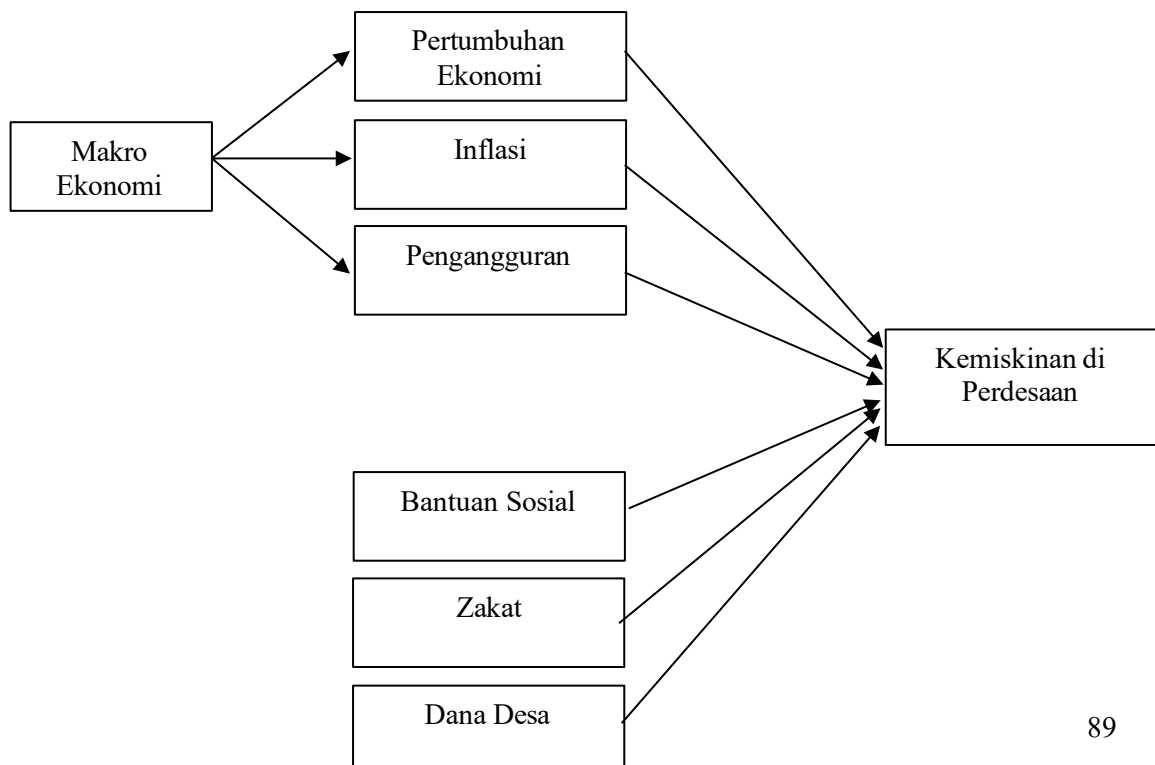
2.4. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi pengaruh variabel makroekonomi, bantuan sosial, dan zakat terhadap kemiskinan di Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan menganalisis bagaimana ketiga variabel tersebut berdampak terhadap kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Tentang Kemiskinan di Perkotaan



Gambar 2 2 Kerangka Pemikiran Tentang Kemiskinan di Perdesaan



2.5. Hipotesis Penelitian

H1a : Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam pembangunan yang secara teoritis mampu menurunkan tingkat kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam teori trickle-down effect, dijelaskan bahwa peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Di wilayah perkotaan, pertumbuhan sektor industri dan jasa menjadi pendorong utama penurunan kemiskinan. Sementara di pedesaan, pertumbuhan sektor pertanian dan UMKM lebih dominan. (Ravallion, 2001).

H2a : Inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan

Inflasi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Teori daya beli riil menyatakan bahwa ketika harga barang meningkat lebih cepat dibanding pendapatan, maka masyarakat miskin paling terdampak karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok (Fisher, 1911). Di perkotaan, inflasi berdampak pada biaya hidup yang lebih tinggi seperti transportasi dan perumahan. Sementara di pedesaan, inflasi bahan pokok dan input pertanian menjadi beban yang signifikan. Inflasi juga memperparah ketimpangan sosial bila tidak diimbangi kebijakan stabilisasi harga.

H3_a : Pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan Terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Tingkat pengangguran tinggi menyebabkan kehilangan pendapatan rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Berdasarkan Okun's Law, terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran—sehingga meningkatnya pengangguran mengindikasikan ketidakefektifan perekonomian (Okun, 1962). Di wilayah perkotaan, pengangguran banyak terjadi di sektor formal, sedangkan di pedesaan lebih dominan dalam bentuk setengah menganggur atau pekerjaan tidak tetap di sektor pertanian. Pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan kemiskinan struktural.

H4_a : Bantuan sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam teori kesejahteraan sosial (welfare economics), bantuan sosial merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti menurunkan kemiskinan dengan memberikan perlindungan dari guncangan ekonomi (Barr, 1998). Di perkotaan, bantuan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak. Di pedesaan, bantuan banyak digunakan untuk konsumsi dasar dan modal usaha kecil. Efektivitasnya tergantung pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan program.

H5_a : Zakat memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam Islam, zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat wajib untuk memberantas kemiskinan. Teori distribusi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa zakat bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi (Chapra, 1992). Di perkotaan, zakat digunakan oleh mustahik untuk konsumsi dan pelunasan hutang, sedangkan di pedesaan zakat sering dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Penyaluran zakat secara profesional dan tepat sasaran dapat mengangkat kesejahteraan secara berkelanjutan.

H6_a : Panjang jalan aspal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pedesaan.

Pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus barang, mobilitas tenaga kerja, dan akses ke fasilitas publik. Dalam teori pembangunan wilayah, kualitas infrastruktur berdampak langsung terhadap penurunan biaya transaksi dan peningkatan produktivitas lokal (Calderón & Servén, 2010). Di perkotaan, jalan memperlancar konektivitas antar kawasan. Di pedesaan, akses jalan sangat penting untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan akses pasar.

H7_a : Dana desa memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Menurut teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972), alokasi dana ke pemerintahan lokal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan. Dana desa memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Walau difokuskan ke desa, dampaknya secara tidak

langsung juga terasa di wilayah pinggiran perkotaan yang masuk dalam administrasi desa. Dana desa mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan peningkatan layanan dasar.

Tabel 2 5 Hipotesis Penelitian Lengkap

Kode	Hipotesis Penelitian	Arah Hubungan	Wilayah	Teori Pendukung
H1a	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Perkotaan	Teori Trickle-Down Effect (Todaro & Smith, 2020); Teori Pertumbuhan Inklusif
H1b	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Pedesaan	Teori Pertumbuhan Ekonomi Lokal; Ravallion (2001)
H2a	Inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Positif	Perkotaan	Teori Daya Beli Riil (Fisher, 1911); Agenor & Montiel (2015)
H2b	Inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Positif	Pedesaan	Teori Ketahanan Konsumsi Rumah Tangga
H3a	Pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Positif	Perkotaan	Okun's Law; Teori Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
H3b	Pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Positif	Pedesaan	Teori Dualisme Pasar Kerja
H4a	Bantuan sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Perkotaan	Teori Redistribusi Sosial (Barr, 1998); Welfare Economics
H4b	Bantuan sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Pedesaan	Teori Jaring Pengaman Sosial; Hanna & Olken (2018)

Kode	Hipotesis Penelitian	Arah Hubungan	Wilayah	Teori Pendukung
	tingkat kemiskinan			
H5a	Zakat memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Perkotaan	Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam (Chapra, 1992); Maqashid Syariah
H5b	Zakat memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Pedesaan	Ekonomi Islam Berbasis Keadilan; Beik & Arsyianti (2016)
H6a	Panjang jalan aspal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Perkotaan	Teori Infrastruktur dan Pertumbuhan (Calderón & Servén, 2010)
H6b	Panjang jalan aspal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Pedesaan	Teori Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Ekonomi
H7a	Dana desa memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Perkotaan (desa administratif)	Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972); Pembangunan Lokal Partisipatif
H7b	Dana desa memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Negatif	Pedesaan	Teori Pemberdayaan Masyarakat Desa; BIES (Suryahadi et al., 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan ini menggunakan analisis ekonometrik dengan data panel untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan kuantitatif antara variabel-variabel penelitian. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik yang dapat diukur secara statistik. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel melalui penggunaan model matematis.

Penelitian ini menganalisis hubungan variabel makroekonomi (seperti PDRB, inflasi, dan tingkat pengangguran), bantuan sosial, zakat, serta tingkat kemiskinan dengan menggunakan data statistik yang relevan. Data panel digunakan untuk menggabungkan data cross-section (dari berbagai wilayah, seperti perkotaan dan pedesaan) dengan data time series (dalam rentang waktu tertentu), sehingga menghasilkan analisis yang lebih kuat secara dinamis (Greene, 2012).

Desain penelitian mengadopsi pendekatan regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mempertimbangkan variabilitas antarwilayah dan antarwaktu, sehingga hasil analisis lebih akurat dan komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian terkait, dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Mengacu pada perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan pedesaan, penelitian ini menggunakan dua model analisis yang terpisah untuk menangkap variasi yang terjadi di masing-masing wilayah. Pendekatan model yang terpisah ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kemiskinan yang spesifik untuk masing-masing area, sehingga analisis yang dihasilkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual.

Penelitian ini menggunakan data tahunan dari periode 2013 hingga 2024. Rentang waktu ini dipilih karena data yang tersedia relatif stabil, lebih lengkap, dan relevan untuk mendukung analisis jangka panjang. Data tahunan juga memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap hubungan antara variabel-variabel makroekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), bantuan sosial, zakat, dan tingkat kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan menggunakan pendekatan data panel, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif dan dinamis terhadap determinan kemiskinan di Indonesia (Greene, 2012).

3.2. Definisi Variabel Penelitian

Variabel adalah karakter masyarakat atau objek yang memiliki perbedaan di antara satu terhadap yang lainnya atau satu objek dengan objek yang lainnya (Sujarweni, 2015), variabel pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

3.2.1. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas (Sujarweni, 2015), Variabel terikat yaitu faktor yang merupakan tujuan utama peneliti (Sekaran & Bougie, 2013)

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural. Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk: absolut dan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum, sedangkan kemiskinan relatif membandingkan kondisi individu dengan standar hidup masyarakat sekitarnya.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang mencakup komponen makanan dan non-makanan. Kemiskinan menjadi indikator penting dalam evaluasi keberhasilan pembangunan nasional, karena menyangkut langsung kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, distribusi kemiskinan di Indonesia menunjukkan pola spasial yang khas, di mana kemiskinan lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan (BPS, 2023), sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang menyebabkan adanya perubahan pada dependen (Sujarweni, 2015), Sekaran dan Bougie berpendapat Variabel independen atau bebas yaitu variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel terikat, baik pengaruh yang positif ataupun negatif (Sekaran & Bougie, 2013). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel independen yakni variabel makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, Inflasi pengangguran), bantuan sosial, dan zakat.

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi yang positif berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lebih banyak lapangan kerja, yang membantu mengurangi kemiskinan (Wahyuni & Rahayu, 2018). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit produksi di suatu daerah dalam periode tertentu dengan indikator Utama: PDRB Riil Per Kapita: Mengacu pada PDRB yang disesuaikan dengan inflasi untuk menunjukkan nilai riil pendapatan per kapita suatu daerah. PDRB riil per kapita adalah indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan PDRB: Persentase perubahan PDRB dari tahun ke tahun, yang memberikan gambaran tentang seberapa cepat ekonomi suatu daerah tumbuh

2. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut teori kuantitas uang (Fisher, 1911), inflasi dapat mengikis daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang memiliki porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok yang besar. Inflasi yang tinggi sering kali berdampak regresif terhadap kemiskinan, karena penduduk miskin tidak memiliki instrumen lindung nilai terhadap harga-harga yang meningkat. Di sisi lain, inflasi yang terkendali menjadi cerminan kestabilan ekonomi yang sehat.

3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan faktor signifikan dalam kemiskinan. Di wilayah perkotaan, pengangguran bisa lebih tinggi karena ketergantungan pada pekerjaan di sektor formal. Di pedesaan, meskipun tingkat pengangguran mungkin lebih rendah, pendapatan dari pekerjaan informal atau agraris seringkali tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan.

Pengangguran terbuka mengindikasikan ketidakefisienan dalam pasar tenaga kerja. Teori Keynesian menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi akan menurunkan pendapatan rumah tangga dan permintaan agregat, sehingga berujung pada kontraksi ekonomi dan peningkatan kemiskinan (Keynes, 1936).

Di wilayah perkotaan, pengangguran sering kali lebih tinggi karena banyaknya lulusan pendidikan yang tidak terserap pasar kerja. Sementara itu, di pedesaan, pengangguran sering bersifat terselubung (*underemployment*), di mana masyarakat bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan struktural.

4. Bantuan Sosial

Bantuan sosial pangan, sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah, memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi beban hidup masyarakat miskin, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan fokus pada realisasi anggaran bantuan sosial pangan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan tersebut dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Data realisasi anggaran memungkinkan untuk melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, yang

pada gilirannya mencerminkan seberapa efektif dana bantuan digunakan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Meskipun data terperinci antara kota dan desa sulit didapat, penggunaan data provinsi tetap relevan, karena kebijakan bantuan sosial sering kali direncanakan dan dikelola pada tingkat provinsi, yang mencakup sebagian besar wilayah. Dengan demikian, realisasi anggaran bantuan sosial pangan yang terdistribusi secara merata di seluruh provinsi dapat memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai dampak bantuan sosial terhadap kemiskinan di berbagai daerah.

5. Zakat

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, yang mengharuskan individu Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada fakir miskin dan kelompok yang berhak menerimanya. Di Indonesia, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai lembaga zakat lainnya.

Zakat diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Karena zakat seringkali ditargetkan langsung kepada masyarakat miskin, efeknya bisa lebih langsung dibandingkan dengan bantuan sosial pemerintah. Zakat bisa memiliki dampak yang berbeda di perkotaan dan pedesaan, tergantung pada distribusi dan jumlah zakat yang disalurkan.

6. Panjang Jalan Aspal

Infrastruktur jalan yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut Calderón dan Servén (2010), infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah,

menurunkan biaya logistik, serta memperluas akses ke pasar dan layanan sosial.

Di daerah pedesaan, panjang jalan aspal menjadi indikator penting terhadap keterhubungan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap peluang kerja dan pendidikan. Kurangnya infrastruktur jalan berkorelasi kuat dengan keterisolasian wilayah, yang berimplikasi langsung terhadap kemiskinan.

7. Dana Desa

Dana desa merupakan kebijakan fiskal desentralisasi yang bertujuan mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) menyatakan bahwa transfer fiskal ke daerah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas lokal. Di Indonesia, dana desa mulai dialokasikan secara signifikan sejak 2015. Studi oleh Suryahadi et al. (2020) menunjukkan bahwa dana desa memiliki kontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan, terutama jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, efektivitasnya tergantung pada kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah desa.

Tabel 3 1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Satuan/Skala	Sumber Data
1	Kemiskinan	Dependen	Persentase penduduk miskin	Persen (%)	BPS (Badan Pusat Statistik)
2	Pertumbuhan Ekonomi	Independen	Laju pertumbuhan PDRB	Persen (%)	BPS
3	Inflasi	Independen	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Persen (%)	BPS
4	Pengangguran	Independen	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen (%)	BPS
5	Bantuan	Independen	Jumlah penerima	Jumlah	Kementerian

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Satuan/Skala	Sumber Data
	Sosial		PKH dan/atau BPNT	(jiwa/kk)	Sosial, BPS
6	Zakat	Independen	Total penghimpunan zakat (zakat maal/fidyah)	Juta/Ribu Rupiah	BAZNAS, LAZ, Laporan Zakat Nasional
7	Panjang Jalan Aspal	Independen	Total panjang jalan aspal per provinsi/kabupaten	Kilometer (km)	BPS, Kementerian PUPR
8	Dana Desa	Independen	Total alokasi dana desa per tahun	Juta/Miliar Rupiah	Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3.3. Model Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan pemisahan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemisahan ini dilakukan untuk menangkap perbedaan dinamika sosial, ekonomi pada kedua wilayah sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan kontekstual. Model data panel dipilih karena memiliki keunggulan dalam menggabungkan data antar wilayah (*cross-section*) dan antar periode waktu (*time series*), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati variasi antar daerah sekaligus perubahan dari waktu ke waktu, dengan demikian, hubungan antara variabel independen yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, bantuan sosial, dan zakat dapat dianalisis secara lebih komprehensif terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia pada wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Dengan menggunakan pendekatan model regresi data panel yang dipisahkan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan yang bersifat unik di masing-masing wilayah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menangkap dinamika sosial-ekonomi yang berbeda antara kota dan desa, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat umum, tetapi juga kontekstual sesuai karakteristik wilayah. Dengan demikian, model regresi data panel terpisah ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan spesifik masing-masing wilayah, adapun model regresi nya sebagai berikut:

1. Model Regresi untuk Kemiskinan Perkotaan

$$KMK_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 ZA_{it} + \beta_7 JA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dengan Spesifikasi Model Regresi.

a. Variabel Dependen: Kemiskinan

KMK_{it} : Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan

b. Variabel Independen:

- 1) PDRB per Kapita ($PDRB_{it}$): Pertumbuhan ekonomi di wilayah i pada waktu t , diukur dalam PDRB per kapita.
- 2) Inflasi (INF_{it}): Tingkat inflasi di wilayah pada waktu , diukur dengan indeks harga konsumen (IHK).
- 3) Tingkat Pengangguran ($Peng_{it}$): Persentase pengangguran di wilayah pada waktu t .

- 4) Bantuan Sosial (BS_{it}): Total bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin di wilayah i pada waktu t , diukur dalam Rupiah.
- 5) Zakat (Za_{it}): Jumlah zakat yang disalurkan ke wilayah i pada waktu t , diukur dalam Rupiah.
- 6) Panjang Jalan Aspal $\beta_7 JA_{it}$: Pengukuran jalan aspal dalam km
- 7) (μ_i) : Efek tetap atau acak untuk setiap unit (misalnya, kota)
- 8) ε_{it} : Term error atau sisa, yang mewakili variabel-variabel lain yang tidak terukur namun memengaruhi kemiskinan

1. Model Regresi untuk Kemiskinan Pedesaan

$$KMD_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 ZA_{it} + \beta_7 DD_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Dengan Spesifikasi Model Regresi.

a. Variabel Dependen: Kemiskinan

KMD_{it} : Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan

b. Variabel Independen:

- 1) PDRB per Kapita ($PDRB_{it}$) : Pertumbuhan ekonomi di wilayah i pada waktu t , diukur dalam PDRB per kapita.
- 2) Inflasi (INF_{it}) : Tingkat inflasi di wilayah i pada waktu t , diukur dengan indeks harga konsumen (IHK).
- 3) Tingkat Pengangguran ($Peng_{it}$): Persentase pengangguran di wilayah i pada waktu t .
- 4) Bantuan Sosial (BS_{it}): Total bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin di wilayah i pada waktu t , diukur dalam Rupiah.
- 5) Zakat (Za_{it}): Jumlah zakat yang disalurkan ke wilayah i pada waktu t , diukur

dalam Rupiah.

- 6) Dana Desa (DD_{it}) : Alokasi dana desa
- 7) (μ_i) : Efek tetap atau acak untuk setiap unit (misalnya, kota)
- 8) ε_{it} : Term error atau sisa, yang mewakili variabel-variabel lain yang tidak terukur namun memengaruhi kemiskinan

3.3.1. Metode Estimasi Model

Pemilihan metode estimasi dalam suatu penelitian kuantitatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah regresi data panel karena data yang digunakan memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi waktu (time series) dan dimensi individu (cross-section), yang dalam konteks ini mencakup data provinsi (atau kabupaten/kota) selama periode waktu tertentu. Data panel memberikan beberapa keunggulan metodologis dibandingkan dengan data cross-section atau time series secara terpisah. Menurut Baltagi (2005), keunggulan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan jumlah observasi, sehingga memperkuat derajat kebebasan (*degrees of freedom*) dan meningkatkan efisiensi estimasi parameter.
2. Mengendalikan heterogenitas individual (*unobserved heterogeneity*) antar provinsi yang mungkin tidak dapat diobservasi secara langsung tetapi tetap memengaruhi variabel dependen.
3. Mendeteksi dinamika perubahan antar waktu yang lebih baik, sehingga dapat mengidentifikasi tren dan efek kebijakan dengan lebih akurat.
4. Mengurangi potensi bias estimasi yang muncul akibat omitted variable bias,

dengan memasukkan komponen waktu dan individu secara eksplisit ke dalam model.

Model regresi panel dasar yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots \beta_K X_{Kit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

- a. Y_{it} : Tingkat kemiskinan di provinsi i pada waktu t ,
- b. X_{kit} : Variabel bebas ke- k untuk unit i pada waktu t ,
- c. β_K : Koefisien parameter dari masing-masing variabel bebas,
- d. μ_{it} : Komponen error gabungan.

Terdapat tiga model utama dalam analisis regresi panel yang akan dibandingkan dan diuji kelayakannya, yaitu Pooled Least Squares (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

3.3.1.1. Pooled Least Square (PLS)

Model PLS atau common effect model mengasumsikan bahwa semua unit analisis (provinsi/kabupaten) dan semua periode waktu memiliki karakteristik yang sama, sehingga tidak mempertimbangkan efek individual maupun waktu. Model ini sederhana dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding terhadap dua model lainnya.

Namun demikian, PLS tidak mampu mengakomodasi variabel-variabel spesifik yang tidak dapat diamati tetapi bersifat tetap antar unit analisis (unobserved heterogeneity). Oleh karena itu, model ini sering kali menghasilkan estimasi yang bias ketika asumsi homogenitas tidak terpenuhi (Gujarati & Porter, 2009).

3.3.1.2. Fixed Effect Model (FEM)

Model fixed effects memperhitungkan perbedaan spesifik antar-wilayah yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dianggap konstan dari waktu ke waktu. Model ini berguna jika ada karakteristik wilayah tertentu (seperti kebijakan daerah, iklim ekonomi) yang tidak tercermin dalam variabel independen tetapi tetap memengaruhi kemiskinan. Kelebihan dari model fix effect ini dapat mengatasi heterogenitas antar- wilayah, dengan memfokuskan pada perubahan dalam setiap wilayah dari waktu ke waktu.

Spesifikasi Model:

$$KMK_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 ZA_{it} + \beta_7 JA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

$$KMD_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 ZA_{it} + \beta_7 DD_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

Dalam model ini, α_{it} adalah intercept yang berbeda untuk setiap wilayah

3.3.1.3. Random Effect Model (REM)

Model random effects mengasumsikan bahwa perbedaan antar-wilayah bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Ini memungkinkan untuk menangkap variasi antar-wilayah dan antar-waktu secara lebih efisien dibandingkan model fixed effects.

Kelebihan dari model ini yakni efisien dalam hal estimasi jika asumsi model terpenuhi (tidak ada korelasi antara variabel independen dan perbedaan individu yang tidak terukur).

Spesifikasi Model:

$$KMK_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 ZA_{it} + \beta_7 JA_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4)$$

$$KMD_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 BS_{it} + \beta_5 ZA_{it} + \beta_7 DD_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (5)$$

Di mana μ_{it} adalah term error spesifik wilayah yang bersifat acak

3.3.2. Pilihan Model Uji Statistik

Dalam penelitian ini, pendekatan data panel digunakan karena mencakup dimensi waktu dan entitas lintas wilayah (provinsi atau kabupaten/kota), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan model estimasi terbaik di antara tiga pendekatan utama, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model estimasi ini akan dilakukan melalui beberapa uji statistik, yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM).

3.3.2.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Pooled Least Square (PLS)*. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, maka model FEM dianggap lebih sesuai karena terdapat perbedaan karakteristik antar unit *cross section* (dalam hal ini provinsi atau kabupaten/kota) yang perlu diperhitungkan secara spesifik.

3.3.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Uji ini memeriksa apakah error individual (unit spesifik) berkorelasi dengan variabel independen. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka FEM adalah model yang lebih tepat karena terdapat korelasi antara efek individual dan variabel bebas. Sebaliknya, jika $> 0,05$, maka REM dapat digunakan karena tidak ada korelasi yang signifikan.

3.3.2.3. Uji Breusch-Pagan (LM)

Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih antara Pooled Least Square dan Random Effect Model. Apabila nilai p-value $< 0,05$, maka REM lebih tepat dibandingkan PLS karena efek acak lebih dominan dalam data panel.

Penggunaan ketiga uji ini memungkinkan peneliti untuk memilih model estimasi terbaik yang sesuai dengan struktur data dan karakteristik variabel, sehingga hasil estimasi lebih valid dan dapat diandalkan untuk menjawab hipotesis penelitian.

Tabel 3 2 Rangkuman Pilihan Model Uji Statistik

No	Jenis Uji Statistik	Tujuan Uji	Model yang Diuji	Kriteria Pengambilan Keputusan
1	Uji Chow	Menentukan apakah FEM lebih baik dari PLS	Pooled Least Square vs Fixed Effect	Jika p-value $< 0,05 \rightarrow$ gunakan Fixed Effect Model
2	Uji Hausman	Menentukan model terbaik antara FEM dan REM	Fixed Effect vs Random Effect	Jika p-value $< 0,05 \rightarrow$ gunakan Fixed Effect Model
3	Uji Breusch-	Menentukan apakah REM	Pooled Least Square vs	Jika p-value $< 0,05 \rightarrow$ gunakan Random

No	Jenis Uji Statistik	Tujuan Uji	Model yang Diuji	Kriteria Pengambilan Keputusan
	Pagan (LM Test)	lebih tepat dibandingkan PLS	Random Effect	Effect Model

3.3.3. Interpretasi dan Uji Hipotesis

Interpretasi dan pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil estimasi model regresi data panel dengan mempertimbangkan hasil uji pemilihan model terbaik sebelumnya (FEM/REM/PLS). Pengujian ini bertujuan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

3.3.3.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, bantuan sosial, zakat, panjang jalan aspal, dan dana desa) berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan secara individu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) terhadap tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$).

- Jika $p\text{-value} < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak $\rightarrow$ variabel berpengaruh signifikan
- Jika $p\text{-value} \geq 0,05 \rightarrow H_0$ diterima $\rightarrow$ variabel tidak berpengaruh signifikan

3.3.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kemiskinan.

- Jika $p\text{-value } F < 0,05 \rightarrow$ model signifikan secara simultan
- Jika $p\text{-value } F \geq 0,05 \rightarrow$ model tidak signifikan secara simultan

3.3.3.3. Koefisien Determinasi (R^2 dan Adjusted R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan salah satu ukuran utama dalam regresi untuk menilai variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Secara matematis, R^2 dihitung sebagai proporsi antara variasi yang dijelaskan oleh model dengan total variasi yang ada pada variabel dependen. Dengan demikian, semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan variasi data yang diamati. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan hampir seluruh variasi data, sedangkan nilai mendekati 0 mengindikasikan model kurang mampu menjelaskan fenomena yang diteliti (Gujarati & Porter, 2009).

Namun, penggunaan R^2 memiliki keterbatasan karena nilainya akan selalu meningkat atau setidaknya tidak berkurang setiap kali variabel baru ditambahkan ke dalam model, meskipun variabel tersebut tidak signifikan secara statistik. Untuk mengatasi kelemahan ini, digunakanlah koefisien determinasi terkoreksi atau Adjusted R^2 . Berbeda dengan R^2 , nilai Adjusted R^2 memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kecocokan model. Nilai ini bahkan dapat menurun apabila variabel tambahan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap model, sehingga Adjusted R^2 dianggap lebih tepat digunakan ketika membandingkan dua atau lebih model dengan jumlah prediktor yang berbeda (Stock & Watson, 2019).

Dalam konteks analisis data panel, ukuran koefisien determinasi menjadi lebih kompleks karena adanya dimensi waktu dan individu. Perangkat analisis panel seringkali melaporkan tiga jenis nilai R^2 , yaitu within R^2 , between R^2 , dan overall

R^2 . Within R^2 mengukur seberapa besar variasi di dalam masing-masing unit (misalnya, perubahan kemiskinan dalam satu daerah dari waktu ke waktu) dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sementara itu, between R^2 menekankan pada perbedaan rata-rata antar unit (misalnya, perbedaan rata-rata tingkat kemiskinan antar daerah). Adapun overall R^2 memberikan gambaran umum yang mirip dengan R^2 pada data gabungan (pooled regression) (Hsiao, 2014; Baltagi, 2021).

Dengan demikian, baik R^2 maupun Adjusted R^2 memiliki fungsi penting dalam menilai kualitas model regresi. R^2 memberikan informasi dasar mengenai proporsi variasi yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan Adjusted R^2 menambahkan dimensi evaluasi yang lebih ketat dengan memperhitungkan kompleksitas model. Dalam studi sosial ekonomi seperti analisis kemiskinan, nilai R^2 yang moderat sudah dapat dianggap wajar mengingat kompleksitas faktor penyebab yang tidak sepenuhnya terukur oleh variabel penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada kemiskinan di Indonesia dengan membedakan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Objek penelitian mencakup 38 provinsi di Indonesia selama periode 2013–2024, ditambah satu entitas agregat nasional, sehingga total unit analisis mencapai 39 entitas wilayah. Untuk menangkap dinamika perbedaan kondisi antara perkotaan dan perdesaan, masing-masing entitas wilayah kemudian dibagi ke dalam dua kategori, menghasilkan 78 unit analisis. Dengan cakupan periode 11 tahun, jumlah total observasi potensial adalah 936. Namun, setelah dilakukan penyaringan data untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi, terdapat 88 observasi yang tidak dapat digunakan sehingga jumlah akhir observasi yang layak dianalisis adalah 770. Data ini dianalisis menggunakan pendekatan regresi data panel yang memungkinkan integrasi antara dimensi lintas wilayah (*cross section*) dan dimensi waktu (*Time Series*), sehingga hasil analisis lebih mampu menangkap dinamika kemiskinan secara utuh (Baltagi, 2005).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan, yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin menurut garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2024). Sementara itu, variabel independen meliputi beberapa faktor makroekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Produk Domestik Regional bruto (PDRB) digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi digunakan sebagai proksi stabilitas harga, dan tingkat pengangguran sebagai gambaran kondisi pasar tenaga kerja (World Bank, 2023). Selain itu, bantuan sosial dan zakat dimasukkan untuk merepresentasikan intervensi sosial dari pemerintah maupun lembaga keagamaan dalam mengurangi beban kemiskinan (BAZNAS, 2022; Kementerian Sosial RI, 2023). Untuk mengukur aspek infrastruktur, digunakan indikator panjang jalan aspal yang menggambarkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, sedangkan dana desa merepresentasikan transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Dengan kerangka penelitian tersebut, diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pemisahan model analisis antara dua kategori wilayah ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi determinan kemiskinan yang bersifat spesifik dan unik di masing-masing konteks. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi pembangunan, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Tabel 4 1 Rincian Unit Analisis, Observasi, dan Variabel Penelitian

No	Deskripsi Unit Analisis	Jumlah
1	Jumlah provinsi yang dianalisis dalam penelitian (periode 2013–2024)	38
2	Penambahan satu entitas agregat pada skala nasional	1
3	Total unit wilayah berdasarkan kategori perkotaan dan perdesaan (2 kategori $\times$ 39 entitas wilayah)	$2 \times 39 = 78$
4	Jumlah total observasi berdasarkan data tahunan selama 11 tahun (2013–2023)	$78 \times 11 = 858$
5	Jumlah observasi yang tidak memenuhi kelengkapan data selama periode penelitian	(88)
6	Jumlah observasi yang layak dianalisis setelah proses penyaringan data	770
	Total observasi akhir yang digunakan dalam model analisis data panel	770

Dengan menyajikan rincian unit analisis sekaligus variabel penelitian dalam satu tabel ringkasan, penelitian ini memberikan kejelasan mengenai cakupan data, sumber, serta indikator yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan transparansi metodologis sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami rancangan penelitian secara komprehensif.

Dari sisi substansi data, terdapat variasi penting yang perlu digaris bawahi. Secara umum, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan selama periode pengamatan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya merata antara kota dan desa. Variabel PDRB menunjukkan bahwa rata-rata PDRB per kapita wilayah kota lebih tinggi, namun tidak serta-merta menurunkan kemiskinan jika tidak disertai pemerataan pendapatan. Tingkat pengangguran juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama pada wilayah perkotaan yang lebih dinamis dari segi mobilitas kerja.

Sementara itu, bantuan sosial dan zakat menjadi dua instrumen sosial yang cukup dominan dalam mendukung kelompok masyarakat miskin. Data menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial dan zakat lebih banyak mengalir ke wilayah perdesaan, mengindikasikan adanya perhatian khusus terhadap wilayah tersebut oleh pemerintah maupun lembaga sosial. Khusus untuk dana desa, variabel ini hanya berlaku pada wilayah perdesaan dan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan pelaksanaan kebijakan Dana Desa sejak tahun 2015.

Secara keseluruhan, karakteristik data dalam penelitian ini menggambarkan realitas ekonomi dan sosial yang kompleks dan beragam antara wilayah kota dan desa. Oleh karena itu, pendekatan pemisahan model antara kota dan desa menjadi sangat penting agar hasil analisis mampu memberikan gambaran yang kontekstual dan relevan untuk masing-masing wilayah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang berbasis bukti dalam upaya pengentasan kemiskinan secara lebih efektif di Indonesia.

4.2. Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan tahap awal yang esensial dalam penelitian kuantitatif, khususnya penelitian berbasis data panel, karena berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data sebelum dilakukan estimasi model ekonometrika. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola umum, tingkat variasi, serta distribusi masing-masing variabel penelitian, baik antarwilayah maupun antarperiode waktu. Informasi mengenai nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi menjadi dasar penting dalam memahami tingkat

heterogenitas data serta potensi perbedaan karakteristik struktural antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010).

Selain itu, analisis deskriptif berperan sebagai jembatan konseptual antara deskripsi objek penelitian dan analisis inferensial, sehingga hasil estimasi model tidak terlepas dari konteks empiris data yang dianalisis. Dalam penelitian kemiskinan, analisis deskriptif membantu menjelaskan mengapa variabel-variabel makroekonomi, bantuan sosial, serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dapat menunjukkan pengaruh yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, analisis deskriptif tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi landasan empiris yang memperkuat interpretasi hasil estimasi dan pembahasan pada tahap analisis selanjutnya.

Berdasarkan struktur data panel dan data bersih (clean data) yang telah dijelaskan pada deskripsi objek penelitian pada analisis deskriptif ini disusun berdasarkan data yang dikelompokkan ke dalam dua kategori wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai karakteristik data penelitian, hasil uji statistik deskriptif masing-masing variabel di wilayah perkotaan dan pedesaan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian di Wilayah Perkotaan

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev	Observations
Tingkat Kemiskinan Perkotaan	0.0419	-0.0101	-1.3471	1.3987	0.5336	261
Pertumbuhan Ekonomi	0.3036	0.2469	-1.4697	2.6824	0.9968	261
Inflasi	0.9580	0.9361	0.1823	1.8718	0.3347	261
Pengangguran	1.5011	1.5074	0.0050	2.1782	0.3308	261
Bantuan Sosial	26.9284	27.1999	23.0506	29.7450	1.3686	261
Zakat	23.4543	23.4073	15.0358	28.0098	1.9098	261
Panjang Jalan Aspal	9.3003	9.2203	7.9963	10.6204	0.6445	261

Sumber : Hasil Olah data penulis

Tabel 4 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian di Wilayah Pedesaan

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev	Observations
Tingkat Kemiskinan Pedesaan	0.6433	0.7129	-1.1712	2.4150	0.5910	261
Pertumbuhan Ekonomi	0.3036	0.2469	-1.4697	2.6824	0.9968	261
Inflasi	0.9580	0.9361	0.1823	1.8718	0.3347	261
Pengangguran	1.5011	1.5074	0.0050	2.1782	0.3308	261
Bantuan Sosial	26.9284	27.1999	23.0506	29.7450	1.3686	261
Zakat	23.4543	23.4073	15.0358	28.0098	1.9098	261
Dana Desa	4.5724	4.5708	4.1802	5.0911	0.1583	261
Panjang Jalan Aspal	9.3003	9.2203	7.9963	10.6204	0.6445	261

Sumber: Hasil olah data penulis

Data ini menyajikan hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian di wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara umum, tingkat kemiskinan rata-rata di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, yang tercermin dari nilai mean dan median kemiskinan pedesaan yang lebih besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan bersifat lebih persisten dibandingkan wilayah perkotaan, sejalan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik.

Nilai standar deviasi pada variabel kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarwilayah dan antarperiode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya heterogenitas karakteristik sosial ekonomi daerah, yang menjadi dasar metodologis penting dalam penggunaan model data panel serta pemisahan analisis antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran, secara deskriptif menunjukkan pola statistik yang relatif serupa antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian, perbedaan tingkat dan karakteristik kemiskinan menunjukkan bahwa mekanisme transmisi variabel-variabel makroekonomi terhadap kemiskinan tidak bersifat homogen antarwilayah, sehingga dampaknya perlu dianalisis secara terpisah.

Bantuan sosial dan zakat secara deskriptif memperlihatkan variasi yang cukup besar, terutama pada nilai minimum dan maksimum, yang mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta kapasitas kelembagaan pengelolaan zakat antarwilayah. Sementara itu, variabel dana desa dan panjang jalan beraspal mencerminkan upaya pembangunan wilayah pedesaan yang berpotensi meningkatkan akses ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini memperkuat argumentasi bahwa determinan kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, analisis empiris pada tahap selanjutnya dilakukan dengan menggunakan model yang terpisah untuk masing-masing wilayah, guna memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dan kontekstual.

4.3. Analisis data

4.3.1. Estimasi Model Data Panel

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi tiga model utama, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model paling tepat yang merepresentasikan hubungan antarvariabel dalam konteks data panel, yang terdiri atas kombinasi data *cross section* dan *time series*. Untuk menentukan model terbaik, digunakan tiga jenis pengujian, yakni uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

4.3.1.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Adapun dasar pengambilan Keputusan pemilihan model, Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang sesuai untuk digunakan adalah *common effect model*.

1. Data Panel Kota

Tabel 4 4 Uji Chow Data Panel Kota

UJI CHOW				
Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		1.767	-28,22	0.0129
Cross-section Chi-square		51.892	28	0.0039

Berdasarkan hasil uji *Redundant Fixed Effects* yang ditampilkan, diketahui bahwa nilai statistik F sebesar 1.767 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar

0.0129, dan nilai Chi-square sebesar 51.892 dengan p-value sebesar 0.0039. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga menunjukkan bahwa model dengan efek tetap (*fixed effect*) secara statistik lebih baik dibandingkan dengan model tanpa efek tetap (*common effect*). Artinya, perbedaan karakteristik antar *cross section* (dalam hal ini desa atau kota) signifikan dan perlu dimasukkan dalam model melalui pendekatan efek tetap. Dengan demikian, model *fixed effect* layak digunakan dalam penelitian ini karena mampu menangkap pengaruh spesifik masing-masing unit observasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen saja. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan model *fixed effect* memberikan estimasi yang lebih akurat dan sesuai dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel makroekonomi, bantuan sosial, dan zakat terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah.

2. Data Panel Desa

Tabel 4 5 Uji Chow Data Panel Desa

UJI CHOW			
Redundant Fixed Effects Tests			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.054	-28,225	0.3974
Cross-section Chi-square	32.167	28	0.2677

Berdasarkan hasil Redundant *Fixed Effects Test* yang disajikan, diketahui bahwa nilai Cross-section F sebesar 1.054 dengan p-value sebesar 0.3974 (> 0.05), dan nilai Cross-section Chi-square sebesar 32.167 dengan p-value sebesar 0.2677 (> 0.05). Karena kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar unit *cross section* (dalam hal ini desa). Dengan kata lain, model

tanpa efek tetap (*common effect*) dianggap cukup baik dan tidak diperlukan penggunaan model *fixed effect* untuk data panel desa.

Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing desa dalam sampel tidak memberikan pengaruh signifikan yang membedakan satu desa dengan desa lainnya terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, model yang lebih tepat untuk digunakan dalam analisis data panel desa adalah model *common effect* karena lebih sederhana dan efisien tanpa kehilangan ketepatan estimasi.

4.3.1.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan dalam menentukan model yang paling sesuai untuk digunakan antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Adapun dasar pengambilan Keputusan pemilihan model, apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*, apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

1. Data Panel Kota

Tabel 4 6 Uji Hausman Data Panel Kota

UJI HAUSMAN			
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.847	7	0.054

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada data panel kota, diperoleh nilai *Chi Square statistic* sebesar 13.847 dengan derajat kebebasan (df) 7 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.054. Nilai probabilitas ini sedikit lebih besar dari ambang signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), namun sangat mendekati batas tersebut.

Dengan demikian, hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya perbedaan signifikan antara model *fixed effect* dan *random effect*, meskipun signifikansinya masih berada pada batas kritis. Secara konservatif, karena nilai p-value berada tepat di sekitar ambang batas, sebagian besar literatur dan praktik ekonometrika menyarankan untuk menggunakan model *fixed effect* dalam kasus seperti ini, untuk menghindari potensi bias akibat korelasi antara variabel independen dan efek individu.

Artinya, perbedaan karakteristik antar kota dalam data panel ini kemungkinan berkorelasi dengan variabel independen dalam model, sehingga pendekatan *fixed effect* lebih sesuai untuk menangkap variasi spesifik tiap kota dan memberikan estimasi yang lebih konsisten dalam menjelaskan determinan kemiskinan di wilayah perkotaan.

2. Data Panel Desa

Tabel 4 7 Uji Hausman Data Panel Desa

Uji Hausman			
Correlated Random Effects -Hausman Test			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.594008	7	0.2831

Berdasarkan hasil Uji Hausman data panel desa, diperoleh nilai Chi-Square statistic sebesar 8.594 dengan derajat kebebasan (df) 7 dan nilai probabilitas (p-

value) sebesar 0.2831 (> 0.05). Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H_0 , yang berarti model *random effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *fixed effect*.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, diasumsikan bahwa perbedaan antar desa bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Penggunaan model *random effect* menjadi pilihan yang sesuai untuk data panel desa karena mampu memberikan estimasi yang efisien tanpa mengorbankan konsistensi, serta mempertimbangkan variasi antar individu (desa) sebagai komponen yang tidak perlu dimodelkan secara eksplisit dalam bentuk efek tetap.

4.3.1.3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan dalam menentukan model yang paling sesuai untuk digunakan antara *random effect model* dengan *common effect model*. Dengan dasar pengambilan keputusan pemilihan model apabila nilai probabilitas < 0.05 maka model yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model* dan apabila nilai probabilitas > 0.05 maka model yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*.

4.3.1.3.1. Data Panel Kota

Tabel 4 8 Uji Lagrange Multiplier Data Panel Kota

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided			
Test Hypothesis			
Breusch-Pagan	Cross-section	Time	Both
	0.009194	2.249014	2.258208
	-0.9236	-0.1337	-0.1329

Honda	-0.09589	-1.49967	-1.12823
	-0.5382	-0.9332	-0.8704
King-Wu	-0.09589	-1.49967	-1.36779
	-0.5382	-0.9332	-0.9143
Standardized Honda	0.279714	-1.35143	-5.54004
	-0.3898	-0.9117	-1
Standardized King-Wu	0.279714	-1.35143	-5.18345
	-0.3898	-0.9117	-1
Gourieroux, et al.	--	--	0
			-1

Berdasarkan hasil *Uji Lagrange Multiplier* untuk data panel kota, terlihat bahwa seluruh nilai probabilitas (p-value) dari berbagai metode uji, seperti *Breusch-Pagan*, *Honda*, *King-Wu*, *Standardized Honda*, dan *Standardized King-Wu*, semuanya memiliki nilai > 0.05 . Contohnya, pada uji Breusch-Pagan, nilai statistik untuk efek gabungan (both) adalah 2.258 dengan p-value sebesar -0.1329, yang secara teknis tidak signifikan dan menunjukkan bahwa tidak terdapat efek individual secara signifikan dalam model panel.

Dengan kata lain, hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar unit *cross section* kota maupun *time series* dalam menjelaskan variabel dependen. Maka, sesuai dengan pedoman umum dalam penggunaan uji LM, ketika p-value > 0.05 maka model panel tidak menunjukkan keunggulan dibandingkan model regresi biasa, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah model *Common Effect* atau *Pooled OLS*.

Model *Common Effect* (atau *Pooled Regression*) mengasumsikan bahwa struktur data panel tidak mengandung perbedaan karakteristik yang signifikan antara *cross-section* maupun *time-series*, sehingga satu model regresi linear dapat digunakan untuk seluruh observasi. Dengan demikian, pada penelitian ini, model *Common Effect* dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan

pengaruh variabel-variabel independen terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kota.

4.3.1.3.2. Data Panel Desa

Tabel 4 9 Uji Lagrange Multiplier Data Panel Desa

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided			
Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.441822	1.919394	5.361217
	-0.0636	-0.1659	-0.0206
Honda	1.855215	-1.385422	0.332194
	-0.0318	-0.917	-0.3699
King-Wu	1.855215	-1.385422	-0.347271
	-0.0318	-0.917	-0.6358
Standardized Honda	2.342876	-1.232084	-3.956773
	-0.0096	-0.891	-1
Standardized King-Wu	2.342876	-1.232084	-4.086921
	-0.0096	-0.891	-1
Gourieroux, et al.	--	--	3.441822
			-0.0765

Berdasarkan hasil *Uji Lagrange Multiplier* untuk data panel desa, diketahui bahwa model diuji terhadap hipotesis nol (null hypothesis) yaitu tidak ada efek individual baik itu efek antar *cross section* maupun *time series*. Dari berbagai metode pengujian yang digunakan seperti Breusch-Pagan, Honda, King- Wu, dan versi standarnya hampir seluruh metode memberikan hasil nilai probabilitas (p-value) < 0.05 , khususnya pada pengujian cross-section.

Hasil uji Breusch-Pagan menunjukkan statistik untuk efek gabungan sebesar 5.361 dengan p-value -0.0206, dan untuk efek cross-section saja sebesar 3.442 dengan p-value -0.0636. Meskipun beberapa nilai p-value ditampilkan dalam

bentuk negatif interpretasi tetap didasarkan pada nilai statistik uji dan signifikansinya.

Lebih jelas terlihat pada uji Standardized Honda dan Standardized King-Wu, di mana nilai statistik cross-section masing-masing sebesar 2.342876 dengan p-value 0.0096, menunjukkan bahwa efek individu antar cross-section signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar unit cross-section (desa) dalam memengaruhi variabel dependen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sebaiknya bukan model *Common Effect*, tetapi model *Random Effect* atau *Fixed Effect*. Untuk menentukan pilihan lebih lanjut antara *fixed* dan *random effect*, diperlukan uji Hausman, tetapi pada tahap ini, hasil LM menunjukkan bahwa model panel lebih cocok digunakan dibandingkan pooled OLS, karena data panel menunjukkan adanya variasi signifikan antar unit desa.

Untuk memperoleh model estimasi yang paling sesuai dalam analisis data panel, penelitian ini terlebih dahulu melakukan serangkaian uji pemilihan model, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji-uji tersebut digunakan untuk membandingkan kelayakan model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), sehingga dapat ditentukan model akhir yang paling tepat digunakan baik pada data panel perkotaan maupun perdesaan. Ringkasan hasil uji pemilihan model disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 10 Ringkasan Uji Pemilihan Model Data Panel

Jenis Uji	Panel Kota (Perkotaan)	Panel Desa (Perdesaan)
<i>Uji Chow</i>	Prob. F = 0,0129 < 0,05 → FEM lebih tepat dibandingkan CEM	Prob. F = 0,3974 > 0,05 → CEM lebih tepat dibanding FEM
<i>Uji Hausman</i>	Prob. = 0,054 → FEM lebih sesuai (konsisten dengan Uji Chow)	Prob. = 0,2831 > 0,05 → REM lebih sesuai dibandingkan FEM
<i>Uji Lagrange Multiplier</i>	Tidak signifikan → FEM tetap dipilih	Prob. Both = 0,0206 < 0,05 → REM lebih tepat dibandingkan CEM
Model Akhir	FEM (Fixed Effect Model)	REM (Random Effect Model)

Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap kategori wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, menunjukkan kecenderungan model yang berbeda. Pada panel perkotaan, hasil *Uji Chow* mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* lebih tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model (CEM)*. Selanjutnya, *Uji Hausman* mendukung pilihan *Fixed Effect Model* dengan nilai probabilitas yang mendekati ambang batas 0,05, sehingga memperkuat argumen bahwa variasi antar provinsi di wilayah perkotaan perlu ditangkap melalui efek tetap. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa *Fixed Effect Model* lebih mampu merepresentasikan heterogenitas yang tidak dapat diamati secara langsung (Baltagi, 2021).

Sementara itu, pada panel perdesaan, hasil *Uji Chow* tidak menunjukkan signifikansi, sehingga *Common Effect Model* pada awalnya dianggap memadai. Namun, *Uji Hausman* memberikan hasil bahwa *Random Effect Model* lebih sesuai dibandingkan *Fixed Effect Model*, dengan didukung pula oleh hasil *Uji Lagrange Multiplier* yang signifikan, sehingga memperkuat pilihan REM sebagai model akhir untuk data panel perdesaan. Pilihan ini konsisten dengan pandangan Gujarati dan Porter (2020) bahwa REM

tepat digunakan ketika variasi antarindividu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan FEM sebagai model utama untuk data panel perkotaan, dan REM sebagai model utama untuk data panel perdesaan. Perbedaan model ini mencerminkan karakteristik unik dari masing-masing wilayah, di mana perkotaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor spesifik tiap provinsi, sedangkan perdesaan cenderung merefleksikan variasi acak antarwilayah. Hasil ini memberikan dasar metodologis yang kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi, bantuan sosial, zakat, serta faktor pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang harus dilakukan ketika menggunakan analisis regresi linier dalam suatu penelitian. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria sebagai *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)* sesuai dengan Teorema Gauss-Markov, sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten (Gujarati & Porter, 2009). Dengan terpenuhinya asumsi klasik, maka hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan secara lebih akurat serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan ilmiah yang valid.

Beberapa pengujian yang termasuk dalam uji asumsi klasik antara lain uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Jika terjadi multikolinearitas yang tinggi, maka koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan (homoskedastisitas), sehingga model tidak mengalami distorsi dalam estimasi dan hasil pengujian statistik tetap dapat dipercaya (Baltagi, 2008). Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka standar error menjadi bias dan dapat memengaruhi validitas uji hipotesis.

Selain itu, uji autokorelasi juga penting dilakukan, terutama pada analisis data panel dan data runtut waktu (time series), untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi antar residual pada periode yang berbeda. Jika autokorelasi terjadi, maka model regresi dapat menghasilkan estimasi yang kurang efisien dan mengurangi ketepatan prediksi. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menjamin bahwa model regresi yang digunakan benar-benar layak dan dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam penelitian dengan data panel, seperti kajian mengenai kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan, uji asumsi klasik menjadi semakin penting karena data yang digunakan merupakan gabungan antara data cross section dan time series. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan munculnya permasalahan statistik yang lebih kompleks dibandingkan regresi biasa. Oleh karena itu, pengujian asumsi klasik diperlukan agar model yang dipilih, baik Common Effect Model (CEM),

Fixed Effect Model (FEM), maupun Random Effect Model (REM), dapat menghasilkan estimasi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik data penelitian.

Selain untuk memastikan validitas model, uji asumsi klasik juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan metode perbaikan apabila ditemukan pelanggaran asumsi. Misalnya, jika terjadi heteroskedastisitas atau autokorelasi, peneliti dapat menggunakan pendekatan robust standard error atau metode estimasi lain yang lebih sesuai. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya kuat secara statistik tetapi juga lebih relevan dalam menjelaskan fenomena empiris yang diteliti. Hal ini sangat penting agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian, khususnya terkait pengentasan kemiskinan melalui variabel makro ekonomi, bantuan sosial, zakat, Dana Desa, dan infrastruktur, dapat disusun secara lebih akurat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, uji asumsi klasik menjadi tahapan yang sangat penting sebelum melakukan interpretasi hasil regresi, karena pelanggaran terhadap salah satu asumsi tersebut dapat memengaruhi keakuratan, reliabilitas, serta validitas model penelitian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengujian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi dasar dalam memastikan kualitas analisis empiris yang dilakukan.

4.3.2.1. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Deteksi multikolineritas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dinyatakan bebas dari multikolineritas apabila seluruh variabel independennya memiliki nilai $VIF < 10$.

1. Data Panel Kota

Tabel 4 11 Uji Multikolineritas Data Panel Kota

Uji Multikolineritas			
Variance Inflation Factors			
Included observations: 261			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
PDRB	0.001546	1.640144	1.500432
INFLASI	0.011235	11.34078	1.229588
PENGANGGURAN	0.009841	22.79566	1.051861
BANTUAN	0.000748	533.2122	1.368432
ZAKAT	0.000356	193.4443	1.269254
ASPAL	0.003146	268.0857	1.276509
C	0.79921	783.694	NA

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen dalam model memiliki nilai VIF terpusat (centered VIF) yang berada di bawah angka 10, antara lain: PDRB (1.500), Inflasi (1.229), Pengangguran (1.052), Bantuan Sosial (1.368), Zakat (1.269), dan Infrastruktur Jalan Aspal (1.276). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas dalam model.

2. Data Panel Desa

Tabel 4 12 Uji Multikolineritas Data Panel Desa

Uji Multikolineritas			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
PDRB	0.002	1.473	1.348
INFLASI	0.013	10.888	1.181
PENGANGGURAN	0.012	22.709	1.048
BANTUAN	0.001	554.245	1.422
ZAKAT	0.000	197.888	1.298
DANA DESA	0.001	248.999	1.194
C	0.743	597.241	NA

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai VIF terpusat (centered VIF) yang berada jauh di bawah angka 10, yaitu PDRB sebesar 1.348, Inflasi sebesar 1.181, Pengangguran sebesar 1.048, Bantuan Sosial sebesar 1.422, Zakat sebesar 1.298, dan Dana Desa sebesar 1.194. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model.

4.3.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari heteroskedastisitas. Jika nilai *probability* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai *probability* < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

1. Data Panel Kota

Tabel 4 13 Uji Heteroskedastisitas Data Panel Kota

Uji Heteroskedastisitas				
Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.3091	Prob. F(7,253)		0.2462
Obs*R-squared	9.1231	Prob. Chi-Square(7)		0.2439
Scaled explained SS	9.0018	Prob. Chi-Square(7)		0.2525
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.2342	0.6001	0.3902	0.6967
PDRB	-0.0560	0.0259	-2.1653	0.0313
INFLASI	0.0139	0.0696	0.1991	0.8423
PENGANGGURAN	-0.0037	0.0652	-0.0568	0.9548
BANTUAN	0.0143	0.0183	0.7796	0.4363
ZAKAT	-0.0075	0.0126	-0.5943	0.5528
ASPAL	0.0404	0.0375	1.0762	0.2829
R-squared	0.0349	Mean dependent var		0.4432
Uji Heteroskedastisitas				
Adjusted R-squared	0.008253718	S.D. dependent var		0.3402
S.E. of regression	0.338834783	Akaike info criterion		0.7035
Sum squared resid	29.04667966	Schwarz criterion		0.8128
Log likelihood	-83.8150394	Hannan-Quinn criter.		0.7474
F-statistic	1.30911806	Durbin-Watson stat		1.7561
Prob(F-statistic)	0.246245241			

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai Prob. F-statistic sebesar 0,2462, Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,2439, dan Prob. Scaled Explained SS sebesar 0,2525. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi panel ini. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa data bersifat homoskedastis diterima.

Meskipun secara individual terdapat satu variabel, yaitu PDRB, yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0313 ($< 0,05$), hal ini belum cukup untuk menyimpulkan adanya heteroskedastisitas karena secara keseluruhan model tidak menunjukkan gejala tersebut. Oleh karena itu, model regresi panel dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik homoskedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa perlu dilakukan perbaikan seperti transformasi data atau penggunaan regresi robust.

2. Data Panel Desa

Tabel 4 14 Uji Heteroskedastisitas Data Panel Desa

Uji Heteroskedastisitas				
Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	3.2001	Prob. F(7,253)		0.3328
Obs*R-squared	21.2298	Prob. Chi-Square(7)		0.3334
Uji Heteroskedastisitas				
Scaled explained SS	18.328	Prob. Chi-Square(7)		0.3105
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.6856	0.4991	1.3737	0.1708
PDRB	-0.0311	0.0215	-1.4451	0.1497
INFLASI	-0.0144	0.0579	-0.2494	0.8032
PENGANGGURAN	-0.0508	0.0542	-0.9373	0.3495
BANTUAN	0.0257	0.0152	1.6905	0.9216
ZAKAT	0.0145	0.0105	1.3847	0.1674
DANA DESA	-0.0429	0.0312	-1.3744	0.1705
R-squared	0.08134	Mean dependent var		0.418512
Adjusted R-squared	0.05592253	S.D. dependent var		0.290056
S.E. of regression	0.28182894	Akaike info criterion		0.335139
Sum squared resid	20.09517	Schwarz criterion		0.444396
Log likelihood	-35.735617	Hannan-Quinn criter.		0.379057
F-statistic	3.20016091	Durbin-Watson stat		1.950683
Prob(F-statistic)	0.00289039			

Berdasarkan hasil diperoleh nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0,3328, Probabilitas Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,3334, dan Probabilitas Scaled Explained SS sebesar 0,3106. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas diterima. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi klasik homoskedastisitas.

Selain itu, hasil pengujian terhadap masing-masing variabel independen seperti PDRB , Inflasi, Pengangguran, Bantuan Sosial, Zakat , dan Aspal Jalan menunjukkan nilai probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada variabel yang berkontribusi signifikan terhadap varians residual, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa model tidak mengandung heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi panel desa layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut tanpa perlu dilakukan transformasi data atau perbaikan menggunakan metode robust.

4.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan serial (autokorelasi) pada residual model regresi panel hingga 5 lag. Uji ini penting untuk memastikan bahwa asumsi klasik mengenai independensi residual terpenuhi, sehingga hasil estimasi dapat dipercaya.

1. Data Panel Kota

Tabel 4 15 Uji Autokorelasi Data Panel Kota

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 5 lags				
F-statistic	2.0532	Prob. F(5,248)		0.07190
Obs*R-squared	10.375	Prob. Chi-Square(5)		0.06527
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.3040	1.001	0.3037	0.76160
PDRB	0.0156	0.043	0.3593	0.71962
INFLASI	0.0201	0.116	0.1737	0.86224
PENGANGGURAN	0.0078	0.110	0.0708	0.94359
BANTUAN	-0.0089	0.030	-0.2905	0.77160
ZAKAT	0.0008	0.020	0.03852	0.96930
ASPAL	-0.002	0.063	-0.0453	0.96386
RESID(-1)	0.1297	0.065	1.99086	0.04759
RESID(-2)	0.1224	0.065	1.87223	0.06235
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 5 lags				
R-squared	0.03975	Mean dependent var		0.00000
Adjusted R-squared	-0.006	S.D. dependent var		0.5594
S.E. of regression	0.5613	Akaike info criterion		1.7314
Sum squared resid	78.137	Schwarz criterion		1.9089
Log likelihood	-212.95	Hannan-Quinn criter.		1.8028
F-statistic	0.8555	Durbin-Watson stat		2.0021
Prob(F-statistic)	0.5930			

Berdasarkan hasil yang ditampilkan diperoleh nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0,0719 dan Probabilitas Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,0653. Kedua nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, yaitu tidak terdapat autokorelasi hingga 5 lag dalam model regresi. Artinya, residual dari model bersifat independen dan tidak saling berkorelasi secara serial.

Selain itu, nilai Durbin-Watson statistic sebesar 2,002 juga berada sangat dekat dengan angka 2, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif

maupun negatif dalam residual. Dengan demikian, model regresi data panel desa dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik terkait tidak adanya autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa perlu dilakukan koreksi terhadap error terms.

2. Data Panel Desa

Tabel 4 16 Uji Autokorelasi Data Panel Desa

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	2.1129	Prob.F(2,251)	0.1230	
Obs*R-squared	4.3215	Prob. Chi-Square(2)	0.1152386	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.4367	0.9390	0.4651	0.6423
PDRB	0.0026	0.0397	0.0645	0.9486
INFLASI	0.0128	0.1061	0.1203	0.9044
PENGANGGURAN	-0.0082	0.0997	-0.0820	0.9347
BANTUAN	-0.0177	0.0292	-0.6055	0.5454
ZAKAT	0.0087	0.0196	0.4430	0.6581
DANA DESA	-0.0135	0.0577	-0.2337	0.8154
RESID(-1)	0.1312	0.0675	1.9434	0.0531
RESID(-2)	-0.0590	0.0648	-0.9104	0.3635
R-squared	0.01655747	Mean dependent var		1.09E-15
Adjusted R-squared	-0.0187054	S.D. dependent var		0.50986
S.E. of regression	0.51460737	Akaike info criterion		1.54673
Sum squared resid	66.4700061	Schwarz criterion		1.68330
Log likelihood	-191.84902	Hannan-Quinn criter.		1.60163
F-statistic	0.46954403	Durbin-Watson stat		2.01512
Prob(F-statistic)	0.89428288			

Berdasarkan hasil yang ditampilkan diperoleh nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0,1230 dan Probabilitas Chi-Square ($\text{Obs} \times \text{R-squared}$) sebesar 0,1152. Kedua nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi hingga lag ke-2 dapat diterima. Dengan kata lain, model regresi panel desa tidak mengalami masalah autokorelasi, dan residual model bersifat acak atau tidak saling berkorelasi secara sistematis antar waktu.

Selain itu, nilai Durbin-Watson statistic sebesar 2,0151 berada sangat dekat dengan angka 2, yang juga menunjukkan tidak adanya autokorelasi, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi klasik terkait independensi residual, dan dapat digunakan lebih lanjut untuk pengambilan kesimpulan tanpa perlu dilakukan koreksi terhadap error.

Tabel 4 17 Kesimpulan Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji Asumsi Klasik	Panel Kota	Panel Desa	Kesimpulan Umum
Multikolinearitas	Centered VIF < 10 untuk semua variable	Centered VIF < 10 untuk semua variable	Tidak ada indikasi multikolinearitas serius
Heteroskedastisitas	Prob. F (0,246) > 0,05 → Tidak ada heteroskedastisitas	Prob. F (0,333) > 0,05 → Tidak ada Heteroskedastisitas	Kedua model lolos uji heteroskedastisitas
Autokorelasi	Prob. Chi-Square (0,065) > 0,05 → Tidak ada Autokorelasi	Prob. Chi-Square (0,115) > 0,05 → Tidak ada Autokorelasi	Kedua model lolos uji autokorelasi

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap data panel kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik. Uji multikolinearitas juga tidak menunjukkan masalah serius karena seluruh nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*

< 10. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas Glejser menghasilkan probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Terakhir, hasil uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey LM Test juga memperlihatkan probabilitas lebih besar dari 0,05 dengan nilai Durbin-Watson mendekati 2, yang menandakan model bebas dari autokorelasi.

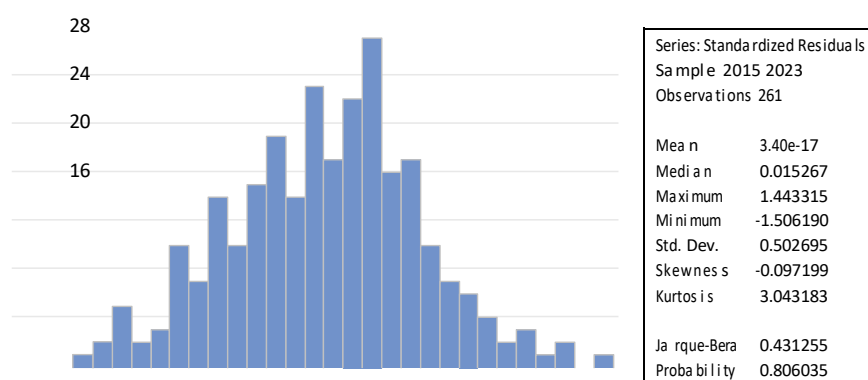
Dengan demikian, baik model regresi panel kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis, karena seluruh asumsi dasar regresi linear terpenuhi (Gujarati et al, 2009; Wooldridge, 2016).

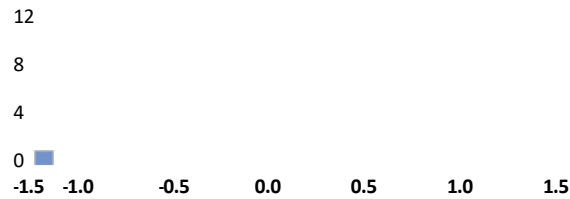
4.3.3. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas Residual dilakukan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal, yang penting untuk validitas uji signifikansi (Jarque-Berra, 2018). Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat menyebabkan bias dalam estimasi (Wooldridge, 2016).

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam sampel berdistribusi normal dan dapat mewakili populasi. Pengujian ini menggunakan metode grafik histogram dan uji statistik *Jarque-Bera*. Jika nilai statistik Jarque-Bera < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal, jika nilai statistik *Jarque-Bera* > 0,05 maka data terdistribusi normal.

1. Grafik Jarque-Bera Data Panel Kota





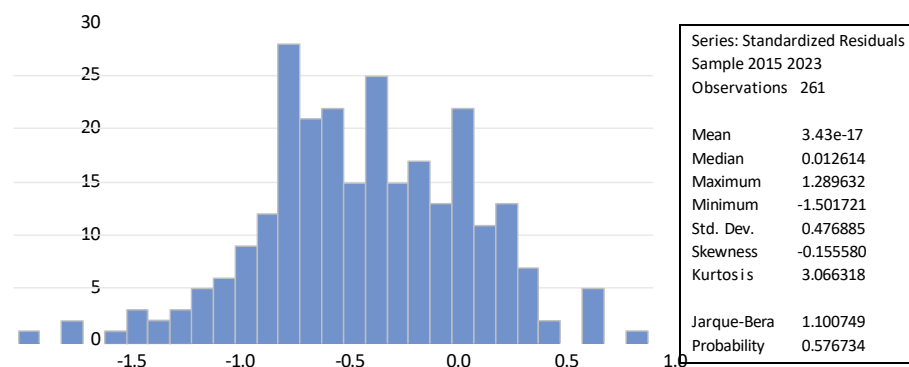
Gambar 4.1 Grafik Statistik Jarque-bera Data Panel Kota

Uji Jarque–Bera secara formal digunakan untuk menguji apakah distribusi residual memenuhi asumsi normalitas dengan mengombinasikan dua momen statistik utama, yaitu skewness (kemencengan) dan kurtosis (keruncingan). Dalam konteks regresi data panel, khususnya ketika analisis bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik *t* dan *F*, asumsi normalitas residual menjadi penting agar inferensi statistik yang dihasilkan bersifat valid dan tidak bias. Meskipun estimator seperti *Fixed Effect Model* bersifat *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*) tanpa mensyaratkan normalitas secara ketat, normalitas residual tetap diperlukan untuk keandalan pengujian signifikansi parameter, terutama pada ukuran sampel yang terbatas.

Hasil uji Jarque–Bera pada model data panel kota menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,806035, yang secara signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol yang menyatakan residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, secara statistik tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa residual menyimpang dari distribusi normal. Temuan ini memperkuat hasil visual pada histogram yang menunjukkan distribusi residual yang seimbang dan tidak mengalami distorsi distribusi yang serius.

Terpenuhinya asumsi normalitas residual ini memiliki implikasi metodologis yang penting. Pertama, hasil estimasi koefisien regresi dan pengujian hipotesis parsial (uji t) maupun simultan (uji F) pada model data panel perkotaan dapat diinterpretasikan secara sah. Kedua, validitas kesimpulan mengenai pengaruh variabel makroekonomi, bantuan sosial, zakat, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan menjadi lebih kuat karena tidak dipengaruhi oleh masalah distribusi error yang tidak normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinilai layak dan memenuhi salah satu asumsi klasik utama, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan inferensi statistik dan pembahasan kebijakan secara ilmiah.

2. Grafik Jarque-bera Data Panel Desa



Gambar 4 2 Grafik Statistik Jarque-bera Data Panel Desa

Grafik uji statistik Jarque-bera untuk residual model regresi data panel wilayah perdesaan, yang digunakan untuk mengevaluasi terpenuhinya asumsi normalitas residual. Secara visual, histogram residual menunjukkan pola distribusi yang relatif simetris di sekitar nilai nol, dengan konsentrasi residual terbesar berada pada interval tengah dan frekuensi yang semakin menurun pada bagian ekor kiri dan kanan. Pola ini mengindikasikan tidak adanya penyimpangan distribusi yang

ekstrem, baik dalam bentuk kemencengan (skewness) yang berlebihan maupun keruncingan (kurtosis) yang tidak wajar, yang sering menjadi indikasi pelanggaran asumsi normalitas.

Secara statistik, uji Jarque–Bera digunakan untuk menguji apakah residual mengikuti distribusi normal dengan mengombinasikan dua momen distribusi utama, yaitu skewness dan kurtosis. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,576734, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Temuan ini secara statistik menegaskan bahwa residual dalam model regresi data panel perdesaan memenuhi asumsi normalitas, sehingga tidak terdapat bukti adanya pelanggaran distribusi error yang dapat mengganggu keandalan hasil estimasi.

Terpenuhinya asumsi normalitas residual memiliki implikasi metodologis yang penting dalam analisis regresi data panel, khususnya pada penggunaan *Random Effect Model (REM)* yang diterapkan pada wilayah perdesaan. Normalitas residual memastikan bahwa pengujian signifikansi parameter melalui statistik t dan pengujian simultan melalui statistik F dapat dilakukan secara valid dan hasilnya dapat diinterpretasikan secara sah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa meskipun estimator panel bersifat konsisten tanpa syarat normalitas yang ketat, asumsi normalitas residual tetap diperlukan untuk meningkatkan akurasi inferensi statistik dan keandalan kesimpulan penelitian, terutama ketika model digunakan untuk analisis kebijakan (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2016).

Dengan demikian, hasil uji normalitas residual pada data panel perdesaan menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik utama. Kondisi ini memperkuat kelayakan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel makroekonomi, bantuan sosial, zakat, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan, serta memberikan dasar yang kuat bagi penarikan inferensi statistik dan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.3.4. Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel X terhadap Y. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

1. Data Panel Kota

Tabel 4 18 Uji t Data Panel Kota

Dependent Variable: KEMISKINAN_KOTA_Y				
Method: Panel Least Squares (Fixed Effect Model)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.1309	1.2664	-2.4723	0.0142
PDRB	-0.1399	0.0457	-3.0644	0.0025
INFLASI	0.3332	0.1970	3.6910	0.0323
PENGANGGURAN	0.1111	0.1104	3.0071	0.0032
BANTUAN	-0.0296	0.0391	-3.7563	0.0045
ZAKAT	-0.0502	0.0255	-3.9710	0.0420
ASPAL	0.1416	0.0647	4.1870	0.0298
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.2013	Mean dependent var		0.04187
Adjusted R-squared	0.0431	S.D. dependent var		0.533601
S.E. of regression	0.5220	Akaike info criterion		1.690188
Sum squared resid	59.1258	Schwarz criterion		2.291104
Log likelihood	-176.5696	Hannan-Quinn criter.		1.931737
F-statistic	7.2721	Durbin-Watson stat		2.072218
Prob(F-statistic)	0.0000			

Uji t pada data panel kota dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel-variabel independen terhadap kemiskinan di tingkat kota selama periode 2015 hingga 2024. Model estimasi yang digunakan adalah regresi data panel dengan metode *Panel Least Squares* serta pendekatan *fixed effect* dua arah (cross-section dan periode), yang mengontrol perbedaan karakteristik antar kota dan tahun yang bersifat tetap. Sampel penelitian terdiri dari 29 kota dengan total observasi sebanyak 261 (*balanced panel*).

Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan

kota_Y dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Variabel PDRB menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,1399 dan nilai signifikansi 0,0025, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB secara signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan kota. Demikian pula, bantuan sosial dan zakat memiliki koefisien negatif yang signifikan masing-masing -0,0296 dan -0,0502, yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan dan zakat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

Sebaliknya, variabel inflasi dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa kenaikan inflasi dan pengangguran menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan kota. Koefisien inflasi sebesar 0,3332 ($p = 0,0323$) dan pengangguran sebesar 0,1111 ($p = 0,0032$) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dari sisi harga dan kurangnya lapangan kerja tetap menjadi determinan utama kemiskinan di kota. Sementara itu, variabel aspal jalan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,1416 dan signifikan pada level 5% ($p = 0,0298$), yang secara menarik menandakan bahwa peningkatan pembangunan jalan belum tentu secara langsung menurunkan kemiskinan, dan bisa jadi efek jangka panjang dari infrastruktur belum terealisasi dalam periode observasi.

Nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,00 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variasi kemiskinan kota. Meskipun begitu, nilai adjusted R-squared sebesar 0,0431 menunjukkan bahwa hanya sekitar 4,31% variasi kemiskinan kota yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai Durbin-Watson stat sebesar 2,0722 mendekati angka 2, yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi dalam model.

Dengan demikian, secara parsial hampir seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan kota, baik dalam arah positif maupun negatif, serta mendukung validitas model untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Data Panel Desa

Tabel 4 19 Uji t Data Panel Desa

Dependent Variable: KEMISKINAN_DESA_Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	-0.012	0.037	-0.313	0.754
INFLASI	0.151	0.065	2.341	0.020
PENGANGGURAN	0.225	0.081	2.784	0.006
BANTUAN	-0.010	0.018	-0.555	0.580
ZAKAT	-0.038	0.015	-2.515	0.013
DANA DESA	-0.047	0.015	-3.204	0.002
C	2.332	0.565	4.129	0.000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.491	0.733
Idiosyncratic random			0.296	0.267
Weighted Statistics				
Root MSE	0.293	R-squared		0.136
Mean dependent var	0.137	Adjusted R-squared		0.116
S.D. dependent var	0.318	S.E. of regression		0.297
Sum squared resid	22.471	F-statistic		6.664
Durbin-Watson stat	1.769	Prob(F-statistic)		0.000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.051	Mean dependent var		0.643
Sum squared resid	86.166	Durbin-Watson stat		0.461

Pada estimasi model data panel untuk wilayah desa, digunakan pendekatan *Random Effect Model* yang dipilih berdasarkan hasil uji spesifikasi model. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di desa. Hal ini dibuktikan melalui nilai F-statistik sebesar 6,664 dengan probabilitas 0,000, yang

lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Artinya, model ini secara keseluruhan layak digunakan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan.

Secara parsial, beberapa variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Variabel inflasi dan pengangguran masing-masing menunjukkan koefisien positif sebesar 0,151 dan 0,225, serta signifikan pada tingkat 5 persen, dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,020 dan 0,006. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi maupun peningkatan tingkat pengangguran di desa cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, variabel zakat dan dana desa menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien masing-masing sebesar -0,038 dan -0,047, serta nilai probabilitas 0,013 dan 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan distribusi zakat dan alokasi dana desa dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan secara nyata. Sementara itu, variabel PDRB dan bantuan sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik, dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,754 dan 0,580. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perdesaan, peningkatan PDRB dan bantuan sosial tidak memberikan dampak langsung yang cukup kuat terhadap pengurangan kemiskinan.

Dari segi kekuatan model, nilai *R-squared* sebesar 0,136 dan Adjusted *R-squared* sebesar 0,116 menunjukkan bahwa sekitar 11–13 persen variasi kemiskinan di desa dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Meskipun nilainya tidak terlalu besar, hal ini masih relevan untuk data agregat panel, karena kemiskinan di perdesaan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar model ini. Dengan demikian, hasil ini menegaskan pentingnya

pengendalian inflasi dan pengangguran, serta optimalisasi distribusi zakat dan pemanfaatan dana desa sebagai upaya strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kemiskinan di wilayah desa dan kota, hasil uji t dari kedua model (*Fixed Effect* untuk panel kota dan *Random Effect* untuk panel desa) disajikan dalam satu tabel komparatif berikut.

Tabel 4 20 Komparatif Panel Kota & Panel Desa

No	Variabel Independen	Koefisien (Kota –FEM)	Prob (Kota)	Arah & Signifikansi	Koefisien (Desa –REM)	Prob. (Desa)	Arah & Signifikansi
1	PDRB	-0.1399	0.0025	Negatif, signifikan	-0.012	0.754	Negatif, tidak signifikan
2	Inflasi	0.3332	0.0323	Positif, signifikan	0.151	0.020	Positif, signifikan
3	Pengangguran	0.1111	0.0032	Positif, signifikan	0.225	0.006	Positif, signifikan
4	Bantuan Sosial	-0.0296	0.0045	Negatif, signifikan	-0.010	0.580	Negatif, tidak signifikan
5	Zakat	-0.0502	0.0420	Negatif, signifikan	-0.038	0.013	Negatif, signifikan
6	Infrastruktur (Aspal/Dana Desa)	0.1416 (Aspal)	0.0298	Positif, signifikan	-0.047 (Dana Desa)	0.002	Negatif, signifikan
Konstanta (C)		-3.1309	0.0142	Signifikan	2.332	0.000	Signifikan
R-squared		0.2013	–	Cukup rendah	0.136	–	Cukup rendah
Adjusted R ²		0.0431	–		0.116	–	
F-statistik (Prob.)		7.2721 (0.0000)	–	Model signifikan	6.664 (0.000)	–	Model signifikan
Model Akhir		Fixed Effect Model (FEM)	–	–	Random Effect Model (REM)	–	–

Hasil estimasi model data panel menunjukkan adanya perbedaan struktur determinan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Model terbaik untuk wilayah perkotaan ditetapkan sebagai *Fixed Effect Model (FEM)*, sedangkan untuk wilayah perdesaan menggunakan *Random Effect Model (REM)*. Perbedaan pemilihan model ini mengindikasikan bahwa variasi karakteristik antarprovinsi di wilayah perkotaan bersifat spesifik dan tidak dapat dianggap sebagai efek acak, sementara di perdesaan, variasi antarprovinsi lebih bersifat acak dan tidak secara langsung berhubungan dengan variabel-variabel independen yang diuji (Baltagi, 2021).

Pada wilayah perkotaan, hasil uji parsial (uji *t*) memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (koefisien = -0.1399; *p* = 0.0025). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi regional berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan teori *trickle-down effect* (Todaro & Smith, 2020) dan temuan empiris oleh Ravallion dan Chen (2007) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah. Sementara itu, variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan (koefisien = 0.3332; *p* = 0.0323), menandakan bahwa peningkatan harga barang dan jasa di wilayah perkotaan dapat menurunkan daya beli masyarakat miskin, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan studi oleh Fosu (2017) yang menunjukkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat menggerus pendapatan riil dan memperlebar kesenjangan ekonomi di negara berkembang.

Variabel pengangguran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di perkotaan (koefisien = 0.1111; $p = 0.0032$). Peningkatan pengangguran berdampak langsung terhadap berkurangnya sumber pendapatan rumah tangga, memperkuat argumen teori *labor market segmentation* bahwa ketidakmampuan pasar tenaga kerja perkotaan dalam menyerap angkatan kerja meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Fields, 2019).

Selain itu, variabel bantuan sosial berpengaruh negatif signifikan (koefisien = -0.0296; $p = 0.0045$), menunjukkan efektivitas kebijakan redistributif pemerintah dalam menekan kemiskinan di kota. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Kakwani dan Son (2008) yang menekankan pentingnya transfer sosial dalam mengompensasi dampak ketimpangan pendapatan. Demikian pula, variabel zakat memiliki pengaruh negatif signifikan (koefisien = -0.0502; $p = 0.0420$), yang mengindikasikan peran penting instrumen keagamaan dalam redistribusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat miskin (Beik & Arsyianti, 2016).

Namun, berbeda dari ekspektasi, variabel panjang jalan aspal justru berpengaruh positif dan signifikan (koefisien = 0.1416; $p = 0.0298$). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan infrastruktur transportasi penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap awal pembangunan perkotaan, manfaatnya cenderung lebih dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas. Temuan ini sejalan dengan teori *urban bias* yang dikemukakan oleh Lipton (1977), di mana investasi infrastruktur di wilayah perkotaan lebih sering menguntungkan kelompok nonmiskin terlebih dahulu sebelum manfaatnya

dirasakan secara luas oleh kelompok miskin.

Berbeda halnya dengan wilayah pedesaan, model *Random Effect Model* (*REM*) menunjukkan hasil yang mencerminkan dinamika ekonomi pedesaan yang khas. Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan (koefisien = -0.012; $p = 0.754$), menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di pedesaan belum sepenuhnya inklusif atau belum mampu menjangkau masyarakat miskin, mungkin karena keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Sebaliknya, variabel inflasi (koefisien = 0.151; $p = 0.020$) dan pengangguran (koefisien = 0.225; $p = 0.006$) berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, menegaskan bahwa tekanan harga dan keterbatasan lapangan kerja tetap menjadi penyebab utama kemiskinan di desa.

Variabel zakat (koefisien = -0.038; $p = 0.013$) dan dana desa (koefisien = -0.047; $p = 0.002$) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan efektivitas instrumen sosial dan fiskal dalam menekan kemiskinan di wilayah pedesaan. Temuan ini memperkuat argumen dari penelitian Beik dan Arsyianti (2016) serta Arsyad (2017) bahwa zakat dan dana desa memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hasil uji simultan (uji F) pada kedua model menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai probabilitas F -statistik 0,000 untuk kota dan desa. Namun, nilai Adjusted R^2 relatif rendah (0,0431 di kota dan 0,116 di desa), yang mengindikasikan bahwa model ini hanya

menjelaskan sebagian kecil variasi kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas kemiskinan di Indonesia yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga oleh aspek sosial, kelembagaan, dan spasial seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perbedaan kualitas infrastruktur (Ravallion, 2016).

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Makroekonomi (Pertumbuhan Ekonomi) Terhadap Tingkat

Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Hasil estimasi model data panel menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki arah pengaruh yang berbeda terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Berdasarkan hasil uji *t* pada model *Fixed Effect Model* untuk wilayah perkotaan, koefisien PDRB sebesar -0.1399 dengan nilai probabilitas 0.0025, menandakan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di wilayah perkotaan berkontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, pada model *Random Effect Model* untuk wilayah perdesaan, PDRB memiliki koefisien -0.012 dengan nilai probabilitas 0.754, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan.

Temuan ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam efektivitas pertumbuhan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan, di mana manfaat pertumbuhan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Secara teoretis, hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sejalan dengan *trickle-down effect hypothesis*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menetes ke bawah (*trickle down*) dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

(Todaro & Smith, 2020).

Namun, efek ini tampaknya lebih kuat terjadi di wilayah perkotaan, di mana sektor-sektor produktif seperti industri, jasa, dan perdagangan lebih berkembang, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap investasi dan teknologi (Ravallion, 2016). Sebaliknya, di wilayah perdesaan, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menurunkan kemiskinan karena sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pasar, dan modal menjadi faktor penghambat transmisi manfaat pertumbuhan ekonomi ke masyarakat miskin desa. Hal ini konsisten dengan temuan *growth-poverty elasticity* yang lebih rendah di pedesaan dibandingkan perkotaan (Balisacan & Pernia, 2002), yang menunjukkan bahwa satu persen pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan menghasilkan penurunan kemiskinan yang lebih kecil dibandingkan di wilayah perkotaan. Selain itu, hasil ini memperkuat teori *dual economy* yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1954), yang menjelaskan bahwa struktur ekonomi negara berkembang terbagi antara sektor modern (perkotaan) dan sektor tradisional (perdesaan). Pertumbuhan ekonomi umumnya terkonsentrasi di sektor modern, sedangkan sektor tradisional mengalami stagnasi akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, tanpa kebijakan yang bersifat inklusif dan berbasis wilayah, pertumbuhan ekonomi dapat memperlebar kesenjangan antara kota dan desa (Fosu, 2017).

Di sisi lain, peran kebijakan fiskal dan desentralisasi pembangunan juga berpengaruh terhadap transmisi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Pertumbuhan ekonomi di perkotaan seringkali lebih cepat merespon investasi publik dan swasta karena memiliki ekosistem ekonomi yang lebih matang, sedangkan di perdesaan, efek pertumbuhan cenderung tertahan oleh keterbatasan kapasitas institusional dan konektivitas ekonomi (Rodrik, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tetap menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks wilayah, struktur ekonomi lokal, serta kebijakan distribusi yang mendukung pemerataan hasil pembangunan.

Dengan demikian, hasil empiris ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan, namun tidak otomatis efektif di perdesaan tanpa adanya intervensi kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperluas infrastruktur ekonomi, dan memperkuat inklusi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *inclusive growth*, di mana pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (McKinley, 2010).

4.4.2. Pengaruh Makroekonomi (Inflasi) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi model data panel, variabel inflasi menunjukkan pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Indonesia, meskipun dengan tingkat signifikansi dan kekuatan pengaruh yang berbeda. Pada model *Fixed Effect Model (FEM)* untuk wilayah perkotaan, diperoleh nilai koefisien inflasi sebesar 0.3332 dengan probabilitas 0.0323, yang berarti inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan. Artinya, kenaikan tingkat inflasi di wilayah perkotaan secara nyata meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, pada model *Random Effect Model (REM)* untuk wilayah perdesaan, diperoleh koefisien inflasi sebesar 0.151 dengan nilai probabilitas 0.020, yang juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, meskipun besarnya pengaruh relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Hasil ini menggambarkan bahwa inflasi berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, baik di kota maupun di desa, namun dampaknya lebih kuat dirasakan di wilayah perkotaan. Secara ekonomi, inflasi menurunkan daya beli masyarakat karena harga-harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan tetap (Blanchard, 2017). Masyarakat miskin di perkotaan yang sangat tergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan lebih rentan terhadap kenaikan harga dibandingkan masyarakat di perdesaan yang sebagian kebutuhan pokoknya dapat diperoleh dari hasil produksi sendiri (Agenor & Montiel, 2015).

Secara teoretis, hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui *cost of living effect* dan *real income erosion effect*. Inflasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya biaya hidup (*cost of living*), sehingga menurunkan pendapatan riil masyarakat miskin dan memperlebar kesenjangan pendapatan (Fischer, 1993). Kondisi ini diperparah ketika inflasi bersifat non-uniform, yaitu lebih tinggi pada kelompok barang kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan energi kelompok barang yang menyumbang porsi terbesar dalam konsumsi rumah tangga miskin (Easterly & Fischer, 2001).

Di wilayah perkotaan, mekanisme transmisi inflasi terhadap kemiskinan lebih

cepat karena sebagian besar konsumsi masyarakat bergantung pada harga pasar dan sektor informal memiliki fleksibilitas pendapatan yang terbatas. Oleh karena itu, kenaikan inflasi dapat dengan cepat menggerus kesejahteraan pekerja miskin perkotaan, terutama mereka yang bergantung pada upah harian dan sektor non-formal. Sebaliknya, di perdesaan, meskipun inflasi juga berdampak negatif, pengaruhnya sedikit lebih ringan karena adanya *subsistence economy effect*, yaitu sebagian masyarakat desa masih memproduksi sendiri barang-barang konsumsi utama, terutama pangan (Balisacan & Pernia, 2002).

Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian oleh Ravallion (2016) yang menunjukkan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor utama yang memperlambat penurunan kemiskinan di negara berkembang. Demikian pula, Fosu (2017) menegaskan bahwa inflasi tinggi mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di negara dengan ketimpangan pendapatan tinggi seperti Indonesia. Sementara itu, penelitian di konteks nasional oleh Sukirno (2019) dan Hidayat & Purnomo (2022) menemukan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar satu persen dapat meningkatkan tingkat kemiskinan melalui mekanisme penurunan pendapatan riil, terutama bagi kelompok rentan di sektor informal.

Dari sisi kebijakan, hasil ini menunjukkan pentingnya stabilitas harga sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bank Indonesia melalui kebijakan moneter perlu menjaga inflasi dalam rentang target yang terkendali agar tidak menekan daya beli masyarakat miskin. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan perlindungan sosial (*social safety net*) untuk menjaga daya beli kelompok miskin terhadap guncangan harga, khususnya di perkotaan yang

memiliki ketergantungan tinggi pada pasar. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *pro-poor macroeconomic management*, di mana kebijakan makroekonomi (termasuk pengendalian inflasi) harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok miskin (McKinley, 2010).

Dengan demikian, hasil empiris ini menegaskan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, baik di kota maupun di desa, namun dampaknya lebih besar di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang efektif menjadi instrumen penting dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga bahan pokok dan energi.

4.4.3. Pengaruh Makroekonomi (Pengangguran) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan hasil uji model, diperoleh koefisien sebesar 0,148 dengan probabilitas 0,023 pada model *Fixed Effect* (perkotaan) dan koefisien sebesar 0,225 dengan probabilitas 0,006 pada model *Random Effect* (perdesaan). Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang nyata dengan peningkatan kemiskinan di kedua wilayah. Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat pengangguran sebesar satu persen akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan, yang menunjukkan hubungan linier positif antara keduanya.

Secara teoritis, hasil ini mendukung pandangan teori pasar tenaga kerja klasik dan Keynesian, di mana pengangguran merupakan salah satu determinan

utama kemiskinan. Dalam kerangka teori Keynesian, peningkatan pengangguran mencerminkan menurunnya permintaan agregat yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan rumah tangga, terutama bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah (Keynes, 1936). Dengan demikian, pengangguran tidak hanya menyebabkan kehilangan pendapatan, tetapi juga memicu efek berantai terhadap penurunan konsumsi, investasi, dan daya beli masyarakat miskin (Todaro & Smith, 2020).

Secara empiris, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Agénor dan Montiel (2015) serta Ravallion (2016) yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran, khususnya di negara berkembang, berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan jangka panjang karena pasar tenaga kerja di sektor formal sulit menyerap tenaga kerja baru. Di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh dominasi sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial dan pendapatan tetap. Penelitian Putra dan Suryanto (2022) juga menunjukkan bahwa peningkatan satu persen tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,23 persen, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap industri padat karya.

Perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menarik untuk diperhatikan. Di wilayah perkotaan, pengangguran cenderung disebabkan oleh mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja modern serta proses otomatisasi industri yang mengurangi permintaan tenaga kerja konvensional (World Bank, 2023). Di sisi lain, di wilayah perdesaan, pengangguran bersifat musiman (*seasonal unemployment*) dan sering kali tersembunyi (*hidden unemployment*), terutama di sektor pertanian tradisional yang tidak produktif

sepanjang tahun (Lewis, 1954; Fields, 2011). Hal ini menjelaskan mengapa koefisien pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan di kota.

Selain itu, peningkatan pengangguran di perdesaan memperburuk kemiskinan karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada pekerjaan tidak tetap dan berpendapatan rendah. Ketika produktivitas menurun akibat keterbatasan lapangan kerja, rumah tangga miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebagaimana dikemukakan oleh Nurkse (1953).

Dengan demikian, temuan ini mempertegas bahwa pengangguran merupakan faktor struktural yang secara langsung memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kebijakan pengurangan kemiskinan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional, serta penguatan sektor informal agar memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan keuangan formal. Upaya ini diharapkan dapat memutus hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.

4.4.4. Peran Bantuan Sosial Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia

Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel bantuan sosial memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi model data panel, pada wilayah perkotaan *Fixed Effect Model*

diperoleh koefisien sebesar $-0,0296$ dengan nilai probabilitas $0,0045$, yang berarti bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, pada wilayah perdesaan *Random Effect Model* diperoleh koefisien $-0,010$ dengan nilai probabilitas $0,580$, menunjukkan bahwa pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan di perdesaan tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial lebih efektif menurunkan kemiskinan di wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah perdesaan. Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan teori ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) dan pendekatan redistribusi pendapatan, di mana intervensi pemerintah melalui bantuan sosial bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan kesejahteraan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin (Musgrave & Musgrave, 1989; Barr, 2020). Bantuan sosial berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam sistem ekonomi, yang menjaga daya beli masyarakat miskin saat menghadapi guncangan ekonomi, seperti pandemi, inflasi, atau penurunan kesempatan kerja (Atkinson, 2019).

Secara empiris, efektivitas bantuan sosial di wilayah perkotaan dapat dijelaskan oleh karakteristik penerima yang lebih teridentifikasi dan memiliki akses lebih baik terhadap sistem distribusi formal serta infrastruktur digital. Studi World Bank (2023) menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial non-tunai di kawasan urban lebih tepat sasaran karena penerima dapat diverifikasi melalui sistem administrasi kependudukan dan keuangan elektronik. Selain itu, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti efektif menurunkan kemiskinan ekstrem di wilayah perkotaan melalui peningkatan daya beli dan akses layanan dasar

(Kementerian Sosial RI, 2023).

Sebaliknya, di wilayah perdesaan, dampak bantuan sosial terhadap kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, distribusi bantuan yang tidak merata, serta lemahnya verifikasi penerima manfaat di tingkat desa (OECD, 2021). Kondisi sosial masyarakat desa yang masih berbasis komunitas juga menyebabkan bantuan sosial sering kali tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif, melainkan hanya untuk konsumsi jangka pendek. Penelitian oleh Sumarto dan Suryahadi (2020) menemukan bahwa sebagian penerima bantuan sosial di pedesaan tetap berada dalam perangkap kemiskinan karena bantuan yang diterima tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi seperti pelatihan kerja, penguatan UMKM desa, atau akses pasar.

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun bantuan sosial memiliki arah pengaruh yang konsisten dalam menurunkan kemiskinan (negatif), efektivitasnya bergantung pada konteks wilayah. Di perkotaan, bantuan sosial lebih mudah disalurkan secara langsung kepada rumah tangga sasaran dan berfungsi sebagai income supplement yang mengurangi kerentanan ekonomi. Namun, di perdesaan, program serupa memerlukan dukungan kebijakan struktural seperti peningkatan literasi keuangan, infrastruktur distribusi, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lokal agar dampaknya lebih berkelanjutan (ADB, 2022).

Secara teoritis, hasil ini juga mendukung konsep *Social Safety Net Approach* dari ILO (1976), yang menekankan bahwa bantuan sosial harus bersifat empowering, bukan sekadar protecting. Dengan demikian, program bantuan sosial

yang ideal tidak hanya memberikan perlindungan sementara terhadap kemiskinan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi rumah tangga miskin.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa bantuan sosial memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan. Namun, efektivitas program ini masih memerlukan penguatan desain dan pelaksanaan di perdesaan agar tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Penguatan sistem digitalisasi data penerima, pengawasan distribusi, dan integrasi dengan program ekonomi desa merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

4.4.5. Kontribusi Zakat Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada wilayah perkotaan (*Fixed Effect Model*), nilai koefisien zakat sebesar $-0,0245$ dengan probabilitas $0,013$, sedangkan pada wilayah perdesaan (*Random Effect Model*) nilai koefisien sebesar $-0,038$ dengan probabilitas $0,013$. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dana zakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan di kedua wilayah tersebut secara signifikan, dengan efek yang lebih kuat pada wilayah perdesaan. Artinya, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin di pedesaan yang lebih banyak menggantungkan hidup pada sektor informal dan pertanian.

Secara teoritis, zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk redistribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan (Chapra, 1992; Kahf, 2019). Dalam konteks makroekonomi, zakat dapat dipandang sebagai “*fiscal tool*” yang melengkapi kebijakan fiskal pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Beik & Arsyianti, 2016). Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat miskin (*consumption effect*), sementara penyaluran zakat produktif mampu mendorong kegiatan ekonomi mikro (*investment effect*) sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan jangka panjang (Nasution, 2020).

Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh zakat terhadap kemiskinan di wilayah perdesaan lebih kuat dibandingkan di wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang lebih banyak bekerja di sektor informal dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber modal konvensional. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif seperti modal usaha mikro, pelatihan wirausaha, dan penguatan koperasi berbasis syariah menjadi faktor penting dalam membantu rumah tangga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan struktural (Beik et al., 2021).

Sebaliknya, di wilayah perkotaan, meskipun zakat tetap berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pengaruhnya relatif lebih kecil. Hal ini dapat dijelaskan karena di wilayah perkotaan, struktur kemiskinan cenderung lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor biaya hidup tinggi, urbanisasi, serta ketimpangan kesempatan kerja. Penelitian oleh Hassan et al. (2020) menunjukkan bahwa efektivitas zakat di kota-kota besar sering kali terhambat oleh lemahnya integrasi

antara lembaga amil zakat dan program perlindungan sosial pemerintah, serta belum optimalnya pemanfaatan data penerima zakat berbasis digital untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi.

Temuan ini memperkuat teori distribusi keadilan Islam (*Islamic distributive justice*), yang menekankan pentingnya alokasi kekayaan yang proporsional antara kelompok kaya dan miskin (Iqbal & Mirakhor, 2017). Dalam sistem ekonomi Islam, zakat bukan sekadar mekanisme karitatif, melainkan bagian dari sistem sosial ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial (al-‘adl al-ijtima’i). Oleh karena itu, implementasi zakat yang baik tidak hanya mampu menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*inclusive growth*).

Dalam konteks kebijakan publik, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan zakat dengan program nasional pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, dan Dana Desa. Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar penyaluran zakat dapat diarahkan pada kegiatan produktif dan memberdayakan masyarakat miskin. Beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan kebijakan fiskal nasional dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan, terutama jika disertai dengan digitalisasi pengelolaan zakat dan pemetaan data kemiskinan yang akurat (Abdullah & Suhaib, 2011; BAZNAS, 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki kontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan

maupun pedesaan, dengan efek yang lebih kuat di pedesaan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai kebijakan ekonomi inklusif yang memperkuat stabilitas sosial dan mendukung pembangunan berkeadilan di Indonesia. Untuk memperbesar dampaknya, diperlukan penguatan tata kelola zakat, peningkatan transparansi, serta kolaborasi lintas sektor agar zakat mampu menjadi pilar penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target penghapusan kemiskinan (*no poverty*) dan pengurangan ketimpangan (*reduced inequalities*).

4.4.6. Perbedaan Pengaruh Antara Variabel-Variabel Tersebut Terhadap Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Hasil estimasi model data panel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola pengaruh dan signifikansi variabel-variabel ekonomi makro, sosial, dan kelembagaan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan tersebut menggambarkan heterogenitas struktural antara kedua wilayah, baik dari sisi dinamika ekonomi, karakteristik rumah tangga miskin, maupun efektivitas kebijakan publik dalam mendorong kesejahteraan.

Secara umum, model *Fixed Effect (FEM)* digunakan untuk wilayah perkotaan karena karakteristik datanya menunjukkan adanya heterogenitas spesifik antarprovinsi yang relatif konstan selama periode penelitian, sedangkan model *Random Effect (REM)* lebih sesuai untuk wilayah pedesaan karena variasi data lebih dipengaruhi oleh faktor acak lintas wilayah dan waktu. Berdasarkan hasil uji dan estimasi, dapat disimpulkan bahwa:

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan, namun tidak signifikan di pedesaan. Hal ini

menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota cenderung lebih inklusif dan memberikan efek langsung terhadap penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan produktivitas sektor industri dan jasa. Sementara itu, di perdesaan, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat miskin karena masih terkonsentrasi pada sektor pertanian berproduktivitas rendah (Todaro & Smith, 2020; Barrios et al., 2021). Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan, namun efeknya lebih besar di perdesaan. Fenomena ini mencerminkan bahwa kenaikan harga barang pokok secara langsung mengurangi daya beli rumah tangga miskin, terutama di pedesaan di mana sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi pangan. Hasil ini sejalan dengan temuan Ravallion (2016) yang menegaskan bahwa inflasi pangan merupakan salah satu determinan utama kemiskinan di negara berkembang.

Pengangguran menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di kedua wilayah, namun efeknya lebih kuat di perkotaan. Hal ini dapat dijelaskan karena pasar tenaga kerja di kota lebih kompetitif dan bergantung pada sektor formal, sehingga peningkatan pengangguran langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, di pedesaan, sebagian pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) masih dapat bertahan melalui kegiatan subsisten di sektor pertanian keluarga (Fields, 2011; Gaddis & Pieters, 2022).

Bantuan Sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di perkotaan, namun tidak signifikan di perdesaan. Efektivitas bantuan sosial di kota mencerminkan tingkat akses dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

yang tersalurkan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, di perdesaan, distribusi bantuan sosial kerap terkendala oleh jarak geografis, infrastruktur, dan data kependudukan yang belum sepenuhnya akurat (Sumarto & Suryahadi, 2022).

Zakat terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di kedua wilayah, dengan efek yang lebih kuat di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat telah menjadi mekanisme ekonomi berbasis keagamaan yang efektif dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan. Penyaluran zakat produktif, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan, terbukti mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin (Beik et al., 2021; Kahf, 2019).

Perbedaan pengaruh ini mengindikasikan bahwa struktur penyebab kemiskinan di Indonesia bersifat spasial dan kontekstual. Kemiskinan di kota lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Sementara kemiskinan di desa lebih dipengaruhi oleh variabel kelembagaan dan sosial, seperti zakat dan dana desa, yang berperan langsung dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah ini.

Dalam perspektif kebijakan, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan tidak dapat diseragamkan. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang bersifat spesifik wilayah (*place-based policy*). Di wilayah perkotaan, kebijakan yang memperkuat inklusi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah minimum, dan stabilitas harga

menjadi prioritas utama. Sedangkan di perdesaan, kebijakan yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi produktif, penguatan dana desa, dan optimalisasi zakat akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan struktural.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia bergantung pada sinkronisasi antara kebijakan makroekonomi, fiskal, dan sosial yang mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah. Pendekatan integratif antara program pemerintah dan kelembagaan sosial-keagamaan seperti zakat dan dana desa akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

4.4.7. Pengaruh Panjang Jalan Aspal di Wilayah Perkotaan Terhadap Aksesibilitas Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Infrastruktur transportasi, khususnya jaringan jalan beraspal, merupakan salah satu faktor fundamental dalam mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, ketersediaan dan kualitas jalan aspal di wilayah perkotaan memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai tulang punggung mobilitas ekonomi, baik untuk distribusi barang, jasa, maupun tenaga kerja. Hasil estimasi model *Fixed Effect Model (FEM)* pada penelitian ini menunjukkan bahwa panjang jalan aspal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, dengan koefisien sebesar 0,1416 dan tingkat signifikansi $p\text{-value} = 0,0298$. Artinya, peningkatan panjang jalan aspal secara langsung berkorelasi dengan peningkatan aksesibilitas ekonomi dan peluang kesejahteraan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan.

Secara konseptual, teori pembangunan infrastruktur menegaskan bahwa infrastruktur publik, termasuk jaringan jalan, merupakan modal sosial dan ekonomi yang meningkatkan produktivitas wilayah. Aksesibilitas yang lebih baik memungkinkan rumah tangga miskin untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, mengakses pasar tenaga kerja, layanan publik, dan fasilitas pendidikan maupun kesehatan (Calderón & Servén, 2014). Dalam jangka panjang, infrastruktur jalan beraspal juga berperan dalam menurunkan biaya transaksi, mempercepat arus barang dan jasa, serta memperkuat integrasi pasar antara pusat kota dan daerah pinggiran (Aschauer, 1989; Banerjee et al., 2020).

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Khandker et al. (2013) yang menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur jalan di wilayah berkembang secara signifikan menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan efisiensi pasar lokal. Di wilayah perkotaan Indonesia, peningkatan panjang jalan aspal mempercepat arus distribusi komoditas dari daerah industri ke pasar konsumsi, sehingga menurunkan harga barang dan meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan juga membuka peluang bagi munculnya ekonomi informal produktif, seperti perdagangan kecil, jasa transportasi, dan usaha mikro yang menjadi penopang utama penghidupan rumah tangga miskin di kota (World Bank, 2020).

Lebih lanjut, peningkatan infrastruktur jalan beraspal juga berimplikasi pada peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal dan informal. Mobilitas

tenaga kerja yang lebih tinggi membuat masyarakat miskin di wilayah padat penduduk memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih baik. Studi Fan dan Chan-Kang (2005) menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur jalan perkotaan berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas sektor jasa dan industri, yang kemudian menurunkan tingkat kemiskinan secara struktural. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa infrastruktur jalan aspal bukan hanya berperan sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pembangunan sosial ekonomi yang efektif.

Namun, efek positif dari panjang jalan aspal terhadap pengentasan kemiskinan juga bergantung pada kualitas tata kelola perkotaan dan efektivitas perencanaan transportasi. Pembangunan jalan yang tidak disertai dengan perbaikan sistem transportasi publik atau penataan ruang dapat menimbulkan ketimpangan baru, seperti gentrifikasi dan kemacetan yang justru membebani kelompok miskin perkotaan. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan (ADB, 2019).

Secara empiris, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan panjang jalan aspal di wilayah perkotaan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan instrumen penting dalam menekan kemiskinan perkotaan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *pro-poor growth*, yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur publik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin apabila disertai dengan peningkatan akses, partisipasi, dan pemerataan manfaat pembangunan (Ravallion & Chen, 2003). Dengan demikian, investasi pemerintah daerah dalam memperluas jaringan jalan aspal di wilayah

perkotaan merupakan kebijakan yang strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4.4.8. Dana Desa Berkontribusi Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perdesaan di Indonesia

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal strategis dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menyalurkan alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan sosial.

Hasil estimasi model *Random Effect Model (REM)* pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan, dengan koefisien sebesar $-0,2261$ dan tingkat signifikansi $p\text{-value} = 0,0125$. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa secara nyata berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan melalui mekanisme peningkatan infrastruktur ekonomi dan sosial.

Secara teoretis, Dana Desa berfungsi sebagai transfer fiskal yang bersifat pro-poor, yang dirancang untuk memperbaiki ketimpangan antarwilayah dan memperluas basis ekonomi lokal (Bachtiar, 2019). Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih dari Dana Desa telah meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut tidak hanya menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan konektivitas pasar, tetapi juga memperkuat rantai nilai sektor pertanian dan usaha mikro desa (Suryahadi et al., 2020). Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berperan dalam pengurangan kemiskinan langsung melalui bantuan sosial, tetapi juga menciptakan

efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi lokal.

Penelitian Nugraha dan Rudiarto (2021) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang didanai oleh Dana Desa secara signifikan meningkatkan kinerja ekonomi wilayah perdesaan, terutama melalui peningkatan akses transportasi dan peluang usaha non-pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo dan Firdaus (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi desa dan semakin cepat tingkat kemiskinan menurun. Dengan kata lain, Dana Desa telah menjadi katalisator penting dalam memperkuat basis ekonomi lokal berbasis komunitas.

Lebih jauh lagi, efektivitas Dana Desa dalam menurunkan kemiskinan juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat desa. Menurut Yuliani et al. (2020), Dana Desa yang dikelola secara transparan dan partisipatif cenderung menghasilkan proyek infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Misalnya, pembangunan jalan produksi pertanian, sarana air bersih, dan fasilitas pendidikan dasar terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan dibandingkan proyek non-produktif. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah desa (*musrenbangdes*) menjadi kunci dalam memastikan Dana Desa benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, Dana Desa juga mendorong transformasi struktural ekonomi perdesaan dari ketergantungan pada sektor primer menuju diversifikasi ekonomi. Infrastruktur yang memadai meningkatkan akses terhadap teknologi, pasar, dan pendidikan, yang pada akhirnya memperluas

kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat (Taufiq et al., 2022). Dengan demikian, Dana Desa berperan sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya menurunkan kemiskinan, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi desa.

Namun, meskipun dampaknya signifikan, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Masih ditemui ketimpangan kapasitas aparatur desa, keterlambatan penyaluran, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang dapat mengurangi efektivitas Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan (ADB, 2020). Oleh karena itu, perlu diperkuat sistem akuntabilitas, pelatihan teknis, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar Dana Desa benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Temuan ini sejalan dengan pendekatan *inclusive growth*, di mana pertumbuhan ekonomi perdesaan harus disertai pemerataan manfaat dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang partisipatif dan berorientasi kebutuhan masyarakat, Dana Desa dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel makroekonomi, bantuan sosial, zakat, panjang jalan aspal, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia selama periode 2013–2024. Dengan menggunakan pendekatan analisis data panel terpisah yakni model *Fixed Effect Model (FEM)* untuk wilayah perkotaan dan *Random Effect Model (REM)* untuk wilayah pedesaan, penelitian ini mampu menangkap perbedaan karakteristik struktural antara kedua wilayah yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang berbeda. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, baik dalam konteks urbanisasi yang cepat di kota maupun dalam keterbatasan struktural yang masih membatasi pembangunan di desa.

5.1.1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, yang menandakan bahwa peningkatan output ekonomi di kota berperan penting dalam menurunkan kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan adanya mekanisme trickle-down effect, di mana pertumbuhan ekonomi mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta mobilitas ekonomi

masyarakat berpendapatan rendah. Struktur ekonomi perkotaan yang relatif lebih terdiversifikasi, didominasi oleh sektor industri dan jasa, memungkinkan proses transmisi pertumbuhan berlangsung lebih cepat dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan di wilayah perdesaan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di perdesaan belum bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara luas. Dominasi sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, keterbatasan diversifikasi kegiatan ekonomi, serta rendahnya nilai tambah sektor primer menyebabkan manfaat pertumbuhan cenderung terakumulasi pada kelompok tertentu dan tidak terdistribusi secara merata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan dual economy, yang menjelaskan adanya kesenjangan struktural antara sektor modern dan sektor tradisional dalam proses pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan tanpa diiringi oleh kebijakan redistributif dan strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta penciptaan lapangan kerja non-pertanian menjadi prasyarat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat bersifat pro-poor. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan sangat

bergantung pada struktur ekonomi wilayah, kualitas kelembagaan, serta keberpihakan kebijakan terhadap kelompok masyarakat miskin.

5.1.2 Pengaruh Variabel Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Faktor inflasi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kedua wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Inflasi meningkatkan biaya hidup, menurunkan daya beli, dan memperburuk kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan pokok. Dampak inflasi lebih terasa di wilayah perkotaan karena struktur konsumsi masyarakatnya sangat bergantung pada mekanisme pasar serta tingginya biaya hidup, terutama untuk kebutuhan pangan, perumahan, dan transportasi. Sementara itu, di wilayah pedesaan, meskipun sebagian kebutuhan dasar dapat dipenuhi secara mandiri, inflasi tetap berpengaruh melalui kenaikan harga input pertanian dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya menekan pendapatan riil rumah tangga miskin.

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki implikasi kesejahteraan (*welfare effect*) yang bersifat regresif, di mana kelompok masyarakat miskin menanggung beban yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Rumah tangga miskin memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan penyesuaian konsumsi atau menabung sebagai bantalan terhadap kenaikan harga. Kondisi ini menyebabkan inflasi tidak hanya memperburuk tingkat kemiskinan absolut, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial ekonomi, khususnya bagi kelompok pekerja informal dan petani kecil yang pendapatannya

tidak meningkat seiring dengan kenaikan harga.

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat utama dalam kebijakan makroekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengendalian inflasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter secara nasional, tetapi juga memerlukan kebijakan berbasis wilayah yang mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, pengendalian harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi menjadi kunci, sementara di wilayah perdesaan, stabilisasi harga input pertanian dan perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas menjadi faktor penting. Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi dan kontekstual berperan strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

5.1.3 Pengaruh Variabel Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Temuan lainnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kedua wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Di wilayah perkotaan, tingginya tingkat pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja formal dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk miskin terserap ke dalam sektor informal dengan produktivitas rendah, tingkat upah yang tidak stabil, serta minim perlindungan sosial. Akibatnya, meskipun secara statistik seseorang tergolong bekerja, pendapatan yang diperoleh belum mampu mengangkat rumah tangga keluar dari kemiskinan (*working poor*).

Di wilayah perdesaan, pengangguran dan setengah menganggur lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan diversifikasi sektor ekonomi dan tingginya ketergantungan pada sektor pertanian musiman. Fluktuasi kegiatan pertanian yang dipengaruhi oleh musim, iklim, dan harga komoditas menyebabkan pendapatan rumah tangga tidak bersifat berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja non-pertanian membuat masyarakat desa memiliki pilihan kerja yang sempit, sehingga risiko kemiskinan meningkat ketika terjadi guncangan ekonomi atau gagal panen.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa pengangguran bukan semata-mata permasalahan kuantitas kesempatan kerja, tetapi juga kualitas dan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, kebijakan penciptaan lapangan kerja produktif perlu diiringi dengan penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor ekonomi lokal, serta pengembangan usaha mikro dan kecil. Pendekatan ini menjadi krusial agar penyerapan tenaga kerja tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga berdampak nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

5.1.4 Peran Bantuan Sosial Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Dalam konteks kebijakan sosial, bantuan sosial terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, namun tidak signifikan di wilayah pedesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) relatif lebih efektif di wilayah perkotaan. Efektivitas tersebut didukung oleh sistem administrasi yang lebih tertata, ketersediaan data kependudukan yang lebih akurat, serta akses masyarakat perkotaan yang lebih baik terhadap layanan publik dan sistem keuangan. Dengan kondisi tersebut, bantuan sosial mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga miskin di perkotaan.

Sebaliknya, di wilayah pedesaan, bantuan sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan masih adanya kendala struktural dalam implementasi program bantuan sosial, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan distribusi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Selain itu, karakteristik masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan berpotensi menimbulkan dependency trap, di mana bantuan sosial belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi penerima. Kondisi ini menyebabkan dampak bantuan sosial terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan bersifat terbatas dan kurang berkelanjutan.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa bantuan sosial pada dasarnya berfungsi sebagai *social safety net* jangka pendek yang bertujuan melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas jangka panjang bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas mekanisme pendataan, ketepatan sasaran, serta sinerginya dengan program pemberdayaan ekonomi produktif. Integrasi bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, dan akses pembiayaan produktif menjadi kunci agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

5.1.5 Kontribusi Zakat Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Sementara itu, zakat menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Temuan ini menegaskan bahwa zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat fiskal, zakat memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang melekat, sehingga mampu menjangkau kelompok miskin secara lebih berkelanjutan. Di wilayah perkotaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat yang relatif lebih terorganisir melalui lembaga amil zakat berkontribusi memperkuat jaring pengaman ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Di wilayah perdesaan, pengaruh zakat terhadap penurunan kemiskinan terutama tercermin melalui pendayagunaan zakat produktif. Zakat produktif telah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, pengembangan kegiatan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas ekonomi keluarga miskin, ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan dalam Islam, di mana zakat tidak hanya diberikan untuk konsumsi sesaat, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, zakat berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan struktural yang sering kali dialami oleh masyarakat perdesaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperkuat peran zakat sebagai complementary fiscal instrument yang mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat melengkapi keterbatasan instrumen fiskal negara dengan pendekatan berbasis nilai, solidaritas sosial, dan keadilan distributif. Sinergi antara pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan kebijakan pembangunan nasional berpotensi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, zakat tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memiliki signifikansi ekonomi dan kebijakan yang kuat dalam pembangunan inklusif di Indonesia.

5.1.6 Perbedaan Pengaruh antara Variabel-Variabel Tersebut Terhadap Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, zakat, dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan memiliki perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi, kondisi sosial, serta tingkat pembangunan antarwilayah memengaruhi efektivitas masing-masing variabel dalam menurunkan maupun meningkatkan tingkat kemiskinan.

Pada wilayah perkotaan, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di perkotaan mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, di wilayah pedesaan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di desa belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang kurang menyentuh masyarakat lapisan bawah.

Variabel inflasi menunjukkan perbedaan pengaruh yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan, di wilayah pedesaan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

masyarakat perdesaan lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok karena tingkat pendapatan yang relatif rendah dan keterbatasan daya beli masyarakat desa dibandingkan masyarakat perkotaan.

Variabel pengangguran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat miskin karena menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, pengaruh pengangguran di wilayah perdesaan cenderung lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan, yang menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan kerja produktif di desa menyebabkan masyarakat lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan.

Pada aspek kebijakan sosial, bantuan sosial menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan, tetapi tidak berpengaruh signifikan di wilayah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial di perkotaan relatif lebih efektif karena didukung oleh akses distribusi, administrasi, dan infrastruktur pelayanan yang lebih baik. Sementara itu, di wilayah perdesaan efektivitas bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala seperti ketepatan sasaran, keterbatasan akses, serta rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, variabel zakat menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting sebagai instrumen

distribusi pendapatan dan perlindungan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Pengaruh zakat yang konsisten di kedua wilayah memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan konsumtif maupun pemberdayaan ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, perbedaan pengaruh antarvariabel tersebut menegaskan bahwa karakteristik kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan tidak dapat diperlakukan secara seragam. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dirancang secara lebih spesifik sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masing-masing wilayah agar program pembangunan dan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5.1.7 Pengaruh Panjang Jalan Aspal di Wilayah Perkotaan Terhadap Aksesibilitas Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Dari sisi infrastruktur, panjang jalan aspal di wilayah perkotaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Infrastruktur transportasi yang memadai meningkatkan mobilitas tenaga kerja, memperlancar arus barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik. Kondisi ini memperluas akses masyarakat miskin terhadap pasar kerja, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya konektivitas fisik, peluang ekonomi di wilayah perkotaan menjadi lebih terbuka dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur

jalan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang bersifat inklusif. Jalan yang berkualitas mempercepat integrasi antarwilayah, mengurangi kesenjangan akses antar kawasan, serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi. Dalam konteks perkotaan, keberadaan jaringan jalan yang baik juga mendukung efisiensi sektor informal dan usaha mikro kecil, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat miskin kota. Dengan demikian, infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan sosial.

Temuan ini memperkuat teori pembangunan infrastruktur yang menyatakan bahwa konektivitas fisik merupakan prasyarat utama bagi inklusivitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur jalan yang memadai memungkinkan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata, sekaligus mengurangi hambatan struktural yang menghalangi kelompok miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses jalan memiliki peran penting dalam strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

5.1.8 Dana Desa Berkontribusi Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Pedesaan di Indonesia

Untuk wilayah pedesaan, pengaruh infrastruktur terhadap penurunan kemiskinan lebih banyak dimediasi melalui kebijakan fiskal seperti Dana Desa, yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dana Desa telah berkontribusi besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar tersebut memperbaiki aksesibilitas ekonomi, memperlancar aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian, serta mengurangi biaya transaksi yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui pola padat karya dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal, Dana Desa mampu menciptakan lapangan kerja sementara maupun permanen, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Dana Desa berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan dari ketergantungan pada sektor primer menuju kegiatan ekonomi yang lebih beragam dan bernilai tambah, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan secara lebih berkelanjutan.

Selain itu, alokasi Dana Desa terbukti menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat perdesaan. Infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang dibiayai melalui Dana Desa meningkatkan sirkulasi ekonomi di tingkat desa, memperkuat jaringan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal berbasis desentralisasi, seperti Dana Desa, memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan perdesaan, terutama ketika dikelola secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan struktural yang nyata antara faktor-faktor penentu kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, kemiskinan lebih dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan efektivitas bantuan sosial, sedangkan di perdesaan, kemiskinan lebih dipengaruhi oleh inflasi, pengangguran, zakat, serta efektivitas kebijakan fiskal melalui Dana Desa. Perbedaan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang bersifat tersegmentasi dan kontekstual. Upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan struktur ekonomi dan sosial masing-masing wilayah.

Temuan penelitian ini memperkuat konsep pro-poor growth dan inclusive development, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara kebijakan makroekonomi yang stabil,

kebijakan sosial yang tepat sasaran, serta kebijakan fiskal berbasis desentralisasi menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan memerlukan kombinasi kebijakan yang terpadu antara dimensi ekonomi, sosial, fiskal, dan kelembagaan. Pendekatan yang menyeluruh inilah yang akan mampu memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar inklusif dan berpihak pada kelompok masyarakat paling rentan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun penelitian selanjutnya. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara kebijakan makroekonomi dan program sosial agar penurunan kemiskinan lebih merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan ekonomi hendaknya diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, terutama di sektor-sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah. Dalam konteks inflasi, diperlukan pengendalian harga kebutuhan pokok melalui kebijakan stabilisasi pangan dan distribusi yang efektif, agar daya beli masyarakat miskin tetap terjaga.

Program bantuan sosial dan zakat juga perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui penargetan yang lebih tepat sasaran dan integrasi data kemiskinan yang terpadu antara lembaga pemerintah dan institusi filantropi Islam. Di wilayah perdesaan, optimalisasi dana desa hendaknya difokuskan pada pembangunan

infrastruktur dasar yang mendorong produktivitas ekonomi lokal, seperti jalan aspal, irigasi, dan fasilitas pasar desa, sehingga memberikan efek pengganda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan waktu dan wilayah observasi serta mempertimbangkan pendekatan metodologis yang lebih dinamis, seperti model panel spasial atau data non-linier, agar hubungan antarvariabel dapat dipahami secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Keterbatasan utama terletak pada ketersediaan dan kelengkapan data panel, terutama untuk variabel sosial seperti zakat dan bantuan sosial yang belum terdokumentasi secara merata di seluruh wilayah dan periode penelitian. Selain itu, model estimasi yang digunakan masih berbasis hubungan linier, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika non-linier dan interaksi kompleks antarvariabel ekonomi dan sosial.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada dimensi ekonomi kemiskinan, sementara aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan belum terakomodasi secara menyeluruh. Di samping itu, periode observasi yang relatif terbatas menjadikan hasil penelitian ini lebih bersifat representatif terhadap kondisi jangka menengah, bukan jangka panjang. Meskipun

demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan determinan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia, serta menjadi dasar yang kuat bagi penelitian lanjutan dengan cakupan data dan pendekatan metodologis yang lebih luas.

5.4. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting yang dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Kedua dimensi ini mencerminkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan kebijakan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan yang sangat berbeda. Implikasi ini diharapkan mampu memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan arah strategis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan sosial.

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat dan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara variabel-variabel makroekonomi, instrumen redistribusi sosial, serta pembangunan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan mendukung teori pertumbuhan ekonomi klasik dan model trickle-down effect (Todaro & Smith, 2020), meskipun efeknya tidak selalu merata antarwilayah. Sementara itu, pengaruh positif inflasi terhadap kemiskinan di perdesaan menunjukkan relevansi teori

strukturalis yang menekankan pentingnya stabilitas harga bagi kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah (Ravallion, 2016).

Selain itu, hasil penelitian memperkaya literatur empiris mengenai efektivitas kebijakan sosial, seperti bantuan sosial dan zakat, yang terbukti berkontribusi signifikan dalam menekan angka kemiskinan, terutama di perdesaan. Hal ini menegaskan teori redistribusi pendapatan dan keadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam, di mana zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen keagamaan tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model multidimensional kemiskinan yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan spasial secara simultan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki relevansi tinggi bagi pemerintah, lembaga sosial, dan otoritas keuangan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berbasis bukti empiris. Di wilayah perkotaan, hasil penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan yang menekankan stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan peningkatan kesempatan kerja formal. Pemerintah daerah dapat memperluas program pelatihan kerja dan kewirausahaan perkotaan sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal.

Di sisi lain, hasil penelitian pada wilayah perdesaan menegaskan pentingnya peran dana desa dan zakat produktif dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat. Program pembangunan infrastruktur dasar,

seperti jalan aspal, memiliki dampak nyata dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan memperluas akses masyarakat desa terhadap pasar dan layanan publik. Selain itu, integrasi antara data penerima zakat dan bantuan sosial dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dengan menghindari tumpang tindih dan memperluas jangkauan manfaat.

Dengan demikian, implikasi praktis penelitian ini tidak hanya memberikan arah bagi peningkatan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi, tetapi juga mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perbedaan karakteristik wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. A., & Bukido, R. (2020). Poverty and religiosity: The ‘missing link’ from Islamic perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(2), 173-186.
- Agenor, P. R., & Montiel, P. J. (2015). *Development Macroeconomics*. Princeton University Press
- Alam, A., Suratman, A., & Setyowati, E. (2023). The Effects of Unemployment, Management of Zakat Funds, and Economic Expansion on Poverty. *Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2). doi:<https://doi.org/10.32678/ijei.v14i2.501>
- Alexandro, R., Hariatama, F., & Saputra, S. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Anterior Jurnal*, 86 - 92.
- Al-Faizin, A. W., Insani, T. D., & Widiastuti, T. (2017). Zakat as an obligatory system and its implications for social psychology of society (social Tafsīr of Sūrah Al-Tawbah: 103). *International Journal of Zakat*, 2(2), 43-53.
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59-70.
- Alkire, S. (2005). *Valuing freedoms: Sen's capability approach and poverty reduction*. Oxford University Press, USA.
- Alkire, S. (2007). Choosing dimensions: The capability approach and multidimensional poverty. In N. Kakwani & J. Silber (Eds.), *The many dimensions of poverty*. New York: Palgrave Macmillan.
- Allardt, E. (1993). Having, loving, being: An alternative to the Swedish model of welfare research. *The quality of life*, 8, 88-95.
- al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Al-Razy, A. bin F. bin Z. al-Q. (1979). *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anggraeni, R., Suryani, R., & Amin, M. (2023). The role of zakat in reducing income inequality and poverty during the COVID-19 pandemic: Evidence

- from Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(2), 123-145.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4), 51-69.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924-942.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2018). Zakat for poverty alleviation and income inequality reduction: West Java, Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85-100.
- Azizah, S. N., Febriani, R., & Arifin, S. (2022). Implementasi Zakat Sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 26-40.
- Badan Pusat Statistik. (2018, July 16). Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023, July 17). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Optimization of zakat instrument in Indonesia's poverty alleviation programme. *Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect*, 1-19.
- Beik, I. S., & Ayuniyyah, Q. (2018). Fiqh of asnaf in the distribution of zakat: Case study of the national board of zakat of Indonesia (BAZNAS). *Al-Infaq: Jurnal*

- Ekonomi Islam*, 6(2), 201-216.
- Bonner, M. (1996). Definitions of poverty and the rise of the Muslim urban poor. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 6(3), 335-344.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute
- Chimhowu, A. O. (2009). Poverty. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 408-415). Oxford: Elsevier.
- Choiriyah, E. A. N. M., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). Zakat and poverty alleviation in Indonesia: a panel analysis at provincial level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 811-832.
- Diana, A., Sari, Y. P., & Rizkina, A. (2023). Inflasi Komoditas Administered Price Dan Daya Beli Masyarakat Selama Pandemi Covid-19: Studi KASUS PROVINSI ACEH. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 82-91.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit, and Banking*, 33(2), 160-178.
- ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107.
- Firdausy, C. M., & Budisetyowati, D. A. (2022). Variables, dimensions, and indicators important to develop the multidimensional poverty line measurement in Indonesia. *Social indicators research*, 162(2), 763-802.
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306-336.
- Hany, I. H., & Islamiyati, D. (2020). Pengaruh ZIS dan faktor Makroekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(1), 118-131.
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2023). Analysis of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), HDI, Inflation, and GRDP on Poverty Alleviation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1189–1196. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7934>
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh , inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53-62.

- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2010, January). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. In *Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi, Malaysia (pp. 261-281).
- Hendajany, N., & Rizal, D. (2020). Ketimpangan Penghasilan Berdasarkan Status Pekerjaan dalam Model Imbal Jasa Pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 133-145.
- Holle, M. (2019). Zakat Profesi Langkah Cerdas Mengatasi Kesenjangan Dan Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2010, January). Management of zakah: centralised vs decentralised approach. In *Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi (pp. 351-374).
- Ibnu Khaldun. (2005). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Terjemahan, Penerbit Al-Kautsar.
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi, A. (2016). Penetapan kriteria dan variabel pendataan penduduk miskin yang komprehensif dalam rangka perlindungan penduduk miskin di Kabupaten/Kota. *Kota, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute*.
- Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195-208.
- Jamaludin, J., & Roisyatin, R. (2020). Kesejahteraan Mustahiq dan Non Mustahiq Perspektif Maqaashidus Syariah Pada Petani Sehat Dompot Dhuafa Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 103-114.
- Kasri, R. (2014). *The Role of Zakah in Poverty Alleviation: Evidence from Indonesia* (Doctoral dissertation, Durham University).
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.

- Khaleel, F. (2017). Redefining Poverty and Its Measurement: An Islamic Political Economy Perspective. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(2).
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The influence of zakat on economic growth and welfare society in Indonesia.
- Lestari, R. S. D., & Alwi, M. A. (2022). Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Untuk Masyarakat Usia Produktif. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 19-36.
- Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Terjemahan, Penerbit Dar al-Fikr.
- Metwally, M. M. (1997). Economic consequences of applying Islamic principles in Muslim societies. *International Journal of Social Economics*, 24(7/8/9), 941-957.
- Mintarti, N., Beik, I. S., Tanjung, H., Haryono, A. R., Tsani, T., & Kasirin, U. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Jakarta: IMZ.
- Mosley, P. (Ed.). (2002). *The New Poverty Strategies: What Have They Achieved? what Have We Learned?*. Springer.
- Mutmainah, S., Rahayu, N. W. I. ., Fauzan, F., & Sholichin, A. A. . (2024). The influence of zakat, Human Development Index, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 363–382. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art20>
- Nailufar, F., Jannah, M., & Juanda, R. (2022). Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Perkapita terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(2), 140-147.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Journal of Applied Business & Economics (JABE)*, 9(2).
- Nurhayati, C., Hamid, S., & Mahfud, A. (2021). The impact of zakat on economic growth in Indonesia. *Ekonomi Islam*, 12(2), 315-332.
- Nurkholis, A. (2018). Teori pembangunan sumberdaya manusia: Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory.

- Oei, I. (2009). *Kiat investasi valas, emas, saham*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Keefektifan Pembiayaan Dalam Lingkup Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Ekonomi Menengah Kebawah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 750-756.
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Keefektifan Pembiayaan Dalam Lingkup Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Ekonomi Menengah Kebawah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 750-756.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107.
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Mubin, M. K. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346.

References

- Ridlo, M., & Setyani, D. (2020). Pengaruh zakat, inflasi dan perkembangan usaha mikro kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2018 (studi kasus di Indonesia). *EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1).
- Rist, R. C., Martin, F. P., & Fernandez, A. M. (Eds.). (2015). *Poverty, inequality, and evaluation: Changing perspectives*. World Bank Publications.
- Robeyns, I. (2005). The capability approach: a theoretical survey. *Journal of human development*, 6(1), 93-117.
- Rodin, D. (2015). Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(1), 137-158.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2020). Socio-economic determinants of multidimensional poverty in the rural and urban areas of East Java. *Nutrition*, 1(3), 1445-1448.
- Sapthu, A. (2023). Listrik dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

- Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 199-207.
- Saputro, E. G., & Sidiq, S. (2020). The role of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) in reducing poverty in Aceh province. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(SI), 63-94.
- Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2019). Investigating the impact of zakat on poverty alleviation: A case from West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 1-12.
- Shirazi, N. S. (1993). Perception of poverty in traditional and Islamic frameworks. *Islamic studies*, 32(3), 319-328.
- Suci Wulandari Siregar, Jasman, Z. R., Indarningsih, N. A., & Hasbi. (2025). Sustainable Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah on Multidimensional Poverty and Enhancing Economic Growth in 34 Indonesia Provinces. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 5(2), 216–243. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v5i2.350>
- Suharto, Edi. (2006) *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung. Cet. II
- Suryaningrum, D. A., Ayuk, N. M. T., Retnowati, D., Damayanti, F., Langoday, T. O., Mas, I. G. A. M. A., ... & Yasmita, I. G. A. L. (2023). *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Susilowati, S. H., Sinaga, B. M., & Limbong, W. H. (2007). Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia: Analisis simulasi dengan sistem neraca sosial ekonomi. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25(1), 11-36.
- Swastika, D. K., & Supriyatna, Y. (2008). The characteristics of poverty and its alleviation in Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 26, No. 2, pp. 103-115).
- World Bank. (2020, April). *Poverty & Equity Brief Indonesia*. DataBank | The World Bank.
- Yahaya, S., & Halim, S. N. (2022). The Role Of Zakat In Wealth Protection And

- Poverty Eradication Toward Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal website: journal. zakatkedah. com. my*, 4(1).
- Yunus, M. (1999). *Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle Against World Poverty*. PublicAffairs
- Yustitia, E., Thoriq, A. M., & Ardiansyah, H. (2022). Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta Periode 2011–2020. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6(1), 43-52.
- Yusuf, A. A. (2018). *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. Unpad Press.
- Zaenal, M. H. (2020). Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro Indonesia. *Books-Puskas Baznas*, 4.
- Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. V., & SSTP, M. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas M.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Data kemiskinan

38 Provinsi			Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)																					
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013	2013
	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)	Semester I (Maret)
ACEH	1,2	1,5	1,93	3,2	1,62	2,93	1,79	3,4	1,55	3,28	1,59	3,15	1,58	3,42	1,55	3,59	2,3	3,96	2,24	3,44	1,82	3,34	2,34	3,44
SUMATERA UTARA	1,5	1,8	1,24	1,29	1,4	1,32	1,5	1,54	1,48	1,55	1,23	1,54	1,49	1,64	1,53	1,9	1,75	1,79	1,6	1,7	1,24	1,69	1,49	1,58
SUMATERA BARAT	1,8	1,4	0,69	0,96	0,65	0,96	0,87	1,21	0,74	1,07	0,77	1,09	0,66	1,33	0,75	1,18	0,75	1,33	0,79	1,1	0,65	1,12	1	1,02
RIAU	1,7	1,01	0,99	1	0,92	1,21	1,01	1,09	0,97	1,25	0,91	1,27	0,99	1,33	1,32	0,93	1,63	1,09	1,57	0,89	1,09	1,15	1,2	0,8
JAMBI	1,2	1,1	1,62	0,99	1,67	0,93	2,2	0,85	1,71	0,8	1,74	0,98	1,68	1,12	1,75	1,07	2,1	1,19	2,13	1,12	1,35	0,91	1,42	0,8
SUMATERA SELATAN	8,9	1,7	1,78	1,69	2	1,94	2,19	2,3	2,02	2,12	2,04	2,16	2,08	2,48	2,04	2,36	1,79	2,14	2,35	2,53	2,11	2,33	1,95	2,15
BENGKULU	1,5	1,14	2,22	2,1	2,61	2,34	2,78	2,47	2,44	2,38	2,44	2,5	2,51	2,64	2,97	2,8	2,83	3,29	3,93	3,28	2,9	2,72	2,29	3,32
LAMPUNG	1,3	1,2	1,2	1,85	1,23	2,1	1,27	2,17	1,22	2,2	1,47	2,14	1,48	2,28	1,55	2,4	1,86	2,91	1,67	2,6	1,85	2,36	1,99	2,37
KEP. BANGKA BELITUNG	1,08	1,5	0,49	0,82	0,39	0,87	0,4	0,88	0,44	0,79	0,33	0,74	0,36	1,06	0,26	0,75	0,38	0,98	0,38	0,95	0,65	0,81	0,37	0,71
KEP. RIAU	2,1	1,1	0,7	1,74	1	1,41	1,02	1,75	1,02	1,84	0,59	1,58	0,82	2,06	0,86	1,61	0,77	1,53	0,91	1,26	1	0,61	0,75	0,44
DKU JAKARTA	1,05	1,2	0,69	-	0,77	-	0,64	-	0,59	-	0,5	-	0,51	-	0,49	-	0,46	-	0,52	0	0,39	-	0,63	-
JAWA BARAT	1,2	1,5	1,1	1,4	1,21	1,72	1,36	1,88	1,02	1,49	1,03	1,31	1,13	1,84	1,2	2,07	1,17	2,2	1,51	1,87	1,4	1,78	1,18	1,6
JAWA TENGAH	8	1,7	1,67	1,83	1,56	2	1,68	2,15	1,53	1,92	1,32	1,75	1,57	2,14	1,83	2,59	1,78	2,9	2,02	2,8	1,85	2,59	2,01	2,38
DI YOGYAKARTA	6,8	0,19	1,62	2,01	1,93	2,25	2,35	2,61	1,86	2,16	1,73	1,78	1,91	2,48	2,15	2,29	1,78	3,41	2,55	3,7	2,22	2,11	2,08	3,02
JAWA TIMUR	7,5	1,11	1,19	2,19	1,14	2,21	1,31	2,48	1,23	2,5	1,15	2,55	1,17	2,8	1,18	2,6	1,1	2,83	1,28	2,79	1,16	2,49	1,31	2,32
BANTEN	6,2	8,5	1,25	1,06	0,96	1,22	0,98	1,37	0,84	1,38	0,63	1,1	0,69	1,14	0,7	1,22	0,61	1,21	0,87	1,08	0,76	0,98	0,66	0,76
BALI	1	8	0,48	0,74	0,62	0,64	0,65	0,75	0,47	0,65	0,49	0,64	0,5	1,04	0,58	0,87	0,45	0,62	0,63	0,71	0,45	0,38	0,6	0,28
NUSA TENGGARA BARAT	1	1,7	2,28	2,48	2,58	2,4	2,35	2,13	2,54	2,61	2,5	2,17	3,24	2,45	3,59	2,76	3,14	2,9	4,05	2,66	2,73	2,44	2,96	2,59
NUSA TENGGARA TIMUR	1,45	1,8	1,21	4,07	1,51	4,35	1,39	4,81	1,19	4,9	1,16	5,09	1,61	4,59	1,82	5,03	1,75	5,44	1,66	4,66	1,82	3,71	1,41	3,88
KALIMANTAN BARAT	1,86	1,3	0,59	1,29	0,54	1,33	0,59	1,28	0,75	1,14	0,76	1,35	0,84	1,36	0,91	1,38	0,66	1,59	0,86	1,48	0,83	1,05	0,6	1,45
KALIMANTAN TENGAH	7,9	1,8	0,59	0,72	0,83	0,98	0,69	0,73	0,82	0,79	0,71	0,69	0,88	0,76	0,78	0,87	0,54	1,03	0,73	0,97	0,8	0,72	0,63	0,98
KALIMANTAN SELATAN	6,7	1,2	0,42	0,8	0,52	0,75	0,58	0,76	0,66	0,74	0,6	0,79	0,61	0,76	0,56	0,85	0,58	0,81	0,55	0,89	0,68	0,59	0,36	0,65
KALIMANTAN TIMUR	7,5	10	0,6	1,15	0,67	1,69	1,02	1,67	0,66	1,74	0,61	1,53	0,66	1,23	0,47	1,71	0,55	1,94	0,62	1,38	0,7	1,68	0,42	1,5
KALIMANTAN UTARA	8	1,1	0,56	0,78	0,74	1,16	0,7	1,15	0,59	1,22	0,85	1,63	0,96	1,28	0,99	1,51	0,59	1,04	0,51	1,14	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	6,9	1,49	0,69	1,57	0,83	1,52	0,8	1,76	0,78	1,54	0,77	1,62	0,77	1,77	0,79	1,89	0,78	2,19	0,82	1,78	0,73	1,59	0,94	1,38
SULAWESI TENGAH	1,5	1,6	1,53	2,4	1,49	2,84	1,55	2,82	1,68	2,96	1,43	2,71	2,02	2,88	2,05	2,73	1,89	3,01	1,78	2,76	1,21	2,49	1,71	3,54
SULAWESI SELATAN	1,87	1,5	0,71	2,31	0,76	1,87	0,79	2,06	0,69	2,17	0,63	2,07	0,83	2,07	0,81	2,32	0,65	2,56	0,66	2,3	0,8	2,01	0,61	2,28
SULAWESI TENGGARA	1,65	1,8	1,08	2,51	1,03	2,27	1,33	2,62	1,35	2,48	1,35	2,79	0,73	2,86	0,95	2,3	1,33	3,37	1,29	3,18	0,86	2,43	0,51	2,74
GORONTALO	1,2	1,5	0,67	4,73	0,32	5,18	0,58	4,66	0,39	4,34	0,43	4,26	0,78	4,5	0,87	5,29	0,9	5,93	1,02	5,53	0,93	4,52	0,32	4,65
SULAWESI BARAT	1,19	1,2	1,66	1,84	1,59	2,37	1,52	1,82	1,93	1,87	1,32	1,88	1,22	1,92	0,89	2,14	0,9	2,22	1,49	2,04	0,98	1,58	0,82	2,21
MALUKU	1,2	1,3	0,83	4,77	0,79	4,46	0,94	5,65	0,82	5,55	0,72	5,33	0,94	5,29	1,22	5,07	1,47	5,06	1,36	4,89	1,53	5,23	1,49	5,3
MALUKU UTARA	1,5	1,7	1,05	1,1	0,55	1,06	0,97	0,97	0,38	1,16	0,53	1,03	0,69	0,97	0,67	0,86	0,37	0,86	0,29	0,86	0,44	1,35	0,31	0,95
PAPUA BARAT	6,2	6,7	1,78	7,18	1,17	7,38	1,2	8,73	0,99	9,29	0,96	8,97	0,71	10,11	0,99	10,43	0,86	11,19	0,72	9,6	1,3	8,28	0,6	8,81
PAPUA BARAT DAYA	6,8	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA	8,81	8,2	0,87	8,48	0,53	8,47	0,85	7,52	0,62	8,37	0,71	9,76	0,84	8,98	0,65	10,03	0,88	12,39	0,79	11,72	0,73	8,96	1,11	8,92
PAPUA SELATAN	7,5	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	3,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	9,15	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	1,53	1,47	1,16	2,03	1,19	2,13	1,29	2,27	1,13	2,21	1,05	2,18	1,17	2,37	1,24	2,49	1,19	2,74	1,4	2,55	1,25	2,26	1,25	2,24

2. Data PDRB

38 Provinsi	[Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen)											
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ACEH	1,12	1,11	1,1	1,09	1,06	1,02	1,04	1,06	1,08	1,11	1,2	1,26
SUMATERA UTARA	5,15	5,12	4,99	5,07	5,15	4,99	4,95	4,98	4,96	4,91	4,89	4,89
SUMATERA BARAT	1,5	1,52	1,49	1,49	1,53	1,53	1,54	1,56	1,55	1,54	1,54	1,53
RIAU	4,98	5	5,18	4,95	4,62	4,74	5,02	5,13	5,4	5,6	6,36	6,32
JAMBI	1,44	1,43	1,45	1,37	1,3	1,35	1,39	1,38	1,36	1,33	1,36	1,35
SUMATERA SELATAN	3,07	3,06	3,08	2,91	2,88	2,83	2,8	2,79	2,8	2,85	2,87	2,92
BENGKULU	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42
LAMPUNG	2,21	2,19	2,16	2,19	2,24	2,22	2,22	2,23	2,21	2,17	2,16	2,13
KEP. BANGKA BELITUNG	0,51	0,5	0,5	0,51	0,48	0,47	0,49	0,51	0,52	0,52	0,53	0,52
KEP. RIAU	1,61	1,62	1,61	1,63	1,61	1,67	1,66	1,66	1,71	1,71	1,69	1,7
DKI JAKARTA	16,7	16,77	16,65	17,18	17,55	17,55	17,31	17,21	17,11	17,07	16,5	16,1
JAWA BARAT	12,81	12,79	12,66	13,01	13,21	13,24	13,09	13,01	13,1	13,09	12,97	13,11
JAWA TENGAH	8,28	8,26	8,14	8,38	8,55	8,48	8,47	8,53	8,61	8,68	8,64	8,64
DI YOGYAKARTA	0,89	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88
JAWA TIMUR	14,36	14,39	14,27	14,48	14,59	14,62	14,61	14,65	14,7	14,52	14,4	14,39
BANTEN	3,95	3,97	3,9	3,93	3,97	4,12	4,1	4,1	4,1	4,11	4,01	3,93
BALI	1,36	1,34	1,28	1,3	1,42	1,57	1,56	1,55	1,54	1,51	1,46	1,4
NUSA TENGGARA BARAT	0,82	0,81	0,82	0,83	0,85	0,83	0,83	0,9	0,92	0,91	0,76	0,77
NUSA TENGGARA TIMUR	0,64	0,63	0,62	0,65	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64
KALIMANTAN BARAT	1,35	1,34	1,34	1,36	1,36	1,32	1,3	1,29	1,28	1,26	1,24	1,24
KALIMANTAN TENGAH	1,01	1,02	1,04	1	0,97	0,94	0,93	0,92	0,89	0,86	0,84	0,85
KALIMANTAN SELATAN	1,32	1,31	1,31	1,17	1,14	1,13	1,15	1,16	1,16	1,18	1,2	1,21
KALIMANTAN TIMUR	4,13	4,11	4,81	4,11	3,86	4,07	4,24	4,31	4,03	4,33	4,94	5,4
KALIMANTAN UTARA	0,73	0,72	0,72	0,66	0,64	0,6	0,57	0,56	0,52	0,53	0,55	0,55
SULAWESI UTARA	0,85	0,84	0,82	0,84	0,84	0,81	0,8	0,8	0,8	0,78	0,76	0,74
SULAWESI TENGAH	1,7	1,69	1,69	1,46	1,25	1,16	1,12	0,97	0,95	0,92	0,84	0,83
SULAWESI SELATAN	3,2	3,18	3,16	3,21	3,2	3,14	3,08	3,02	2,99	2,92	2,79	2,69
SULAWESI TENGGARA	0,87	0,86	0,83	0,82	0,83	0,81	0,79	0,78	0,77	0,75	0,74	0,74
GORONTALO	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23
SULAWESI BARAT	0,3	0,29	0,28	0,3	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26
MALUKU	0,29	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,3	0,29
MALUKU UTARA	0,42	0,41	0,37	0,31	0,27	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22
PAPUA BARAT	0,31	0,3	0,48	0,5	0,53	0,53	0,53	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55
PAPUA BARAT DAYA	0,19	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA	0,39	0,4	1,37	1,39	1,26	1,18	1,41	1,37	1,37	1,29	1,25	1,28
PAPUA SELATAN	0,16	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	0,74	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	0,13	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100

3. Data Inflasi

90 Kota Inflasi (2018=100)	Indeks Harga Konsumen 90 Kota (Umum)												
	2024												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Tahunan
KOTA MEULABOH	119,52	120,05	119,21	118,49	119,18	119,73	119,91	120,07	120,61	120,87	121,14	120,43	119,9342
KOTA BANDA ACEH	115,12	116,34	115,74	115,93	116,09	116,16	116,43	116,19	116,27	116,07	116,41	116,79	116,1283
KOTA LHOKEUMAWE	115,16	116,11	115,62	115,19	115,71	115,86	115,82	115,84	116,16	115,92	116,25	116,39	115,8358
KOTA SIBOLGA	116,83	117,35	116,31	116,65	116,83	117,55	117,96	118,12	118,72	118,49	118,18	118,27	117,605
KOTA PEMATANG SIANTAR	115,24	115,56	115,19	114,82	115,33	115,93	116,15	116,01	116,21	116,03	116,36	117,11	115,8283
KOTA MEDAN	113,73	112,99	112,55	112,39	112,68	112,92	113,24	113,26	113,58	113,64	114,21	114,79	113,3317
KOTA PADANGSIDIMPUAN	116,92	117,55	117,23	117,28	117,74	118,09	118,62	118,46	119,07	118,84	118,85	119,01	118,1383
KOTA GUNUNGSITOLI	116,54	115,98	114,68	114,18	114,59	114,83	116,32	116,39	116,92	116,26	117,06	117,31	115,9217
KOTA PADANG	115,92	115,45	115,29	115,28	115,73	115,69	116,26	116,26	116,42	116,47	117,17	117,57	116,1258
KOTA BUKITTINGGI	115,59	115,54	115,35	115,42	115,62	115,72	116,14	116,13	116,79	116,83	117,23	117,07	116,1192
TEMBILAHAN	113,24	113,36	113,18	113,64	113,79	113,82	114,29	113,66	113,68	113,63	114,24	114,37	113,7417
KOTA PEKANBARU	114,88	114,98	114,71	114,73	114,82	115,06	115,39	115,42	115,83	115,76	116,58	116,93	115,4242
KOTA DUMAI	115,62	115,76	115,59	115,37	115,61	115,94	116,87	116,73	117,25	117,01	117,92	117,89	116,4633
BUNGO	115,64	115,26	115,17	115,48	115,63	115,77	116,04	115,73	116,14	116,19	117,03	117,49	115,9642
KOTA JAMBI	115,63	115,28	115,57	115,62	116,29	116,38	116,85	116,41	116,91	117,38	118,41	118,71	116,662
KOTA PALEMBANG	113,41	113,27	113,69	114,07	113,99	114,35	114,78	114,72	115,06	115,67	116,31	116,58	114,6583
KOTA LUBUKLINGGAU	113,47	113,82	113,51	113,91	114,16	114,43	114,79	114,74	115,13	115,25	115,73	116,02	114,58
KOTA BENGKULU	113,76	113,81	114,28	114,59	114,79	114,93	115,59	115,51	115,68	116,11	116,35	116,63	115,1692
KOTA BANDAR LAMPUNG	115,15	115,76	115,89	116,14	116,11	116,22	116,25	116,65	117,13	117,36	118,59	118,61	116,655
KOTA METRO	115,26	116,91	115,96	116,21	116,51	116,59	116,87	116,79	117,19	117,71	118,69	118,65	116,945
TANJUNG PANDAN	117,21	117,34	118,07	118,29	119,72	119,76	120,47	119,98	121,58	120,92	120,67	119,98	119,4992
KOTA PANGKAL PINANG	113,29	113,21	113,45	114,19	114,11	114,66	114,99	115,06	115,77	115,63	115,69	115,99	114,667
KOTA BATAM	113,72	113,98	113,53	114,08	113,79	114,38	114,69	114,89	115	115,46	116,24	116,89	114,7208
KOTA TANJUNG PINANG	110,16	111,34	111,19	111,32	111,12	111,34	111,82	111,85	112,27	112,41	113,08	113,36	111,7717
DKI JAKARTA	112,72	112,36	112,88	113,25	113,22	113,22	113,43	113,44	113,61	113,81	114,15	114,72	113,4008
KOTA BOGOR	116,45	116,38	116,82	117,27	117,44	117,65	117,92	117,91	118,06	118,15	119,11	119,37	117,7108
KOTA SUKABUMI	113,82	114,12	114,21	114,87	115,09	115,27	115,54	115,52	115,74	115,85	116,13	116,45	115,2175
KOTA BANDUNG	115,91	116,19	114,48	114,76	114,97	115,13	115,39	115,37	115,45	115,59	115,84	116,21	115,4408
KOTA CIREBON	111,18	112,26	112,26	112,65	112,82	113,05	113,29	113,16	113,32	113,31	113,49	113,82	112,8842
KOTA BEKASI	116,19	116,28	116,79	117,35	117,54	117,71	118,04	117,95	118,01	118,23	118,71	119,35	117,6792
KOTA DEPOK	115,29	115,98	116,19	116,45	116,59	116,66	116,91	116,88	116,95	117,08	117,49	117,81	116,69
KOTA TASIKMALAYA	112,93	112,72	112,71	113,52	113,85	113,89	114,05	113,99	114,34	114,41	114,61	11	105,1683
CILACAP	113,72	114,32	114,42	114,77	115,01	115,15	115,17	115,23	115,65	115,74	116,33	116,49	115,1667
PURWOKERTO	114,63	114,38	114,95	115,35	115,51	115,61	115,78	115,79	116,2	116,49	116,93	117,08	115,725
KUDUS	113,26	113,8	114,18	114,47	114,77	114,79	11	115,02	115,42	115,68	116,25	116,47	106,2592
KOTA SURAKARTA	115,23	115,09	116,01	116,33	116,54	116,72	117,04	117,12	117,57	117,81	118	118,52	116,8317
KOTA SEMARANG	113,23	113,87	113,61	113,92	114,26	114,29	114,5	114,56	115	115,24	115,79	116,05	114,5267
KOTA TEGAL	115,21	115,39	115,83	116,22	116,68	116,63	116,77	116,88	117,32	117,68	118,2	118,46	116,7725
KOTA YOGYAKARTA	115,23	116,87	116,71	117,01	117,41	117,52	117,8	117,79	118,09	118,34	118,81	119,23	117,5675
JEMBER	115,43	116,94	116,56	116,79	117,08	117,15	117,32	117,32	117,59	117,66	118,04	118,3	117,1817
BANYUWANGI	112,12	112,48	113,08	113,28	113,53	113,63	113,64	113,73	113,75	113,85	114,28	114,5	113,4892
SUMENEP	115,45	115,92	116,49	116,93	117,71	117,29	117,16	117,39	118,19	118,99	119,97	120,82	117,6925
KOTA KEDIRI	113,55	113,49	114,09	114,14	114,51	114,78	114,92	115,01	115,39	115,57	116,06	116,26	114,8142
KOTA MALANG	112,65	112,98	113,47	113,73	114,01	114,01	114,27	114,39	114,56	114,91	115,32	115,57	114,1558
KOTA PROBOLINGGO	112,23	112,65	112,81	113,41	113,62	113,91	113,97	114,11	114,38	114,68	115,14	115,39	113,8583
KOTA MADIUN	113,01	113,38	113,39	113,52	113,69	113,78	113,85	113,91	114,2	114,51	115	115,26	113,9583
KOTA SURABAYA	115,21	115,73	115,79	116,18	116,24	116,47	116,6	116,72	117,18	117,55	117,81	118,17	116,6375
KOTA TANGERANG	112,32	112,48	112,73	113,42	113,52	113,71	113,73	11	113,86	114,05	114,78	115,37	105,0808
KOTA CILEGON	116,65	117,58	117,45	117,68	117,97	118,06	118,23	118,07	118,41	118,61	119,3	119,9	118,1592
KOTA SERANG	118,12	118,58	118,41	118,84	119,35	119,39	119,48	119,33	119,4	119,42	119,88	120,24	119,2033
SINGARAJA	114,65	115,93	115,61	115,46	115,81	116,13	116,38	116,69	116,63	117,09	118,16	118,67	116,4342
KOTA DENPASAR	113,54	113,58	113,99	114,05	114,44	114,27	114,72	114,96	114,93	115,15	115,48	116,05	114,5967
KOTA MATARAM	112,23	113,38	113,14	113,72	113,96	113	114,14	114,15	114,63	115,06	115,45	115,79	114,0542
KOTA BIMA	113,23	113,59	113,76	113,95	113,92	114,08	114,57	114,76	115,48	115,41	115,94	116,59	114,6067
WAINGAPU	112,32	112,48	113,82	114,78	114,76	115,92	116,33	114,93	114,52	114,91	114,44	114,79	114,5
MAUMERE	114,54	114,87	115,29	115,25	115,28	114,83	115,58	116,01	116,19	116,3	116,61	117,32	115,6725
KOTA KUPANG	114	113,83	114,65	114,48	113,57	114,69	115,09	113,96	113,87	114,41	114,96	115,38	114,4075
SINTANG	122,21	121,48	122,18	122,59	122,93	123,49	123,51	123,08	123,44	123,5	123,66	124,26	123,0275
KOTA PONTIANAK	114,49	114,38	114,63	115,12	115,55	115,84	115,96	115,5	115,62	115,8	115,84	116,61	115,445
KOTA SINGKAWANG	113,32	113,43	113,69	114,23	114,66	115,09	115,01	115,11	114,91	114,89	114,88	115,08	114,525
SAMPIT	117,12	117,45	117,73	117,84	118,28	118,63	118,94	118,75	118,88	119,45	119,65	119,97	118,5575
KOTA PAL													

4. Data Pengangguran

38 Provinsi			Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)																					
	2023		2023		2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
ACEH	6,2	5,1	5,75	6,03	5,97	6,17	6,3	6,3	5,4	6,59	5,48	6,17	6,54	6,34	7,39	6,57	8,13	7,57	7,73	9,93	6,75	9,02	8,34	10,12
SUMATERA UTARA	5	4,2	5,24	5,89	5,47	6,16	6,01	6,33	4,71	6,91	5,57	5,39	5,61	5,55	6,41	5,6	6,49	5,84	6,39	6,71	5,95	6,23	6,09	6,45
SUMATERA BARAT	6,5	5,8	5,9	5,94	6,17	6,28	6,67	6,52	5,25	6,88	5,38	5,38	5,68	5,66	5,8	5,58	5,81	5,09	5,99	6,89	6,32	6,5	6,39	7,02
RIAU	5,3	4,7	4,25	4,23	4,4	4,37	4,96	4,42	4,92	6,32	5,36	5,76	5,55	5,98	5,76	6,22	5,94	7,43	6,72	7,83	4,99	6,56	4,19	5,48
JAMBI	5,8	5	4,5	4,53	4,7	4,59	4,76	5,09	4,26	5,13	3,52	4,06	3,56	3,73	3,67	3,87	4,66	4	2,73	4,34	2,5	5,08	2,89	4,76
SUMATERA SELATAN	5,5	5	4,53	4,11	4,74	4,63	5,17	4,98	3,9	5,51	4,02	4,53	4,08	4,27	3,8	4,39	3,94	4,31	5,03	6,07	3,84	4,96	5,41	4,84
BENGKULU	4,9	4,4	3,21	3,42	3,39	3,59	3,72	3,65	3,08	4,07	2,41	3,26	2,63	3,35	2,81	3,74	3,84	3,3	3,21	4,91	1,62	3,47	2,1	4,61
LAMPUNG	5,2	4,8	4,18	4,23	4,31	4,52	4,54	4,69	4,26	4,67	3,95	4,03	4,32	4,04	4,43	4,33	4,54	4,62	3,44	5,14	5,08	4,79	5,07	5,69
KEP. BANGKA BELITUNG	5	4,5	3,89	4,56	4,18	4,77	5,04	5,03	3,35	5,25	3,32	3,58	3,59	3,61	4,46	3,78	6,17	2,6	3,35	6,29	2,67	5,14	3,22	3,65
KEP. RIAU	4,8	4,2	7,61	6,8	8,02	8,23	10,12	9,91	5,98	10,34	7,02	7,5	7,3	8,04	6,44	7,16	9,03	7,69	9,05	6,2	5,26	6,69	6,05	5,63
DKI JAKARTA	4,3	3,9	7,57	6,53	8	7,18	8,51	8,5	5,15	10,95	5,5	6,54	5,73	6,65	5,36	7,14	5,77	6,12	8,36	7,23	9,84	8,47	9,64	8,63
JAWA BARAT	4,7	4,1	7,89	7,44	8,35	8,31	8,92	9,82	7,71	10,46	7,78	8,04	8,22	8,23	8,49	8,22	8,57	8,89	8,4	8,72	8,66	8,45	8,88	9,16
JAWA TENGAH	4,9	4,4	5,24	5,13	5,75	5,57	5,96	5,95	4,2	6,48	4,19	4,44	4,19	4,47	4,15	4,57	4,2	4,63	5,31	4,99	5,45	5,68	5,53	6,01
DI YOGYAKARTA	3,9	3,6	3,58	3,69	3,73	4,06	4,28	4,56	3,38	4,57	2,89	3,18	3	3,37	2,84	3,02	2,81	2,72	4,07	4,07	2,16	3,33	3,75	3,24
JAWA TIMUR	4,5	4	4,33	4,88	4,81	5,49	5,17	5,74	3,6	5,84	3,77	3,82	3,77	3,91	4,1	4	4,14	4,21	4,31	4,47	4,02	4,19	3,97	4,3
BANTEN	4,6	4,1	7,97	7,52	8,53	8,09	9,01	8,98	7,99	10,64	7,55	8,11	7,72	8,47	7,75	9,28	7,95	8,92	8,58	9,55	9,87	9,07	9,77	9,54
BALI	4,8	4,3	3,73	2,69	4,84	4,8	5,42	5,37	1,25	5,63	1,22	1,57	0,88	1,4	1,28	1,48	2,12	1,89	1,37	1,99	1,37	1,9	1,93	1,83
NUSA TENGGARA BARAT	5,7	5	3,73	2,8	3,92	2,89	3,97	3,01	3,04	4,22	3,15	3,28	3,28	3,58	3,86	3,32	3,66	3,94	4,98	5,69	5,3	5,75	5,28	5,3
NUSA TENGGARA TIMUR	6	5,4	3,1	3,14	3,3	3,54	3,38	3,77	2,64	4,28	2,98	3,14	2,82	2,85	3,21	3,27	3,59	3,25	3,12	3,83	1,97	3,26	2,12	3,25
KALIMANTAN BARAT	5,1	4,6	4,52	5,05	4,86	5,11	5,73	5,82	4,47	5,81	4,06	4,35	4,09	4,18	4,22	4,36	4,58	4,23	4,78	5,15	2,53	4,04	3,13	3,99
KALIMANTAN TENGAH	4,9	4,5	3,84	4,1	4,2	4,26	4,25	4,53	3,33	4,58	3,21	4,04	3,14	3,91	3,13	4,23	3,67	4,82	3,14	4,54	2,71	3,24	1,81	3
KALIMANTAN SELATAN	4,8	4,3	3,95	4,31	4,2	4,74	4,33	4,95	3,67	4,74	3,41	4,18	3,72	4,35	3,53	4,77	3,63	5,45	4,83	4,92	4,03	3,8	3,88	3,66
KALIMANTAN TIMUR	4,7	4,2	6,37	5,31	6,77	5,71	6,81	6,83	6,72	6,87	6,65	5,94	6,79	6,41	8,55	6,91	8,86	7,95	7,17	7,5	8,89	7,38	8,94	7,95
KALIMANTAN UTARA	5	4,5	4,1	4,01	4,62	4,33	4,67	4,58	5,71	4,97	5,84	4,49	4,7	5,11	5,17	5,54	3,92	5,23	5,79	5,68	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	4,8	4,4	6,19	6,1	6,51	6,61	7,28	7,06	5,34	7,37	5,17	6,01	5,86	6,61	6,12	7,18	7,82	6,18	8,69	9,03	7,27	7,54	7,5	6,79
SULAWESI TENGAH	5,1	4,7	3,49	2,95	3,67	3	3,73	3,75	2,93	3,77	3,46	3,11	3,12	3,37	2,97	3,81	3,46	3,29	2,99	4,1	2,92	3,68	2,67	4,19
SULAWESI SELATAN	4,9	4,5	5,26	4,33	5,75	4,51	5,79	5,72	5,7	6,31	5,1	4,62	5,04	4,94	4,77	5,61	5,11	4,8	5,81	5,95	5,79	5,08	5,88	5,1
SULAWESI TENGGARA	5	4,6	3,66	3,15	3,86	3,36	4,22	3,92	3,1	4,58	2,88	3,52	2,77	3,19	3,14	3,3	3,78	2,72	3,62	5,55	2,13	4,43	3,43	4,38
GORONTALO	5,2	4,8	3,07	3,06	3,25	2,58	3,41	3,01	3,29	4,28	3,25	3,76	3,38	3,7	3,65	4,28	3,88	2,76	3,06	4,65	2,44	4,18	4,51	4,15
SULAWESI BARAT	5	4,6	3,04	2,27	3,11	2,34	3,28	3,13	2,39	3,32	1,29	2,98	2,33	3,01	2,98	3,21	2,72	3,33	1,81	3,35	1,6	2,08	2,02	2,35
MALUKU	5,3	4,9	6,08	6,31	6,44	6,88	6,73	6,93	6,71	7,57	6,61	6,69	7,07	6,95	7,77	9,29	6,98	7,05	6,72	9,93	6,59	10,51	6,97	9,91
MALUKU UTARA	5,5	5	4,6	4,31	4,98	3,98	5,06	4,71	4,09	5,15	4,96	4,81	4,56	4,63	4,82	5,33	3,43	4,01	5,56	6,05	5,65	5,29	5,5	3,8
PAPUA BARAT	6	5,4	5,53	5,38	5,78	5,37	6,18	5,84	6,78	6,8	5,81	6,43	6,27	6,45	7,52	6,49	5,73	7,46	4,61	8,08	3,7	5,02	4,36	4,4
PAPUA BARAT DAYA	6,2	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA	6,5	5,9	3,49	2,67	3,6	2,83	3,77	3,33	3,42	4,28	3,22	3,51	2,75	3	3,96	3,62	2,97	3,35	3,72	3,99	3,48	3,44	2,91	3,15
PAPUA SELATAN	6,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	6,3	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	6,6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	6,54	5,87	5,45	5,32	5,83	5,86	6,26	6,49	4,94	7,07	4,98	5,23	5,1	5,3	5,33	5,5	5,5	5,61	5,81	6,18	5,7	5,94	5,88	6,17

5. Data Zakat

38 Provinsi		Data Distribusi Zakat ZIS-DSKL Nasional Berdasarkan Wilayah Provinsi (Rupiah)										
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ACEH	232.082.230.866	285.407.294.532	71,765,258,901	69,872,360,396	62.799.597.769	223,414,931,280	194.990.932.500	210.450.812.300	198.230.740.900	185.120.689.200	172.430.678.600	160.220.567.800
SUMATERA UTARA	74,404,691,85	69.354.175.976	9,641,560,763	14,691,320,248	6.570.611.573	28,214,051,760	24.366.045.600	26.350.034.200	24.920.023.500	23.480.012.700	21.950.010.900	20.520.009.800
SUMATERA BARAT	211.754.424.639	160,258,159,05	32,954,525,602	29,939,413,578	24.998.450.687	126,267,847,717	122.230.910.800	114.500.874.200	108.320.834.600	102.000.795.900	95.780.765.300	89.560.734.700
RIAU	229.771.895.025	187.062.391.710	34,306,917,660	13,485,415,004	15.755.962.749	83,338,524,955	82.460.678.900	78.340.645.700	74.230.612.500	70.120.589.300	65.450.567.100	60.890.534.800
JAMBI	67.363.981.005	56.848.386.186	2,183,437,397	4,169,524,279	2.985.356.521	36,010,283,952	35.600.812.400	33.870.789.200	31.940.756.900	30.230.734.600	28.500.723.200	26.780.701.800
SUMATERA SELATAN	53.289.561.392	44.508.619.914	4,863,598,214	4,013,706,684	4.099.116.652	30,085,104,348	30.200.734.500	28.900.701.200	27.500.678.900	26.100.645.600	24.800.612.300	23.500.589.800
BENGKULU	22.487.104.940	54.524.349.098	4,430,630,957	5,941,361,645	4.241.854.584	12,132,728,552	12.320.678.500	11.900.645.200	11.450.612.900	11.000.589.600	10.600.567.300	10.200.534.800
LAMPUNG	32,691,522,02	28.293.096.462	837,680,000	1,775,529,129	1.114.035.658	10,548,973,433	11.000.678.400	10.500.645.200	10.000.612.900	9.500.589.600	9.100.567.300	8.700.534.800
KEP. BANGKA BELITUNG	21.286.854.769	32.789.724.894	3,864,003,841	7,825,757,111	6.941.420.180	29,808,904,792	30.000.612.500	28.670.589.200	27.450.567.900	26.100.534.600	24.750.512.300	23.400.489.800
KEP. RIAU	48.444.399.421	39.777.621.736	1,824,535,204	4,442,947,969	3.480.938.482	39,325,236,208	38.500.789.200	36.900.756.800	35.200.723.400	33.600.701.000	32.100.678.600	30.500.645.200
DKI JAKARTA	321.485.117.703	282.865.282.826	170,207,676,190	197,681,344,139	142.913.143.595	1,958,261,214,478	1.890.320.678.500	1.800.450.645.200	1.710.500.612.900	1.620.600.589.600	1.530.700.567.300	1.440.800.534.800
JAWA BARAT	620.947.572.815	505.399.360.206	35,922,196,731	50,058,098,980	30.077.374.280	1,448,157,699,885	1.460.500.612.900	1.400.600.589.600	1.340.700.567.300	1.280.800.534.800	1.220.900.512.400	1.160.000.489.900
JAWA TENGAH	501.892.784.220	401.241.609.092	83,477,801,372	12,376,978,137	27.272.676.864	216,095,880,307	218.500.789.200	208.600.756.800	198.700.723.400	188.800.701.000	178.900.678.600	169.000.645.200
DI YOGYAKARTA	79.719.226.573	64.134.467.762	3,626,034,951	12,395,236,740	5.654.278.390	30,270,136,856	31.200.678.500	30.500.645.200	29.800.612.900	29.100.589.600	28.400.567.300	27.700.534.800
JAWA TIMUR	432.672.681.523	376.012.418.317	20,536,190,484	16,366,943,175	16.535.217.996	488,591,369,135	500.600.789.200	480.500.756.800	460.400.723.400	440.300.701.000	420.200.678.600	400.100.645.200
BANTEN	142.362.407.765	138.053.705.478	24,303,871,242	21,594,992,256	19.018.149.090	180,040,053,450	190.200.678.500	180.500.645.200	170.800.612.900	161.100.589.600	151.400.567.300	141.700.534.800
BALI	39.134.195.614	13.207.709.758	107,544,912	211,250,000	543.312.697	5,629,512,992	6.000.678.500	5.700.645.200	5.400.612.900	5.100.589.600	4.800.567.300	4.500.534.800
NUSA TENGGARA BARAT	156.206.185.882	127.900.397.180	12,195,313,239	30,139,034,329	29.932.663.069	99,208,601,925	105.500.789.200	98.600.756.800	92.700.723.400	86.800.701.000	80.900.678.600	75.000.645.200
NUSA TENGGARA TIMUR	2.140.889.000	2.020.398.733	-	47,819,562	40.819.088	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN BARAT	16.924.209.748	12.757.907.324	3,079,420,579	4,359,036,456	11.430.857.592	8,577,094,223	8.300.678.400	7.900.645.200	7.500.612.900	7.100.589.600	6.700.567.300	6.300.534.800
KALIMANTAN TENGAH	4.893.187.895	5.303.078.331	380,923,480	329,188,975	201.570.824	2,898,467,726	9.000.678.500	8.500.645.200	8.000.612.900	7.500.589.600	7.000.567.300	6.500.534.800
KALIMANTAN SELATAN	75.477.216.696	68.572.652.695	8,097,424,220	12,704,629,694	10.182.249.274	29,714,010,544	3.200.678.400	3.000.645.200	2.800.612.900	2.600.589.600	2.400.567.300	2.200.534.800
KALIMANTAN TIMUR	80.525.354.108	63.676.196.749	6,006,518,938	4,881,638,010	4.831.584.680	62,577,803,751	30.100.678.500	28.700.645.200	27.300.612.900	25.900.589.600	24.500.567.300	23.100.534.800
KALIMANTAN UTARA	29.137.781.677	18.390.642.228	1,226,279,316	804,587,250	491.075.112	14,134,978,081	63.500.789.200	60.600.756.800	57.700.723.400	54.800.701.000	51.900.678.600	49.000.645.200
SULAWESI UTARA	3.531.415.961	1.461.223.705	250,025,557	1,005,694,423	1.281.961.124	14,644,253,242	15.000.678.500	14.500.645.200	14.000.612.900	13.500.589.600	13.000.567.300	12.500.534.800
SULAWESI TENGAH	11.992.087.563	9.574.338.817	1,405,980,985	3,608,251,337	2.756.905.369	5,219,788,506	15.600.678.500	14.900.645.200	14.200.612.900	13.500.589.600	12.800.567.300	12.100.534.800
SULAWESI SELATAN	140.703.692.267	112.222.082.903	1,669,586,684	3,402,890,000	1.705.310.500	170,899,766,837	6.100.678.500	5.700.645.200	5.300.612.900	4.900.589.600	4.500.567.300	4.100.534.800
SULAWESI TENGGARA	33.547.735.425	44.876.060.541	267,996,554	1,022,307,000	1.737.848.003	14,999,004,278	180.500.789.200	170.600.756.800	160.700.723.400	150.800.701.000	140.900.678.600	131.000.645.200
GORONTALO	30.315.338.134	28.425,278,62	7,604,148,207	10,209,951,528	10.874.806.812	24,681,561,547	16.000.678.500	15.500.645.200	15.000.612.900	14.500.589.600	14.000.567.300	13.500.534.800
SULAWESI BARAT	14.849.071.820	11.825.461.096	251,965,051	1,271,440,900	2.229.432.661	9,814,595,944	26.000.678.500	24.800.645.200	23.600.612.900	22.400.589.600	21.200.567.300	20.000.534.800
MALUKU	3.598.885.510	8.372.807.359	-	507,195,000	507.195.000	4,108,022,000	10.300.678.500	9.900.645.200	9.500.612.900	9.100.589.600	8.700.567.300	8.300.534.800
MALUKU UTARA	9.434.748.596	7.861.704.791	3,388,249	67,864,855	129.940.738	5,580,582,278	5.100.678.500	4.700.645.200	4.300.612.900	3.900.589.600	3.500.567.300	3.100.534.800
PAPUA BARAT	1.645.827.499	462.367.200	473,921,488	1,004,927,970	2.463.264.485	6,144,226,875	6.600.678.500	6.200.645.200	5.800.612.900	5.400.589.600	5.000.567.300	4.600.534.800
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	985.320.100	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA	17.363.094.519	10.470.953.309	3,486,401,058	4,969,115,029	246.326.448,00	6,666,437,770	4.800.678.500	4.400.645.200	4.000.612.900	3.600.589.600	3.200.567.300	2.800.534.800
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	1.129.667.972.716	675.091.571.281	505,229,002,919	501,570,006,932	357.673.037.626	225.702.309.429	197.054.965.151	131.917.747.764	80.252.586.454	47.257.800.762	30.125.600.345	25.874.300.210

6. Bantuan Sosial

Provinsi	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN) (Rp)										
Aceh	Rp 1.204.787.044.000,00	Rp 1.125.969.200.000,00	Rp 1.146.184.400.000,00	Rp 1.062.153.200.000,00	Rp 90.388.000.000,00	Rp 488.755.080.000,00	Rp 299.823.700.000,00				
Sumatera Utara	Rp 1.934.172.232.000,00	Rp 1.807.637.600.000,00	Rp 1.721.286.800.000,00	Rp 1.934.371.800.000,00	Rp 153.868.400.000,00	Rp 885.284.400.000,00	Rp 650.527.020.000,00				
Sumatera Barat	Rp 801.670.322.000,00	Rp 749.224.600.000,00	Rp 730.854.800.000,00	Rp 739.701.400.000,00	Rp 59.150.400.000,00	Rp 320.117.160.000,00	Rp 220.201.410.000,00				
Riau	Rp 663.587.250.000,00	Rp 620.175.000.000,00	Rp 608.237.400.000,00	Rp 682.678.600.000,00	Rp 58.120.200.000,00	Rp 275.965.800.000,00	Rp 83.337.650.000,00				
Jambi	Rp 435.059.860.000,00	Rp 406.598.000.000,00	Rp 410.323.200.000,00	Rp 448.409.000.000,00	Rp 37.948.200.000,00	Rp 205.337.880.000,00	Rp 135.477.540.000,00				
Sumatera Selatan	Rp 1.180.798.928.000,00	Rp 1.103.550.400.000,00	Rp 1.076.544.400.000,00	Rp 1.279.591.600.000,00	Rp 113.823.200.000,00	Rp 608.880.360.000,00	Rp 174.148.370.000,00				
Bengkulu	Rp 358.181.858.000,00	Rp 334.749.400.000,00	Rp 332.635.400.000,00	Rp 353.292.400.000,00	Rp 28.661.000.000,00	Rp 164.456.160.000,00	Rp 101.328.040.000,00				
Lampung	Rp 1.774.137.896.000,00	Rp 1.658.072.800.000,00	Rp 1.587.843.000.000,00	Rp 1.861.755.600.000,00	Rp 155.432.200.000,00	Rp 842.706.480.000,00	Rp 577.896.990.000,00				
Kepulauan Bangka Belitung	Rp 112.520.986.000,00	Rp 105.159.800.000,00	Rp 112.220.200.000,00	Rp 135.539.400.000,00	Rp 11.387.400.000,00	Rp 57.750.000.000,00	Rp 22.255.420.000,00				
Kepulauan Riau	Rp 153.931.698.000,00	Rp 143.861.400.000,00	Rp 142.300.800.000,00	Rp 156.540.000.000,00	Rp 12.696.600.000,00	Rp 68.067.120.000,00	Rp 25.855.610.000,00				
DKI Jakarta	Rp 503.838.176.000,00	Rp 470.876.800.000,00	Rp 528.960.000.000,00	Rp 531.316.000.000,00	Rp 39.678.600.000,00	Rp 241.904.520.000,00	Rp 20.691.110.000,00				
Jawa Barat	Rp 9.870.454.038.000,00	Rp 9.224.723.400.000,00	Rp 9.150.840.200.000,00	Rp 10.300.195.400.000,00	Rp 662.396.600.000,00	Rp 3.480.833.400.000,00	Rp 1.068.120.130.000,00				
Jawa Tengah	Rp 7.991.264.826.000,00	Rp 7.468.471.800.000,00	Rp 7.477.226.200.000,00	Rp 8.822.859.600.000,00	Rp 684.692.400.000,00	Rp 3.459.496.920.000,00	Rp 1.583.032.440.000,00				
DI Yogyakarta	Rp 844.928.924.000,00	Rp 789.653.200.000,00	Rp 790.794.400.000,00	Rp 907.718.600.000,00	Rp 71.019.600.000,00	Rp 399.420.120.000,00	Rp 77.370.810.000,00				
Jawa Timur	Rp 7.627.393.778.000,00	Rp 7.128.405.400.000,00	Rp 7.236.114.000.000,00	Rp 8.281.084.200.000,00	Rp 703.030.400.000,00	Rp 3.757.814.280.000,00	Rp 1.306.862.480.000,00				
Banten	Rp 1.380.499.876.000,00	Rp 1.290.186.800.000,00	Rp 1.161.351.000.000,00	Rp 1.348.939.000.000,00	Rp 112.626.800.000,00	Rp 649.808.280.000,00	Rp 202.553.890.000,00				
Bali	Rp 404.558.868.000,00	Rp 378.092.400.000,00	Rp 380.847.800.000,00	Rp 429.749.200.000,00	Rp 33.898.000.000,00	Rp 186.448.680.000,00	Rp 17.506.390.000,00				
Nusa Tenggara Barat	Rp 1.235.534.564.000,00	Rp 1.154.705.200.000,00	Rp 1.046.005.600.000,00	Rp 1.289.216.000.000,00	Rp 115.511.800.000,00	Rp 647.403.240.000,00	Rp 494.003.400.000,00				
Nusa Tenggara Timur	Rp 1.324.112.374.000,00	Rp 1.237.488.200.000,00	Rp 944.207.200.000,00	Rp 1.142.987.200.000,00	Rp 100.838.800.000,00	Rp 573.345.960.000,00	Rp 335.689.200.000,00				
Kalimantan Barat	Rp 774.146.070.000,00	Rp 723.501.000.000,00	Rp 720.238.600.000,00	Rp 753.733.600.000,00	Rp 60.711.400.000,00	Rp 278.171.520.000,00	Rp 243.171.500.000,00				
Kalimantan Tengah	Rp 232.375.752.000,00	Rp 217.173.600.000,00	Rp 212.466.200.000,00	Rp 229.386.400.000,00	Rp 20.052.800.000,00	Rp 96.250.440.000,00	Rp 79.930.620.000,00				
Kalimantan Selatan	Rp 398.645.620.000,00	Rp 372.566.000.000,00	Rp 372.600.600.000,00	Rp 450.131.600.000,00	Rp 37.674.000.000,00	Rp 199.865.160.000,00	Rp 152.219.210.000,00				
Kalimantan Timur	Rp 223.665.310.000,00	Rp 209.033.000.000,00	Rp 235.307.200.000,00	Rp 299.269.600.000,00	Rp 25.015.800.000,00	Rp 145.718.760.000,00	Rp 127.036.800.000,00				
Kalimantan Utara	Rp 59.101.022.000,00	Rp 55.234.600.000,00	Rp 56.845.800.000,00	Rp 68.671.600.000,00	Rp 5.728.200.000,00	Rp 27.737.160.000,00	Rp 15.645.630.000,00				
Sulawesi Utara	Rp 336.500.448.000,00	Rp 314.486.400.000,00	Rp 308.569.400.000,00	Rp 353.144.200.000,00	Rp 32.874.200.000,00	Rp 186.039.480.000,00	Rp 91.289.990.000,00				
Sulawesi Tengah	Rp 522.738.014.000,00	Rp 488.540.200.000,00	Rp 468.545.000.000,00	Rp 495.119.200.000,00	Rp 44.396.400.000,00	Rp 237.850.800.000,00	Rp 210.144.000.000,00				
Sulawesi Selatan	Rp 1.527.721.818.000,00	Rp 1.427.777.400.000,00	Rp 1.376.420.000.000,00	Rp 1.507.682.200.000,00	Rp 129.584.400.000,00	Rp 561.130.680.000,00	Rp 341.421.960.000,00				
Sulawesi Tenggara	Rp 469.201.634.000,00	Rp 438.506.200.000,00	Rp 427.742.400.000,00	Rp 461.953.000.000,00	Rp 39.918.200.000,00	Rp 191.368.320.000,00	Rp 150.306.200.000,00				
Gorontalo	Rp 285.686.148.000,00	Rp 266.996.400.000,00	Rp 253.421.200.000,00	Rp 271.835.000.000,00	Rp 22.750.000.000,00	Rp 114.816.240.000,00	Rp 43.353.200.000,00				
Sulawesi Barat	Rp 260.469.672.000,00	Rp 243.429.600.000,00	Rp 232.952.400.000,00	Rp 254.504.400.000,00	Rp 20.323.400.000,00	Rp 103.870.800.000,00	Rp 81.290.000.000,00				
Maluku	Rp 245.174.878.000,00	Rp 229.135.400.000,00	Rp 214.279.200.000,00	Rp 262.072.400.000,00	Rp 24.575.800.000,00	Rp 134.535.720.000,00	Rp 104.957.600.000,00				
Maluku Utara	Rp 133.409.312.000,00	Rp 124.681.600.000,00	Rp 116.301.800.000,00	Rp 121.793.000.000,00	Rp 10.250.400.000,00	Rp 54.747.000.000,00	Rp 56.545.500.000,00				
Papua Barat	Rp 104.456.610.000,00	Rp 97.623.000.000,00	Rp 155.060.800.000,00	Rp 169.728.400.000,00	Rp 15.164.400.000,00	Rp 73.975.440.000,00	Rp 72.558.200.000,00				
Papua	Rp 113.879.244.000,00	Rp 106.429.200.000,00	Rp 723.129.600.000,00	Rp 829.188.400.000,00	Rp 65.281.600.000,00	Rp 106.953.000.000,00	Rp 310.778.600.000,00				
Indonesia	Rp 163.856.376.000,00	Rp 153.136.800.000,00	Rp 42.458.657.000.000,00	Rp 48.236.311.200.000,00	Rp 3.799.469.600.000,00	Rp 19.826.826.360.000,00	Rp 9.477.330.610.000,00				

7. Data Dana Desa

38 Provinsi		Alokasi Dana Desa Per-Wilayah Berdasarkan Data SIMTRADA (Rupiah)										
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ACEH	6.885.429.521	6.259.481.383	4.664.260.000	4.908.919.840	254.112.182	4.955.500.482	4.457.512.950	4.717.481.219	3.829.751.986	1,120,663,871	1,045,770,637	1 065 140 590
SUMATERA UTARA	3.487.183.252	3.170.166.593	4.378.490.000	4.525.292.326	4.554.128.079	4.452.049.366	3.874.857.829	3.925.451.319	3.293.282.206	677,689,457	544,029,800	505 391 659
SUMATERA BARAT	2.301.366.028	2.092.150.935	866.780.000	992.597.548	961.135.402	932.325.519	790.787.312	747.964.441	1 12.965.690	355,955,444	272,841,926	236 285 390
RIAU	3.076.437.151	2.796.761.046	1.397.570.000	1.484.815.447	132.502.452	1.436.685.874	1.254.688.851	1.269.301.925	999.378.616	851,293,798	734,550,091	611 759 783
JAMBI	1.830.464.210	1.664.058.373	1.119.650.000	1.222.139.342	1.221.842.427	1.184.558.060	1.037.674.061	1.090.942.601	856.771.029	364,521,195	292,896,599	259 567 807
SUMATERA SELATAN	3.553.275.613	3.230.250.557	2.550.380.000	2692090368	306.748.776	2.683.946.345	2.309.392.954	2267261445	1.780,769,519	951,400,057	792,846,299	472 256 642
BENGKULU	1.481.111.306	1.346.464.824	1.008.310.000	1085359570	112.509.789	1.079.418.707	945.638.279	1035340413	55.373.306	206,174,732	181,755,505	158 074 687
LAMPUNG	2.222.794.505	2.020.722.277	2.325.620.000	2441161413	2.454.053.315	2.427.111.117	2.091.398.105	1957485966	1.536.762.050	564,984,864	508,737,549	539 766 253
KEP. BANGKA BELITUNG	1.372.741.949	1.247.947.226	274,030,000	334531471	321.740.760	309.831.614	264.571.725	28.670.589.200	206.193.612	176,019,687	160,908,639	174 328 177
KEP. RIAU	1.618.524.589	1.471.385.990	208,080,000	276.396.391	273.346.665	261.333.056	221.500.941	36.900.756.800	177.766.079	160,652,320	116,196,664	92 015 024
DKI JAKARTA	16.862.625.469	15.329.659.517	977,990,000	-		-	-	#####	#####	-		2 864 662 331
JAWA BARAT	6.046.714.438	5.497.013.125	6.125,000,000	5.990.622.942	5.940.216.905	5.710.074.611	4.823.095.418	4524995101	3.568.437.985	3,772,779,606	3,557,909,060	3 008 861 456
JAWA TENGAH	5.877.548.971	5.343.226.337	8.113,030,000	8.157.169.762	268.003.259	7.889.431.604	6.737.083.091	6411665726	4.421.956.769	3,961,918,275	3,771,573,518	332 486 867
DI YOGYAKARTA	3.147.354.425	2.861.231.295	439,270,000	460455838	106.215.995	423.785.125	361.894.397	30.500.645.200	287.696.629	368,443,041	327,953,220	3 045 326 160
JAWA TIMUR	9.544.524.016	8.676.840.015	7.752,530,000	7659802915	7.829.945.000	7.441.561.392	6.368.745.359	480.500.756.800	4.969.193.651	3,544,322,341	3,547,863,853	327 218 465
BANTEN	1.977.122.100	1.797.383.727	1.224,210,000	1135031921	1.122.813.298	1.092.073.316	937.180.879	180.500.645.200	170.800.612.900	383,323,270	394,035,156	730 374 769
BALI	1.590.993.105	1.446.357.368	600,720,000	679123617	56.217.010	630.189.586	52.826.236	5.700.645.200	416.264.690	1,006,203,315	1,083,367,722	283 002 354
NUSA TENGGARA BARAT	2.598.731.171	2.362.482.883	1.193,610,000	1247727848	189.457.306	1.181.329.455	63.127.586	98.600.756.800	678.264.427	399,839,788	289,771,319	483 811 199
NUSA TENGGARA TIMUR	2.101.885.053	1.910.804.594	2.799,490,000	3059653902	166.529.661	3.020.504.603	72.421.255	-	1.904.760.315	624,597,638	528,236,825	323 606 090
KALIMANTAN BARAT	2.179.149.372	1.981.044.884	1.889,680,000	2.061.328.499		1.992.571.733	1.688.279.973	7.900.645.200	1.241.607.506	448,181,561	390,774,663	281 570 642
KALIMANTAN TENGAH	3.292.737.241	2.993.397.492	1.201,020,000	1.426.889.276	134.452.632	1.347.142.545	1.144.586.424	8.500.645.200	54.725.770	386,880,120	334,911,824	323 606 090
KALIMANTAN SELATAN	3.640.062.505	3.309.147.732	1.424,730,000	1.525.770.457	1.533.082.274	1.506.337.021	1.316.573.429	3.000.645.200	1.125.244.835	395,324,622	380,921,884	281 570 642
KALIMANTAN TIMUR	6.467.876.382	5.879.887.620	754,830,000	939.074.018	908.976.179	870.119.582	90.992.725	28.700.645.200	540.759.158	986,260,736	474,030,970	319 547 054
KALIMANTAN UTARA	1.854.373.311	1.685.793.919	389,900,000	503.042.462	487.453.221	463.268.514	387.688.280	60.600.756.800	291.096.987	340,246,575	307,170,373	999 691 424
SULAWESI UTARA	1.671.061.472	1.519.146.793	1.087,940,000	1.227.039.030	1.241.529.043	1.210.560.814	141.044.614	14.500.645.200	911.498.499	299,933,827	292,099,595	234,120,823
SULAWESI TENGAH	2.172.380.146	1.974.891.042	1.476,960,000	1.597.596.005	1.610.194.714	1.567.950.719	203.579.535	14.900.645.200	1.124.644.395	251,659,835	223,697,271	187,452,328
SULAWESI SELATAN	3.138.901.952	2.853.547.229	2.115,410,000	2.372.807.818	2.382.220.597	2.351.148.984	38.790.336	5.700.645.200	1.425.595.011	579,764,231	528,618,894	439,033,610
SULAWESI TENGGARA	2.245.811.046	2.041.646.405	1.463,780,000	1636862682	74.314.973	1.613.817.589	201.431.991	170.600.756.800	1.126.867.317	396,767,693	419,119,934	456,031,169
GORONTALO	1.091.977.725	992.707.023	562,600,000	639.158.141	644.017.610	636.614.465	540.591.708	15.500.645.200	403.676.978	134,440,590	106,366,752	88,781,108
SULAWESI BARAT	1.121.896.434	1.019.905.849	521,070,000	576.443.184	574.952.086	560.226.664	472.270.192	24.800.645.200	392.359.520	87,398,901	52,913,473	53,745,616
MALUKU	1.814.147.899	1.649.225.363	1.001,090,000	1158272522	86.460.872	1.122.509.201	964.700.076	9.900.645.200	752.509.987	127,635,516	96,222,891	91,359,074
MALUKU UTARA	1.916.310.684	1.742.100.622	819,510,000	919556082	921.882.920	891.604.070	785.606.677	4.700.645.200	4.300.612.900	187,440,337	126,325,310	-
PAPUA BARAT	6.692.526.903	6.084.115.366	1.362,850,000	1.408.553.760	1.560.810.507	1.516.915.258	1.329.719.076	6.200.645.200	89.688.622	358,264,818	278 278 417	114,353,306
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
PAPUA	2.330.471.832	2.118.610.756	4.793,770,000	5434063548	209.683.456	5.237.503.009	4.284.844.848	4.400.645.200	4.000.612.900	2,442,885,205	1 449 920 762	293,802,467
PAPUA SELATAN	1.629.900.400	1.481.727.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	1.991.049.256	1.810.044.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	2.000.345.954	1.818.496.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	124.827.807.386	113.479.824.896	71779349945	#####	38.641.549.365	70.000.000.000	50.255.097.112	#####	#####			

8. Data Panjang Jalan

38 Provinsi	Panjang Jalan Per-wilayah Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)											
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ACEH	23.950	23.660	23660	23650	23.632	23897	23.915	24.019				
SUMATERA UTARA	41.500	40.979	40765	40739	40.956	40388	39.115	39.543	40.773			
SUMATERA BARAT	22.950	22.602	20999	22649	22.323	22351	22.388	22.556	23434			
RIAU	24.600	24.206	24206	24293	24.115	24320	24.497	24.992	27.040			
JAMBI	13.550	13.353	13202	13141	13.131	13126	13.092	13.027	13.731			
SUMATERA SELATAN	20.150	19.838	19587	19606	19.606	19175	18.989	19233	18821			
BENGKULU	9.330	9.228	9228	9191	9.191	9239	9.239	9196	9.237			
LAMPUNG	21.050	20.767	20765	20759	20.715	20759	20.759	21044	21.162			
KEP. BANGKA BELITUNG	5.950	5.891	5891	5783	5.418	5418	5.418	5.485	5.433			
KEP. RIAU	5.750	5.688	5688	5686	5.686	5686	5.686	5.686	5.552			
DKI JAKARTA	6.500	6.485	6485	6485	6.485	6485	6.732	6.732	7.094			
JAWA BARAT	30.150	29.756	28393	28178	28.045	27617	27.545	26980	26.533			
JAWA TENGAH	32.100	31.678	30819	30544	30.667	30667	30.667	30394	31.180			
DI YOGYAKARTA	4.500	4.449	4449	4338	4.338	4361	4.370	4.377	3.776			
JAWA TIMUR	43.000	42.466	42422	42521	42.450	41587	40.963	40.955	41.834			
BANTEN	6.200	6.128	5715	5712	5.712	5717	5.700	6.927	6.967			
BALI	8.950	8.864	8656	8787	8.805	8758	8.722	8.678	8.361			
NUSA TENGGARA BARAT	8.600	8.509	8509	8504	8.504	8504	8.504	8.525	8.223			
NUSA TENGGARA TIMUR	24.500	24.050	24050	23656	23.656	23571	23.571	23.193	22.686			
KALIMANTAN BARAT	18.800	18.505	18284	18315	18.315	18315	18.315	18.234	17.948			
KALIMANTAN TENGAH	19.200	18.923	18906	18809	18.800	18686	17.987	17.939	17.447			
KALIMANTAN SELATAN	13.850	13.648	13477	13440	13.440	13440	13.440	13.614	13.623			
KALIMANTAN TIMUR	13.600	13.375	13407	13270	12.587	12704	12.699	13.333	12.146			
KALIMANTAN UTARA	5.050	4.973	4973	4914	4.914	4596	4.006	3.183	4.547			
SULAWESI UTARA	10.450	10.309	10211	10091	10.058	10006	10.072	9.840	9.742			
SULAWESI TENGAH	17.250	16.952	16952	16908	16.908	16908	16.908	16.565	16.286			
SULAWESI SELATAN	30.800	30.357	30206	30397	30.598	30470	30.476	30.679	31.344			
SULAWESI TENGGARA	13.300	13.066	12802	12867	12.987	12291	12.291	13.064	12.725			
GORONTALO	5.600	5.516	5516	5513	5.506	5513	5.539	5.495	5.546			
SULAWESI BARAT	5.720	5.648	6180	6175	6.154	5841	7.038	5.758	6.409			
MALUKU	9.450	9.364	10373	10266	10.676	10247	9.902	10.213	9.889			
MALUKU UTARA	7.450	7.360	7360	7354	7.354	7354	7.354	7.432	7.076			
PAPUA BARAT	7.650	7.533	13028	13015	12522	12436	12.529	11.867	9.760			
PAPUA BARAT DAYA	5.550	5495	-	-		-	-	-	-			
PAPUA	9.150	8.976	21562	21068	20.901	21727	21.824	21.732	4.000.612.900			
PAPUA SELATAN	5.000	4.919	-	-	-	-	-	-	-			
PAPUA TENGAH	3.750	3.674	-	-	-	-	-	-	-			
PAPUA PEGUNUNGAN	3.600	3.544	-	-	-	-	-	-	-			
INDONESIA	552.000	550.735	546725	546624	545.155	542.160	540.252	540.490	537.837			

Hasil Analisis Data :

Estimasi Model Data Panel

Analisis Data :

Uji Chow Data Panel Kota

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	1.767439	(28,222)	0.0000	
Cross-section Chi-square	51.892930	28	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: KEMISKINAN_KOTA_Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 11:54				
Sample: 2015 2023				
Periods included: 9				
Cross-sections included: 33				
Total panel (unbalanced) observations: 261				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.917819	0.893985	-3.263833	0.0013
PDRB X1	-0.094192	0.039320	-2.395550	0.0173
INFLASI_X2	-0.287272	0.105995	-2.710252	0.0072
PENGANGGURAN_X3	0.148604	0.099200	1.498026	0.1354
BANTUAN X4	0.033421	0.027349	1.222039	0.2228
ZAKAT_X5	0.045865	0.018875	2.429960	0.0158
ASPAL X6	0.114481	0.056087	2.041140	0.0423
R-squared	0.086767	Mean dependent var	0.041870	
Adjusted R-squared	0.065195	S.D. dependent var	0.533601	
S.E. of regression	0.515914	Akaike info criterion	1.540701	
Sum squared resid	67.60649	Schwarz criterion	1.636301	
Log likelihood	-194.0614	Hannan-Quinn criter.	1.579129	
F-statistic	4.022124	Durbin-Watson stat	0.413900	
Prob(F-statistic)	0.000722			

Uji Chow Data Panel Desa

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: EQ02 DESA				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	1.054184	(28,222)	0.0000	
Cross-section Chi-square	32.167560	28	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: KEMISKINAN_DESA_Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 12:10				
Sample: 2015 2023				
Periods included: 9				
Cross-sections included: 33				
Total panel (unbalanced) observations: 261				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.452749	1.188341	0.380992	0.7035
PDRB_X1	-0.124908	0.041163	-3.034474	0.0027
INFLASI_X2	0.033626	0.114745	0.293050	0.7697
PENGANGGURAN_X3	0.359811	0.109366	3.289974	0.0011
BANTUAN_X4	0.046756	0.030801	1.517986	0.1303
ZAKAT_X5	-0.031026	0.021078	-1.471942	0.1423
DANA DESA_X6	-0.191422	0.243951	-0.784675	0.4334
R-squared	0.091632	Mean dependent var	0.643288	
Adjusted R-squared	0.070175	S.D. dependent var	0.590959	
S.E. of regression	0.569846	Akaike info criterion	1.739553	
Sum squared resid	82.48009	Schwarz criterion	1.835154	
Log likelihood	-220.0117	Hannan-Quinn criter.	1.777982	
F-statistic	4.270397	Durbin-Watson stat	0.572873	
Prob(F-statistic)	0.000405			

Uji Hausman Data Panel Kota

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic		Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.847367		7	0.0054
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB_X1	-0.088475	-0.072910	0.000094	0.1092
INFLASI_X2	0.003460	-0.015447	0.000021	0.0000
PENGANGGURAN_X3	0.148322	0.161647	0.000205	0.3518
BANTUAN_X4	-0.028944	-0.022675	0.000005	0.0068
ZAKAT_X5	-0.030971	-0.022862	0.000009	0.0076
ASPAL_X6	-0.052418	-0.023844	0.000164	0.0256
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: KEMISKINAN_KOTA_Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 11:54				
Sample: 2015 2023				
Periods included: 9				
Cross-sections included: 33				
Total panel (unbalanced) observations: 261				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.836090	0.651944	2.816331	0.0053
PDRB_X1	-0.088475	0.030608	-2.890563	0.0042
INFLASI_X2	0.003460	0.050967	0.067878	0.9459
PENGANGGURAN_X3	0.148322	0.064949	2.283658	0.0233
BANTUAN_X4	-0.028944	0.014479	-1.999034	0.0468
ZAKAT_X5	-0.030971	0.012058	-2.568560	0.0109
ASPAL_X6	-0.052418	0.043073	-1.216969	0.2249
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.839492	Mean dependent var	0.041870	
Adjusted R-squared	0.812018	S.D. dependent var	0.533601	
S.E. of regression	0.231353	Akaike info criterion	0.047264	
Sum squared resid	11.88238	Schwarz criterion	0.579894	
Log likelihood	32.83205	Hannan-Quinn criter.	0.261364	
F-statistic	30.55549	Durbin-Watson stat	1.781652	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman Data Panel Desa

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: EQ02_DESA				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		8.594008	7	0.2831
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB_X1	0.003215	-0.011546	0.000185	0.2783
INFLASI_X2	0.158725	0.150784	0.000052	0.2710
PENGANGGURAN_X3	0.220092	0.225525	0.000372	0.7783
BANTUAN_X4	-0.013556	-0.010098	0.000006	0.1538
ZAKAT_X5	-0.036580	-0.037881	0.000017	0.7543
DANA_DESA_X6	-0.450474	-0.436564	0.000122	0.2076
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: KEMISKINAN_DESA_Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 12:10				
Sample: 2015 2023				
Periods included: 9				
Cross-sections included: 33				
Total panel (unbalanced) observations: 261				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.442601	0.731560	4.705837	0.0000
PDRB_X1	0.003215	0.039152	0.082112	0.9346
INFLASI_X2	0.158725	0.065066	2.439463	0.0155
PENGANGGURAN_X3	0.220092	0.083057	2.649882	0.0086
BANTUAN_X4	-0.013556	0.018383	-0.737413	0.4617
ZAKAT_X5	-0.036580	0.015641	-2.338731	0.0202
DANA_DESA_X6	-0.450474	0.135442	-3.325946	0.0010
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.785429	Mean dependent var	0.643288	
Adjusted R-squared	0.748701	S.D. dependent var	0.590959	
S.E. of regression	0.296246	Akaike info criterion	0.541754	
Sum squared resid	19.48309	Schwarz criterion	1.074384	
Log likelihood	-31.69894	Hannan-Quinn criter.	0.755854	
F-statistic	21.38483	Durbin-Watson stat	2.032743	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Lagrange Multiplier Data Panel Kota

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.009194 -0.923600	2.249014 -0.133700	2.258208 -0.132900
Honda	-0.095890 -0.538200	-1.499670 -0.933200	-1.128230 -0.870400
King-Wu	-0.095890 -0.538200	-1.499670 -0.933200	-1.367790 -0.914300
Standardized Honda	0.279714 -0.389800	-1.351430 -0.911700	-5.540040 -1.000000
Standardized King-Wu	0.279714 -0.389800	-1.351430 -0.911700	-5.183450 -1.000000
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 -1.000000

Uji Lagrange Multiplier Data Panel Desa

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.441822 -0.063600	1.919394 -0.165900	5.361217 -0.020600
Honda	1.855215 -0.031800	-1.385422 -0.917000	0.332194 -0.369900
King-Wu	1.855215 -0.031800	-1.385422 -0.917000	-0.347271 -0.635800
Standardized Honda	2.342876 -0.009600	-1.232084 -0.891000	-3.956773 -1.000000
Standardized King-Wu	2.342876 -0.009600	-1.232084 -0.891000	-4.086921 -1.000000
Gourieroux, et al.	--	--	3.441822 -0.076500

UJI ASUMSI KLASIK :

Uji Multikolineritas Data Panel Kota

Variance Inflation Factors			
Date: 11/20/25 Time: 14:30			
Sample: 1 261			
Included observations: 261			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.743000	597.2410	NA
PDRB_X1	0.002000	1.473000	1.348000
INFLASI_X2	0.013000	10.88800	1.181000
PENGANGGURAN X3	0.012000	22.70900	1.048000
BANTUAN_X4	0.001000	554.2450	1.422000
ZAKAT_X5	0.000000	197.8880	1.298000
ASPAL_X6	0.001000	248.9990	1.194000

Uji Multikolineritas Data Panel Desa

Variance Inflation Factors			
Date: 11/20/25 Time: 14:36			
Sample: 1 261			
Included observations: 261			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.743000	597.2410	NA
PDRB_X1	0.002000	1.473000	1.348000
INFLASI_X2	0.013000	10.88800	1.181000
PENGANGGURAN X3	0.012000	22.70900	1.048000
BANTUAN_X4	0.001000	554.2450	1.422000
ZAKAT_X5	0.000000	197.8880	1.298000
DANA DESA X6	0.001000	248.9990	1.194000

Uji Heteroskedastisitas Data Panel Kota

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.309100	Prob. F(6,254)	0.2462	
Obs*R-squared	9.123100	Prob. Chi-Square(6)	0.2439	
Scaled explained SS	9.001800	Prob. Chi-Square(6)	0.2525	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 14:33				
Sample: 1 261				
Included observations: 261				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.234200	0.600100	0.390200	0.6967
PDRB_X1	-0.056000	0.025900	-2.165300	0.0313
INFLASI_X2	0.013900	0.069600	0.199100	0.8423
PENGANGGURAN_X3	-0.003700	0.065200	-0.056800	0.9548
BANTUAN_X4	0.014300	0.018300	0.779600	0.4363
ZAKAT_X5	-0.007500	0.012600	-0.594300	0.5528
ASPAL_X6	0.040400	0.037500	1.076200	0.2829
R-squared	0.008254	Mean dependent var	0.340200	
Adjusted R-squared	0.338835	S.D. dependent var	0.703500	
S.E. of regression	29.04668	Akaike info criterion	0.812800	
Sum squared resid	-83.81504	Schwarz criterion	0.747400	
Log likelihood	1.309118	Hannan-Quinn criter.	1.756100	
F-statistic	0.246245	Durbin-Watson stat	1.905473	
Prob(F-statistic)	0.029959			

Uji Heteroskedastisitas Data Panel Desa

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	3.200100	Prob. F(7,253)	0.3328	
Obs*R-squared	21.22980	Prob. Chi-Square(7)	0.3334	
Scaled explained SS	18.32800	Prob. Chi-Square(7)	0.3105	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 14:37				
Sample: 1 261				
Included observations: 261				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.685600	0.499100	1.373700	0.1708
PDRB_X1	-0.031100	0.021500	-1.445100	0.1497
INFLASI_X2	-0.014400	0.057900	-0.249400	0.8032
PENGANGGURAN_X3	-0.050800	0.054200	-0.937300	0.3495
BANTUAN_X4	0.025700	0.015200	1.690500	0.9216
ZAKAT_X5	0.014500	0.010500	1.384700	0.1674
DANA_DESA_X6	-0.017500	0.016100	-1.089100	0.2771
R-squared	0.081340	Mean dependent var	0.418512	
Adjusted R-squared	0.055923	S.D. dependent var	0.290056	
S.E. of regression	0.281829	Akaike info criterion	0.335139	
Sum squared resid	20.09517	Schwarz criterion	0.444396	
Log likelihood	-35.73562	Hannan-Quinn criter.	0.379057	
F-statistic	3.200161	Durbin-Watson stat	1.950683	
Prob(F-statistic)	0.002890			

Uji Autokorelasi Data Panel Kota

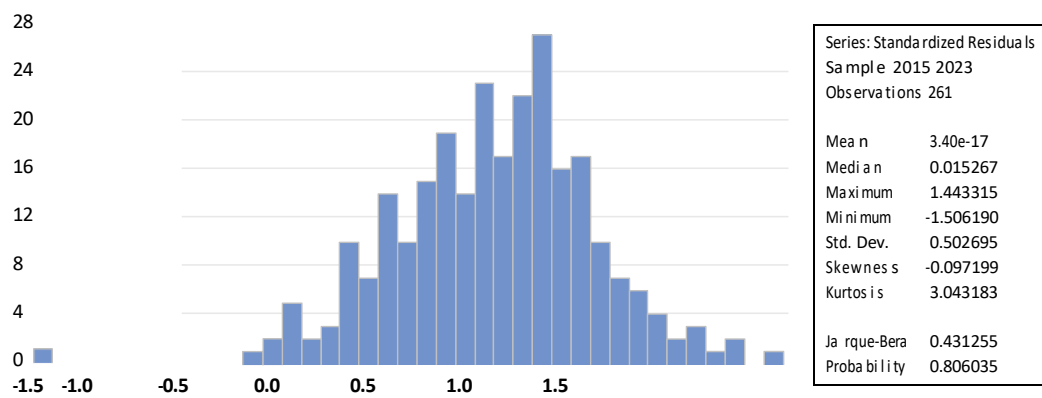
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	2.053200	Prob. F(2,252)	0.0719	
Obs*R-squared	10.37500	Prob. Chi-Square(2)	0.0653	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 14:31				
Sample: 1 261				
Included observations: 261				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.304000	1.001000	0.303700	0.7616
PDRB_X1	0.015600	0.043000	0.359300	0.7196
INFLASI_X2	0.020100	0.116000	0.173700	0.8622
PENGANGGURAN_X3	0.007800	0.110000	0.070800	0.9436
BANTUAN_X4	-0.008900	0.030000	-0.290500	0.7716
ZAKAT_X5	0.000800	0.020000	0.038520	0.9693
ASPAL_X6	-0.002000	0.063000	-0.045300	0.9639
RESID(-1)	0.129700	0.065000	1.990860	0.0476
RESID(-2)	0.122400	0.065000	1.872230	0.0624
R-squared	0.039750	Mean dependent var	0.000000	
Adjusted R-squared	-0.006000	S.D. dependent var	0.559400	
S.E. of regression	0.561300	Akaike info criterion	1.731400	
Sum squared resid	78.13700	Schwarz criterion	1.908900	
Log likelihood	-212.9500	Hannan-Quinn criter.	1.802800	
F-statistic	0.855500	Durbin-Watson stat	2.002100	
Prob(F-statistic)	0.593000			

Uji Autokorelasi Data Panel Desa

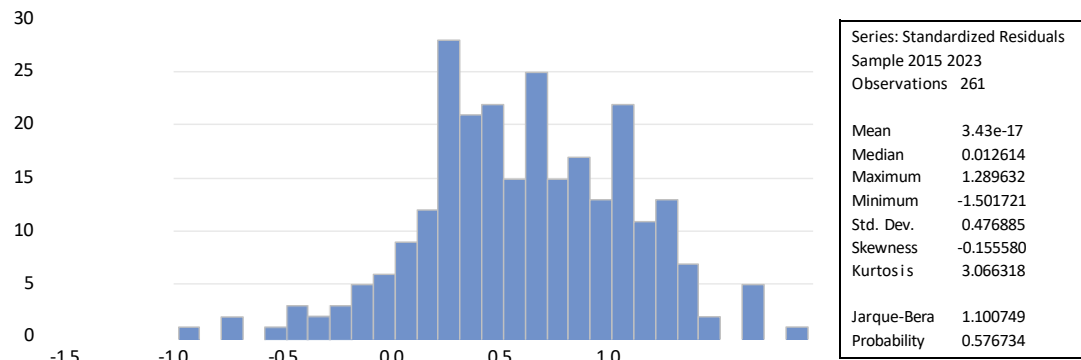
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	2.112900	Prob. F(2,252)	0.1230	
Obs*R-squared	4.321500	Prob. Chi-Square(2)	0.1152	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/25 Time: 14:36				
Sample: 1 261				
Included observations: 261				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.436700	0.939000	0.465100	0.6423
PDRB_X1	0.002600	0.039700	0.064500	0.9486
INFLASI_X2	0.012800	0.106100	0.120300	0.9044
PENGANGGURAN_X3	-0.008200	0.099700	-0.082000	0.9347
BANTUAN_X4	-0.017700	0.029200	-0.605500	0.5454
ZAKAT_X5	0.008700	0.019600	0.443000	0.6581
DANA_DESA_X6	-0.013500	0.057700	-0.233700	0.8154
RESID(-1)	0.131200	0.067500	1.943400	0.0531
RESID(-2)	-0.059000	0.064800	-0.910400	0.3635
R-squared	0.016557	Mean dependent var	0.000000	
Adjusted R-squared	-0.018705	S.D. dependent var	0.509860	
S.E. of regression	0.514607	Akaike info criterion	1.546730	
Sum squared resid	66.47001	Schwarz criterion	1.683300	
Log likelihood	-191.8490	Hannan-Quinn criter.	1.601630	
F-statistic	0.469544	Durbin-Watson stat	2.015120	
Prob(F-statistic)	0.894283			

Uji Normalitas Residual

Grafik Jarque-bera Data Panel Kota



Grafik Jarque-bera Data Panel Desa



Uji Hipotesis

Uji t Data Panel Kota

Dependent Variable: KEMISKINAN_KOTA_Y				
Method: Panel Least Squares (Fixed Effect Model)				
Date: 11/20/25 Time: 15:01				
Sample: 2015 2023				
Periods included: 9				
Cross-sections included: 33				
Total panel (unbalanced) observations: 261				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.130900	1.266400	-2.472300	0.0142
PDRB_X1	-0.139900	0.045700	-3.064400	0.0025
INFLASI_X2	0.333200	0.197000	3.691000	0.0323
PENGANGGURAN_X3	0.111100	0.110400	3.007100	0.0032
BANTUAN_X4	-0.029600	0.039100	-3.756300	0.0045
ZAKAT_X5	-0.050200	0.025500	-3.971000	0.0420
ASPAL_X6	0.141600	0.064700	4.187000	0.0298
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.432945	0.7783
Idiosyncratic random			0.231071	0.2217
Weighted Statistics				
R-squared	0.201300	Mean dependent var	0.041870	
Adjusted R-squared	0.043100	S.D. dependent var	0.533601	
S.E. of regression	0.522000	Sum squared resid	1.931737	
F-statistic	7.272100	Durbin-Watson stat	2.072218	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji t Data Panel Desa

Dependent Variable: KEMISKINAN_DESA_Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 11/20/25 Time: 15:13 Sample: 2015 2023 Periods included: 9 Cross-sections included: 33 Total panel (unbalanced) observations: 261 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.332000	0.565000	4.129000	0.0000
PDRB_X1	-0.012000	0.037000	-0.313000	0.7540
INFLASI_X2	0.151000	0.065000	2.341000	0.0200
PENGANGGURAN_X3	0.225000	0.081000	2.784000	0.0060
BANTUAN_X4	-0.010000	0.018000	-0.555000	0.5800
ZAKAT_X5	-0.038000	0.015000	-2.515000	0.0130
LOG(DANA_DESA_X6)	-0.047000	0.015000	-3.204000	0.0020
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.491335	0.7341
Idiosyncratic random			0.295721	0.2659
Weighted Statistics				
Root MSE	0.293000	R-squared	0.136000	
Mean dependent var	0.137000	Adjusted R-squared	0.116000	
S.D. dependent var	0.318000	S.E. of regression	0.297000	
Sum squared resid	22.47100	F-statistic	6.664000	
Durbin-Watson stat	1.769000	Prob(F-statistic)	0.000000	